



Pemerintah
Kabupaten Tebo

NASKAH AKADEMIK **Rencana Pembangunan** **Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** **Kabupaten Tebo**

Tahun 2025–2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045	9
1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029	9
1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RTRW.....	10
1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS	10
1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD.....	11
1.4. Maksud dan Tujuan	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	13
2.1.1 Aspek Geografi	13
2.1.2. Demografi	55
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	70
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	70
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	78
2.3 Aspek Daya Saing	89
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	89
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	92
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur	100
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	102
2.4 Aspek Pelayanan Umum	107
2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).....	107
2.4.2 Indeks Pelayanan Publik	110

2.4.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	111
2.4.4	Indeks Inovasi Daerah	112
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....		114
3.1.	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun terakhir (2019-2023)	114
3.1.1	Pendapatan Daerah.....	118
3.1.2	Belanja Daerah.....	137
3.1.3	Pembiayaan Daerah	142
3.2.	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan (2025-2029)	146
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	146
3.2.2.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	162
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		168
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	168
4.1.1.	Permasalahan Lintas sektor	168
4.1.2.	Permasalahan urusan pemerintahan	172
4.2.	Isu Strategis	179
4.2.1	Isu Internasional	179
4.2.2	Isu Nasional RPJPN 2025-2045	181
4.2.3	Isu Nasional RPJMN 2025-2029	182
4.2.3	Isu Strategis Provinsi Jambi.....	185
4.2.5	Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Tebo.....	186
4.2.6	Telaah RTRW Kabupaten Tebo	191
4.2.7	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tebo.....	194
4.2.9	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Tebo	197
BAB V REKOMENDASI		209
BAB VI PENUTUP.....		215

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tebo	15
Tabel 2. 2. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Tebo	17
Tabel 2. 3 Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	20
Tabel 2. 4 Perkiraan Timbunan Sampah Harian Menurut Kecamatan Tahun 2021	28
Tabel 2. 5 Pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	28
Tabel 2. 6 Jumlah Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	29
Tabel 2. 7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023	36
Tabel 2. 8 Kawasan Hutan Kabupaten Tebo	43
Tabel 2. 9 Jenis Penutup Lahan Kabupaten Tebo	44
Tabel 2. 10 Pemanfaatan Lahan yang Tidak Sesuai dengan Pola Ruang RTRW	46
Tabel 2. 11 Indeks ketahanan pangan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	51
Tabel 2. 12 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2023	52
Tabel 2. 13. DAS yang Melewati Wilayah Kabupaten Tebo	53
Tabel 2. 14 Debit Rata-rata Bulanan Sub DAS Wilayah Kabupaten Tebo	54
Tabel 2. 15. Luas Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten Tebo	54
Tabel 2. 16 Rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	58
Tabel 2. 17 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	60
Tabel 2. 18 Proyeksi Tingkat Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	64
Tabel 2. 19 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur	65
Tabel 2. 20 Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Tebo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2023	71

Tabel 2. 21 Jumlah Fasilitas Penunjang Layanan Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2022.....	80
Tabel 2. 22 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2023.....	80
Tabel 2. 23 Kondisi Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tebo	102
Tabel 2. 24 Realisasi Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	103
Tabel 2. 25 Opini BPK Kabupaten Tebo 2017-2023	108
Tabel 2. 26 Indeks SPBE Kabupaten Tebo Tahun 2018-2023	111
Tabel 2. 27 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tebo.....	113
 Tabel 3.1 Realisasi APBD Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023	116
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023	117
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	120
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)	122
Tabel 3.5 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023	123
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)	123
Tabel 3.7 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023	125
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	126
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)	128
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)	129
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)	131
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)	132

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar).....	133
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar).....	134
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar).....	134
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	138
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	139
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	140
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)	141
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	142
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar).....	144
Tabel 3.22 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2019–2023 (Rp. Miliar).....	144
Tabel 3.23 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tebo, 2019–2023 (Rp. Miliar).....	145
Tabel 3.24 Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Tebo, 2019–2023 (Rp. Miliar).....	146
Tabel 3.25 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	148
Tabel 3.26 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	157
Tabel 3.27 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	163
Tabel 3.28 Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tebo Tahun 2025-2029	166
 Tabel 4. 1 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor.....	 168

Tabel 4. 2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	172
Tabel 4. 3 Isu Strategis Internasional.....	181
Tabel 4. 4 Isu strategis nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045	182
Tabel 4. 5 Highlight arah kebijakan Provinsi Jambi	183
Tabel 4. 6 Proporsi Capaian Indikator TPB Kabupaten Tebo	195
 Tabel 5. 1 Rekomendasi Kinerja dan Kerja Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	 210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD.....	8
Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	8
Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tebo.....	14
Gambar 2. 2 Proporsi Luas Berdasarkan Ketinggian Wilayah Kabupaten Tebo.....	16
Gambar 2. 3 Peta Lereng Kabupaten Tebo.....	17
Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tebo	18
Gambar 2. 5 Skema Pendanaan Kredit Karbon	19
Gambar 2. 6. Peta Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Tebo	22
Gambar 2. 7. Peta Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Tebo	23
Gambar 2. 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	24
Gambar 2. 9 Jasa Pemeliharaan kualitas udara Kabupaten Tebo <i>Sumber: KLHS Revisi RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033</i>	26
Gambar 2. 10 Persentase RTH dalam kondisi baik.....	27
Gambar 2. 11 Luasan tanam dan Produksi sawit Kabupaten Tebo <i>Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2006-2023</i>	31
Gambar 2. 12 Penggunaan lahan di Kabupaten Tebo.....	32
Gambar 2. 13. Tren Curah Hujan Kabupaten Tebo Tahun 2005 – 2023	33
Gambar 2. 14 Histori Kejadian ENSO Tahun 1990 – 2023.....	34
Gambar 2. 15 Tren Indeks <i>IOD</i> Tahun 2000 s/d 2023	35
Gambar 2. 16 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tebo.....	37
Gambar 2. 17 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Pencegahan Bencana dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tebo.....	38

Gambar 2. 18 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tebo.....	38
Gambar 2. 19 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Alam Kabupaten Tebo	40
Gambar 2. 20 Proporsi Wilayah Terhadap Kerawanan Bencana Alam di Kabupaten Tebo	40
Gambar 2. 21 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo.....	43
Gambar 2. 22 Luas Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan RTRW Kabupaten Tebo	45
Gambar 2. 23 Peta Sebaran Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan RTRW Kabupaten Tebo	47
Gambar 2. 24 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tebo Tahun 2020 (atas) dan Tahun 2022 (bawah).....	48
Gambar 2. 25 Perbandingan Penutup Lahan Tahun 2019 (a) dan Tahun 2023 (b).....	49
Gambar 2. 26 Perbandingan Penutup Lahan Tahun 2013 (a) dan Tahun 2023 (b).....	50
Gambar 2. 28 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023.....	56
Gambar 2. 29 Bentuk Piramida Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2023	57
Gambar 2. 30 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2029	63
Gambar 2. 31 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029	69
Gambar 2. 32 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia (%) Tahun 2019-2023	70
Gambar 2. 33 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia (%) Tahun 2017-2023	72
Gambar 2. 35 Indeks Gini Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2017-2023	74
Gambar 2. 36 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2017-2023 (%)	75
Gambar 2. 38 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2017-2023	76
Gambar 2. 39 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023.....	79
Gambar 2. 40 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020	82

Gambar 2. 41. Capaian Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2022	83
Gambar 2. 42. Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022	85
Gambar 2. 43 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023 .	86
Gambar 2. 44. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2015-2020	87
Gambar 2. 45. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.....	88
Gambar 2. 46 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2011-2023.....	89
Gambar 2. 48 PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan PDB Per Kapita Indonesia (Juta Rupiah) Tahun 2011-2023	91
Gambar 2. 50 Indeks Pendidikan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	93
Gambar 2. 51 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	94
Gambar 2. 52 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	95
Gambar 2. 53 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tebo Tahun 2022-2023.....	97
Gambar 2. 54 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023	98
Gambar 2. 55 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023.....	99
Gambar 2. 57 Kondisi jalan kewenangan Kabupaten Tebo Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2023 (Km).....	101
Gambar 2. 58 Grafik Indeks Demokrasi Provinsi Jambi tahun 2021-2023.....	104
Gambar 2. 59 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Kabupaten Tebo Tahun 2005-2022	105
Gambar 2. 60 Indeks Daya Saing Daerah Kab. Tebo 2022-2023	106
Gambar 2. 61 Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023	108
Gambar 2. 62 Nilai SAKIP Kabupaten Tebo Tahun 2014-2023.....	110

Gambar 2. 63 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tebo Tahun 2016-2023.....	111
Gambar 2. 65 Megatren Global 2045.....	180
Gambar 3. 1 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	119
Gambar 3. 2 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2019-2023 (Persen)	121
Gambar 3. 3 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (Persen).....	130
Gambar 3. 4 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023 (Persen)	136
Gambar 3. 5 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2019 – 2023.....	137
Gambar 3. 6 Proyeksi Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Tebo 2025-2029	150
Gambar 3. 7 Proyeksi Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo 2025-2029	151
Gambar 3. 8 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Tebo 2025-2029	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. RPJMD merupakan jembatan antara perencanaan jangka panjang dengan perencanaan tahunan dan penganggaran. Perencanaan jangka panjang yang telah disusun oleh Kabupaten Tebo harus diinstrumentasikan lebih operasional dan terhubung dengan agenda pembangunan setiap tahun. Operasionalisasi dan membangun keterhubungan ini yang yang diperankan oleh perencanaan jangka menengah.

RPJMD juga menjadi instrumen keterpaduan antara berbagai pendekatan perencanaan. RPJMD akan memadukan antara pendekatan politik dan teknokratik. Sebelum pendekatan politik berjalan dan akan mengarahkan perencanaan jangka menengah, maka harus dikerangkai oleh pendekatan teknokratik. Dalam hal ini, perencanaan teknokratik tersusun lebih dahulu dan menjadi acuan bagi calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi dan program. Rumusan visi, misi dan program dari calon kepala daerah dengan adanya dasar teknokratik diharapkan mampu selaras kebutuhan pembangunan dan mampu meningkatkan kinerja pembangunan.

Kabupaten Tebo dan seluruh daerah lain di Indonesia pada tahun 2024 mulai menyusun Naskah Akademik RPJMD. Definisi pendekatan teknokratik sendiri yaitu perencanaan yang disusun dengan kerangka berpikir dan metode ilmiah. Oleh karena itu, titik tekan penyusunan Naskah Akademik yaitu analisis mendalam kinerja pembangunan dan keuangan setidaknya dalam lima tahun terakhir. Analisis akan mengungkapkan berbagai kinerja pembangunan yang telah atau belum tercapai, dan disertai analisis faktor penyebab dan pendorong. Berbasis analisis kinerja yang mendalam, kemudian dirumuskan pemetaan masalah dan isu-isu strategis yang harus direspon dalam lima tahun mendatang. Pemetaan masalah dan isu-isu strategis ini

dalam tahap penyusunan RPJMD berikutnya pasca Pilkada menjadi salah satu acuan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pilihan program pembangunan yang sesuai.

Refleksi secara umum pembangunan dalam beberapa tahun terakhir yaitu Kabupaten Tebo di satu sisi telah memiliki kinerja yang baik, tetapi di sisi lain masih menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan untuk mewujudkan transformasi pembangunan dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Tingkat kemiskinan telah berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional meskipun mengalami kenaikan yaitu dari 6,34 persen pada tahun 2022 menjadi 6,46 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka Tebo juga cukup kecil meskipun juga terdapat kenaikan yaitu 1,38 persen pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 menjadi 1,71 persen. Kondisi yang baik juga terkait ketimpangan masyarakat, yaitu tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, yaitu 0,3 menjadi 0,235.

Di tengah capaian kinerja yang baik tersebut, Tebo juga masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Indikator kinerja kesejahteraan yang baik masih bergantung pada perkebunan sawit yang memiliki kerentanan. Pertanian yang di dalamnya terdapat Perkebunan sawit masih menjadi sektor yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tebo sebesar 51,44 persen pada tahun 2022. Kesejahteraan masyarakat secara luas juga masih menghadapi tantangan, yang ditandai dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, yaitu sebesar 70,63 pada tahun 2023. Pembangunan berkelanjutan juga menghadapi tantangan, tidak saja dari sektor sawit yang ke depan menghadapi standar *sustainability* tinggi, juga ditandai dari menurunnya kualitas lingkungan hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 sebesar 74,63 turun menjadi 63,53 pada tahun 2023.

Tantangan pembangunan Kabupaten Tebo harus direspon dengan arah kinerja dan strategi pembangunan yang tepat untuk lima tahun ke depan. Pembangunan periode 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045 yang memiliki tema pembangunan “memperkuat fondasi daya saing daerah”. Periode pertama sebagai tahapan perkuatan fondasi sangat kritis dan strategis untuk menentukan efektivitas pembangunan 20 tahun mendatang dalam rangka mencapai visi “Kabupaten Tebo Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 disusun dengan landasan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

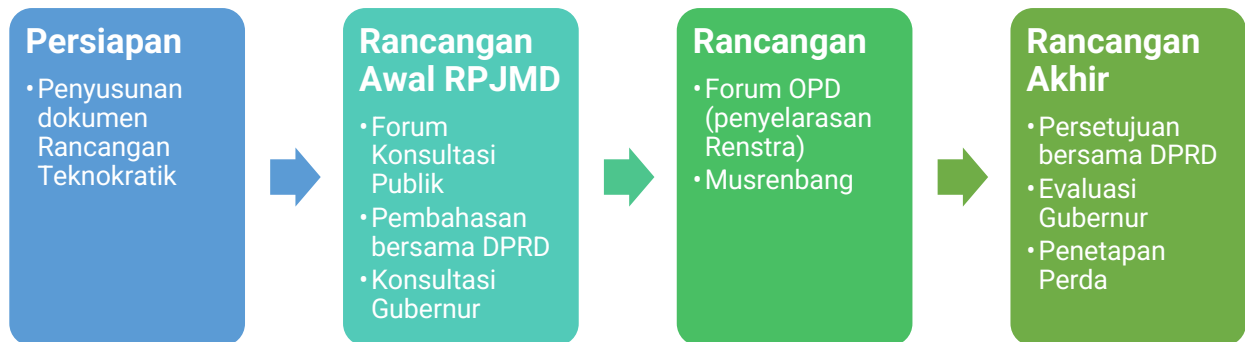
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

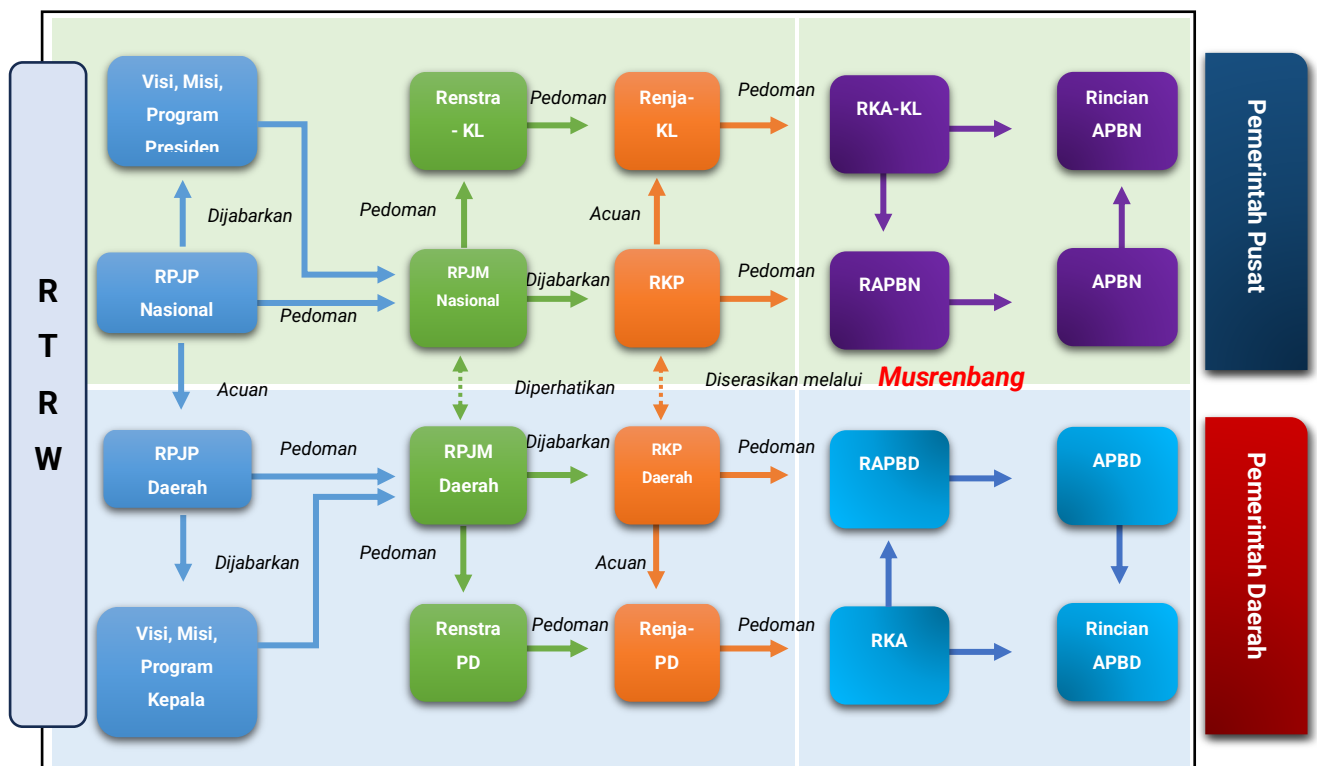
Penyusunan Naskah Akademik RPJMD merupakan rangkaian proses penyusunan RPJMD, yaitu mulai tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga penetapan Perda RPJMD. Naskah Akademik sendiri bagian dari tahap persiapan yang dijalankan sebelum pelaksanaan Pilkada. Dalam proses penyusunan RPJMD utuh, seluruh pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain memadukan pendekatan teknokratik dan politik, tahapan penyusunan RPJMD juga memadukan pendekatan partisipasi, bawah-atas dan atas-bawah. Pendekatan partisipasi digunakan, antara lain melalui Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang. Adapun penyelarasan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah dilakukan melalui konsultasi dengan Gubernur. Tahap ini terutama

untuk menyelaraskan antara perencanaan nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo. Proses penyusunan RPJMD secara utuh sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan. Pendekatan ini berupa tematik-holistik, integratif dan spasial. Melalui pendekatan ini, dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan kuat dengan rencana tata ruang wilayah. Berbagai agenda pembangunan di RTRW dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD. Gambaran hubungan RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan hubungan antar dokumen seperti terdapat di dalam Gambar 1.3, maka penjelasan hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan sebagai berikut:

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tebo 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Tebo. Tahap pertama memiliki tema pembangunan berupa “memperkuat fondasi daya saing daerah”. Tema pembangunan 3 periode berikutnya mencirikan tahapan yang semakin meningkat hingga mencapai visi 2045, yaitu “Kabupaten Tebo Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan. Visi tersebut selaras dan menopang pencapaian Visi Nasional, yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, serta Visi Provinsi Jambi, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Visi jangka panjang Kabupaten Tebo dicapai melalui 4 misi, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan unggul sebagai fondasi pembangunan; mewujudkan sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan berbasis inklusifitas dan ekonomi hijau; mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berketahanan, dan berwawasan lingkungan; dan mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

RPJMD merupakan instrumen penting untuk mulai mengoperasionalisasi agenda-agenda pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan, arah kebijakan transformatif, dan upaya superprioritas (*game changer*) di RPJPD akan diintegrasikan ke dalam strategi, arah kebijakan dan mendasari pemilihan program pembangunan jangka menengah. Demikian pula Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD juga diintegrasikan ke dalam RPJMD sesuai level indikator, sehingga diharapkan kinerja jangka panjang tercapai melalui cascading kinerja yang tepat di dalam rencana jangka menengah.

1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN. RPJMD dan RPJMN memiliki periode yang sama yaitu tahun 2025-2029, sehingga hal ini menjadi modal penting untuk membangun sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. RPJMN

tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. RPJMD dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah. Makna perkuatan dalam hal ini merupakan rekognisi atas capaian periode-periode sebelumnya, yang kemudian berbagai capaian yang baik semakin diperkuat dan persoalan mendasar perlu dituntaskan.

Provinsi Jambi di dalam RPJMN memiliki tema pembangunan berupa “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi Sumatera”. Tema tersebut mendukung pembangunan tema wilayah Sumatera dalam jangka panjang, yaitu “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Target kinerja makro untuk Provinsi Jambi pada tahun 2029, yaitu **share PDRB 1,5-1,5 persen; laju pertumbuhan ekonomi 5,2-6,1 persen; kemiskinan 2,91-3,41 persen; gini ratio 0,330-0,332; dan tingkat pengangguran terbuka 2,18-2,97 persen.**

1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RTRW

RPJMD mempedomani RTRW, sehingga rumusan kinerja dan agenda pembangunan jangka menengah selaras dengan peruntukkan tata ruang. RTRW Provinsi Jambi memiliki tujuan mewujudkan ruang wilayah yang maju, mandiri dengan pemanfaatan ruang yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Sedangkan RTRW Kabupaten Tebo memiliki tujuan mewujudkan kabupaten berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan RTRW Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo memberikan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah untuk memberikan nilai tambah dan dikerangkai oleh prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian secara lebih operasional, kebijakan, strategi dan program RTRW menjadi acuan di dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program RPJMD.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS

KLHS akan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, Integrasi

dokumen KLHS di dalam Naskah Akademik RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD

RPJMD sebagai operasionalisasi dari perencanaan jangka panjang, juga harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini diharapkan membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan penganggarnya.

RPJMD merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra. RPJMD juga harus dijabarkan ke dalam RKPD. Berbagai rumusan kinerja baik dalam bentuk IKU, IKK dan kinerja program di dalam RPJMD harus dipedomani dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dan perencanaan tahunan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Dengan demikian diharapkan tercapai pendekatan perencanaan dan penganggaran berupa *money follow program, program follow result*.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 yaitu sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program, serta landasan bagi penyusunan RPJMD secara utuh. Tujuan dari penyusunan dokumen Naskah Akademik, yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat analisis mendalam kinerja pembangunan dan penganggaran daerah, serta memetakan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan.
2. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk persiapan penyusunan Renstra.

3. Tersedianya dokumen yang menjadi landasan bagi penyusunan muatan RPJMD secara utuh, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program.

1.5. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1

Pendahuluan

- Bab 1 merupakan gambaran makro tentang seluruh isi dokumen yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah

- Bab 2 memuat gambaran umum kondisi daerah, terutama capaian kinerja beserta analisisnya. Bab ini disajikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Bab 3

Gambaran Keuangan Daerah

- Bab 3 merupakan gambaran kinerja dan proyeksi penganggaran yang memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan rancangan kerangka pendanaan periode 2025-2029.

Bab 4

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- Bab 4 memuat identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang berbasis analisis capaian kinerja di Bab 2. Permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu global, nasional dan regional kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi berkaitan dengan distribusi dan interaksi fenomena fisik, sosial, dan lingkungan yang terjadi secara keruangan. Karakteristik geografis wilayah digunakan sebagai dasar identifikasi potensi dan permasalahan wilayah, termasuk didalamnya aspek fisik keruangan, letak wilayah, topografi, penggunaan lahan, hidrologi, dan klimatologi. Pemanfaatan potensi keruangan berhubungan dengan aspek kependudukan yang dinamis seiring seperti distribusi jumlah penduduk, struktur, dan komposisi kependudukan. Aspek geografi dan demografi diuraikan di bawah ini didasarkan pada data seri yang relevan.

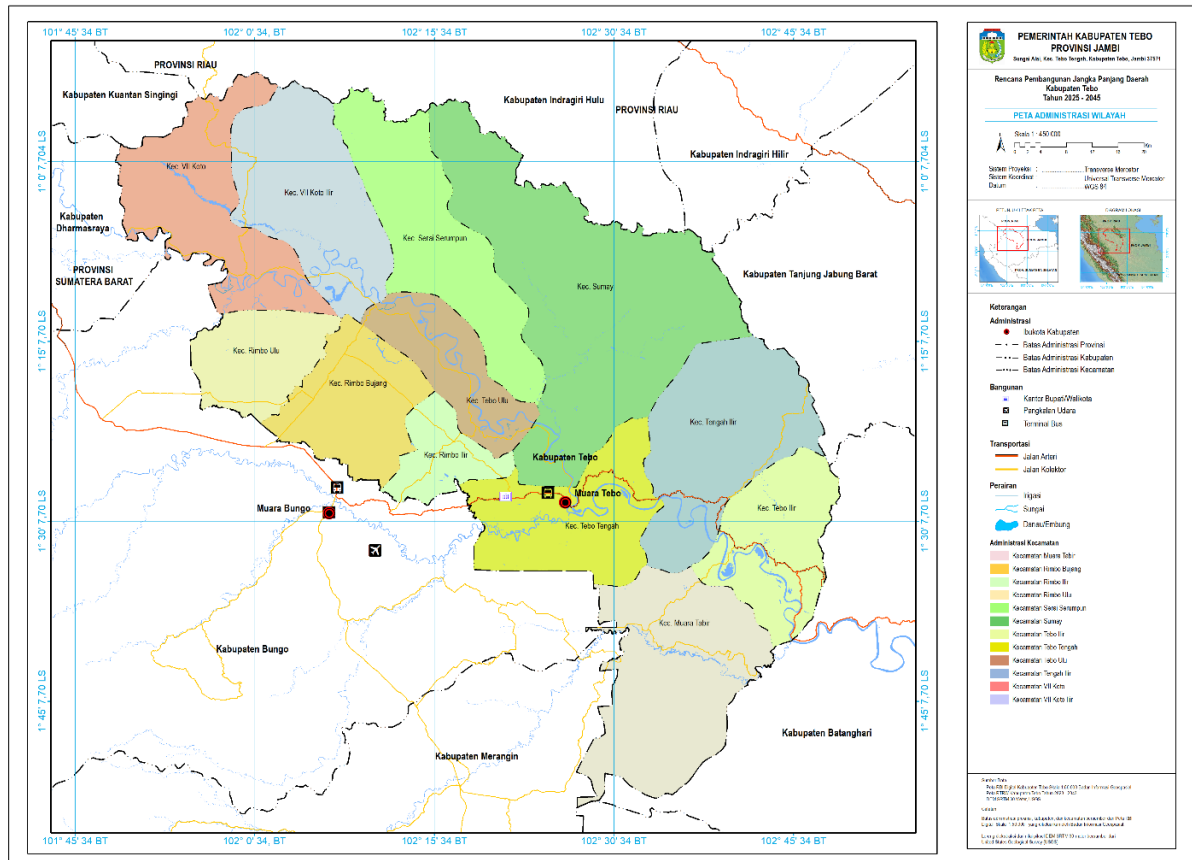
2.1.1 Aspek Geografi

Karakteristik keruangan setiap wilayah akan berbeda satu sama lain tergantung pada proses interaksi yang terjadi didalamnya, termasuk interaksi lingkungan, interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam, maupun interdependensi keruangan. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perumusan kebijakan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk perencanaan pembangunan kedepannya. Aspek keruangan wilayah Kabupaten Tebo diuraikan pada tiga konsep utama yaitu letak dan luas wilayah, kondisi fisik lahan, dan potensi pengembangan wilayah.

2.1.1.1 Letak dan Lokasi Wilayah

Kabupaten Tebo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi terletak pada posisi silang perbatasan dua provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Barat dengan Provinsi Jambi. Secara absolut posisi tersebut terletak antara 0°52'32" LS –

1°54'50" LS dan 101°48'57" BT - 102°49'17" BT. Visualisasi posisi geografis Kabupaten Tebo dapat dilihat pada peta di bawah ini



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tebo

Sumber: Olah Data, 2024

Peta di atas menunjukkan posisi geografis wilayah Kabupaten Tebo yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah

- Bagian Utara : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
- Bagian Selatan : Kabupaten Bundo Kabupaten Merangin
- Bagian Barat : Kabupaten Bundo dan Kabupaten Dharmastraya Provinsi Sumatera Barat
- Bagian Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Wilayah Kabupaten Tebo meliputi luas 646.100 hektar, setara dengan 12,88 persen wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Tebo terdiri atas 12 wilayah administrasi kecamatan meliputi Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tebo

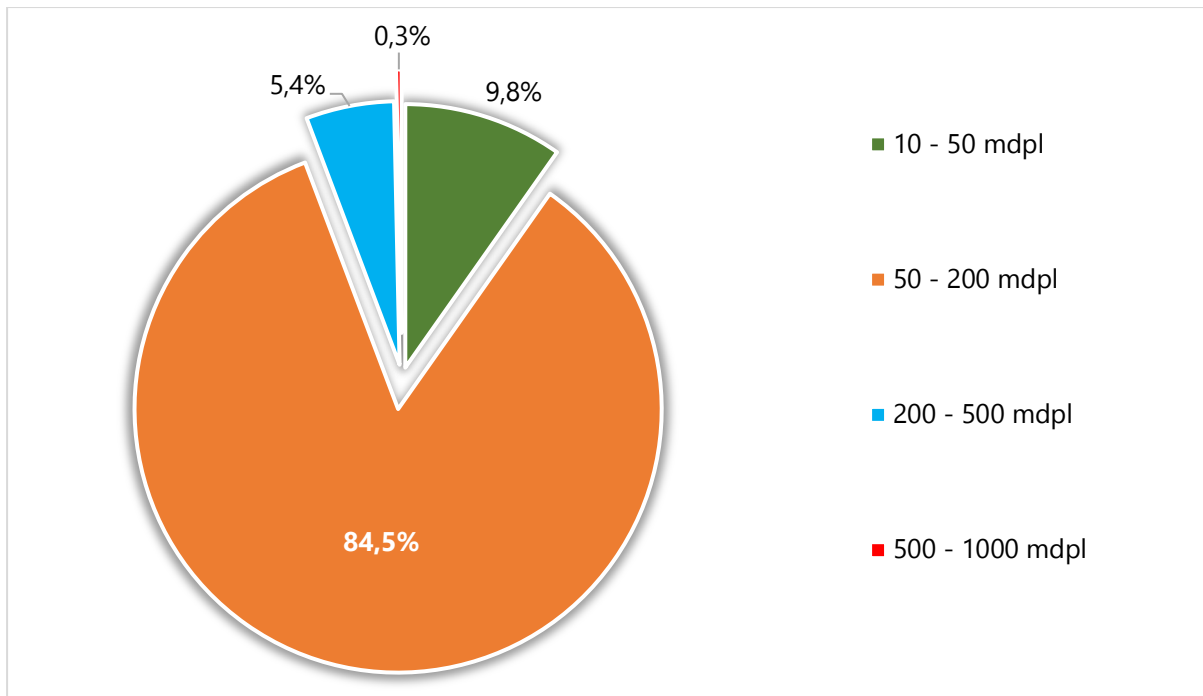
Tengah, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Serai Serumpun, dan Kecamatan VII Koto Ilir. Ibukota kabupaten adalah Muara Tebo yang berlokasi di Kecamatan Tebo Tengah.

Tabel 2. 1 Luas Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
					Desa	Kelurahan
1	Tebo Ilir	Sungai Bengkal	70.870	10,97	10	1
2	Muara Tabir	Pintas Tuo	50.930	7,88	8	-
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	98.356	15,22	10	2
4	Sumay	Teluk Singkawang	126.800	19,63	12	-
5	Tengah Ilir	Mangupeh	22.144	3,43	6	-
6	Rimbo Bujang	Wirotho Agung	40.692	6,30	13	3
7	Rimbo Ulu	Suka Damai	29.574	4,58	12	-
8	Rimbo Ilir	Karang Dadi	21.434	3,32	10	-
9	Tebo Ulu	Pulau Temiang	41.030	6,35	16	1
10	VII Koto	Sungai Abang	65.879	10,20	10	-
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	31.570	4,89	8	-
12	VII Koto Ilir	Balai Rajo	46.821	7,25	6	-
Kabupaten Tebo		Muara Tebo	646.100	100	122	7

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2024

Distribusi luas wilayah setiap kecamatan berbeda satu sama lain. Daerah dengan cakupan terluas adalah Kecamatan Sumay dengan proporsi luas 19,63 persen atau 126.800 hektar dan Kecamatan Tebo Tengah dengan proporsi 15,22 persen atau 98.356 hektar. Luas wilayah dengan cakupan terendah memiliki proporsi kurang dari 5 persen, seperti di Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Rimbo Ulu, dan Kecamatan Rimbo Ilir. Jumlah Desa di Kabupaten Tebo berjumlah 122 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan Tebo Ulu merupakan daerah dengan jumlah desa terbanyak yaitu meliputi 16 desa. Sedangkan Kecamatan Tengah Ilir dan VII Koto Ilir memiliki jumlah desa lebih sedikit yaitu masing-masing hanya 6 desa.

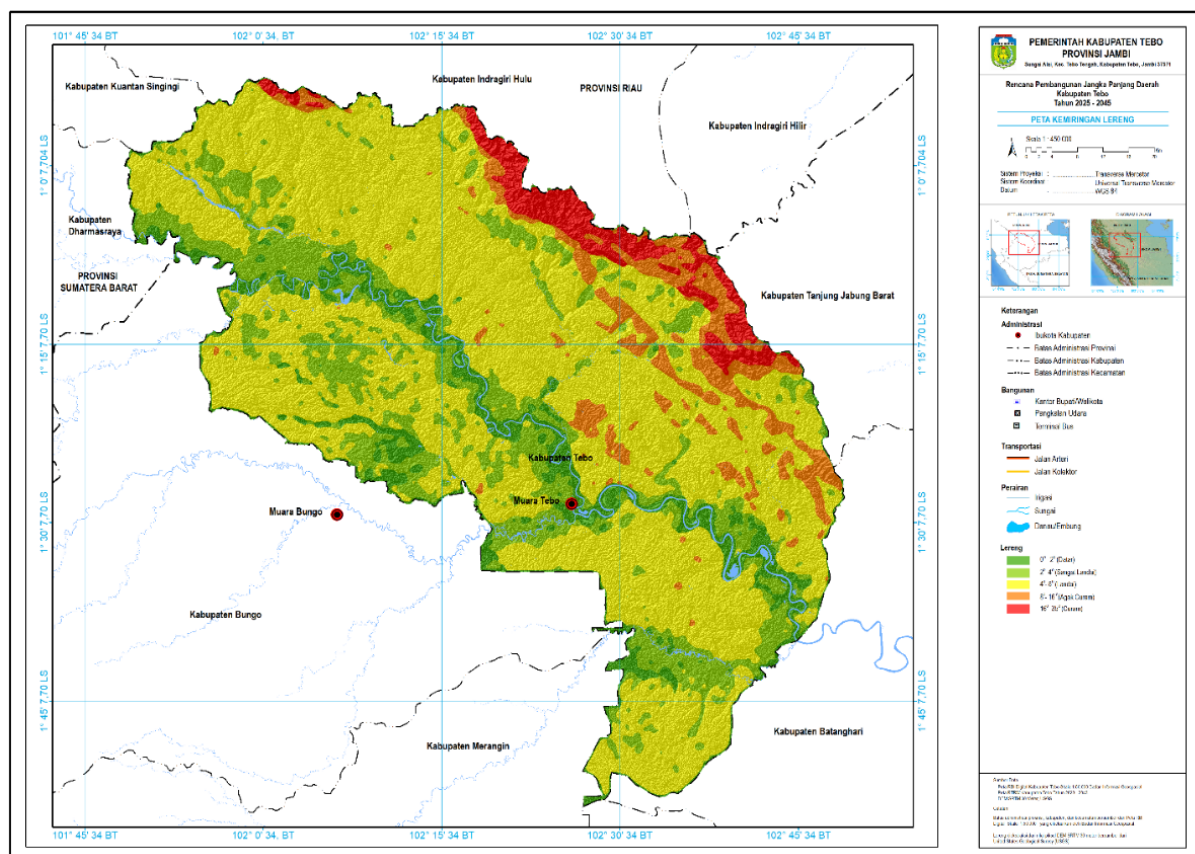


Gambar 2. 2 Proporsi Luas Berdasarkan Ketinggian Wilayah Kabupaten Tebo

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2023

Tatanan morfologi Kabupaten Tebo dibentuk oleh proses fluvial berasal dari tenaga aliran air sungai. Kabupaten Tebo dialiri oleh beberapa sungai besar, menyebabkan proses erosi lateral dan pengendapan lebih dominan sehingga menyusun relief yang cenderung datar dan landai sepanjang aliran sungai. Topografi Kabupaten Tebo umumnya terletak pada ketinggian antara 50 – 200 meter di atas permukaan laut (mdpl) berupa relief berombak-bergelombang, dengan persentase 84,5 persen dari luas wilayah Kabupaten Tebo. Kecamatan dengan karakteristik demikian diantaranya yaitu Kecamatan VII Koto, Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ilir, dan Muara Tabir. Topografi dataran rendah di hanya meliputi 9,8 persen wilayah, sedangkan topografi perbukitan dengan beda tinggi 200 mdpl sampai lebih dari 500 mdpl meliputi 5,7 persen wilayah. Perbukitan di Kabupaten Tebo berada pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan kawasan dilindungi di Provinsi Jambi, keanekaragaman hayati pada topografi perbukitan lebih tinggi.

Gambaran relief permukaan di Kabupaten Tebo disajikan dengan perbedaan kelerengan yang diukur berdasarkan perbedaan tinggi antara dua lokasi. Ukuran lereng disajikan dalam satuan derajat yang seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 3 Peta Lereng Kabupaten Tebo

Sumber: Olah Data, 2024

Tabel 2. 2. Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Tebo

No	Kemiringan Lereng	Relief	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	0°-2°	Datar	57.662,97	9,43
2	2°-4°	Sangat Landai	108.435,51	17,74
3	4°-8°	Landai	377.048,48	61,69
4	8°-16°	Agak Curam	41.641,78	6,81
5	16°-35°	Curam	26.416,48	4,32
Kabupaten Tebo			646.100	100

Sumber: Olah Data, 2023

Wilayah dengan kelerengan relatif landai sampai datar tersebar pada sisi selatan, barat, dan sisi timur. Berdasarkan klasifikasi relief Van Zuidam (1983), kelas kelerengan landai meliputi area yang lebih luas yaitu 61,69 persen wilayah atau 377.048,48 hektar. Hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Tebo yang memiliki relief curam dan agak curam yaitu berkisar 4,32 persen dan 6,81 persen dari luas wilayahnya. Kelerengan yang cenderung landai dikontrol oleh proses endapan material sedimen yang oleh tenaga aliran sungai. Proses deposisi tersebut

[illegible]

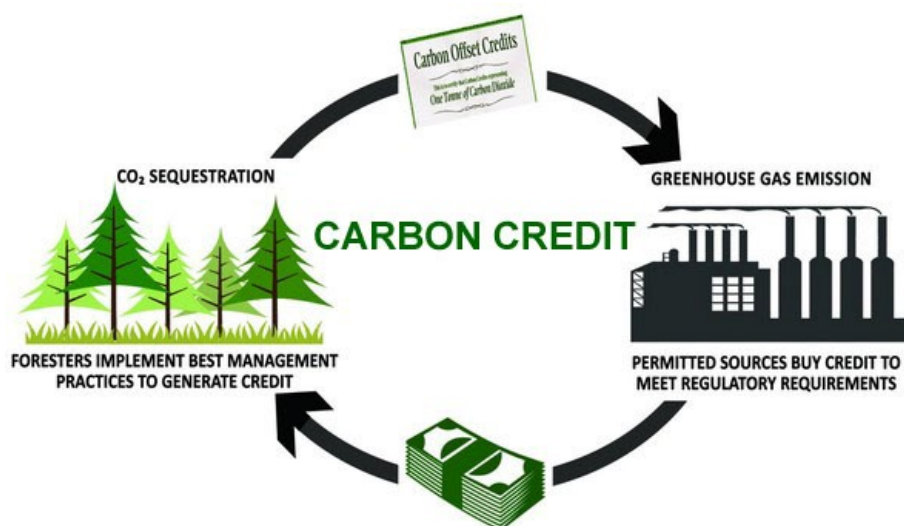
Sumber: Olah Data, 2024

18 | Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo 2025-2029

adanya proses transportasi dan sedimentasi tenaga aliran sungai. Proses transportasi material cenderung mengarah pada sisi timur karena kelerengan yang lebih lemah, sehingga pengendapan material aluvium lebih banyak ditemukan di sisi timur. Lebih lanjut, Formasi Muara Enim merupakan formasi berlapis yang tersusun atas batupasir tuff, batulempung tuff, dan serpih tuff. Formasi Muara Enim dikenal sebagai materi induk batubara yang terbentuk pada Cekungan Sumatera Selatan. Oleh karenanya, potensi batubara diindikasikan terdapat di sisi timur hingga sisi barat tempat formasi tersebut terendapkan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tebo dianalisis melalui karakteristik geografis wilayah termasuk kondisi biofisik lahan, penataan ruang, dan nilai budaya. Dari faktor biofisik lahan Kabupaten Tebo diuntungkan berada pada wilayah beriklim tropis dengan curah hujan relatif tinggi setiap tahunnya. Keberadaan hutan tropis yang membentang di Kabupaten Tebo mengandung keanekaragaman hayati yang kaya akan keberagaman flora dan fauna, berperan penting dalam mengatur keseimbangan ekosistem termasuk sebagai pengaturan cadangan karbon, siklus nutrisi tanah, dan produksi primer.



Gambar 2. 5 Skema Pendanaan Kredit Karbon

Sumber: <https://sc.audubon.org/>

Tutupan hutan tropis dengan vegetasi tegakan memberikan keuntungan dalam pengaturan cadangan dan simpanan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Diberlakukannya kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di

Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 membuka peluang bagi Kabupaten Tebo untuk memperoleh pendanaan kredit karbon dari sektor *Forest and Other Land Use* (FOLU). Potensi serapan karbon dari hutan mineral mencapai 20-30 ton setara CO₂e setiap hektarnya. Perkembangan nilai ekonomi karbon hutan tropis pada pasar karbon saat ini sekitar US\$ 2 miliar pada tahun 2022 dan diprediksi akan mencapai US\$ 10 miliar pada tahun 2030. Jika diasumsikan dalam setiap hektar hutan mampu menyerap 20 ton CO₂e, bentangan kawasan hutan lindung seluas 50.790 hektar di Kabupaten Tebo diperkirakan dapat memperoleh dana kredit karbon mencapai 3,4 miliar rupiah. Dana yang diperoleh dari penjualan kredit karbon dapat digunakan secara luas untuk memperbaiki kualitas lingkungan suatu wilayah. Kawasan hutan di Kabupaten Tebo penting untuk dijaga kelestariannya sebagai identitas nilai budaya sekaligus berperan dalam mereduksi emisi GRK untuk menangani krisis iklim.

Beralih pada faktor pemanfaatan lahan, jenis penggunaan lahan Kabupaten Tebo didominasi oleh sektor perkebunan sawit dan karet sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat.

Tabel 2. 3 Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan

Tahun	Kelapa Sawit		Karet		Kelapa		Kopi		Kakao	
	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
2017	59.469	NA	114.147	NA	913	NA	166	NA	244	NA
2018	103.072	NA	115.100,62	NA	1.026	NA	222	NA	276	NA
2019	56.760	119.264	105.421	50.099	1.069	449	274	47	340	71
2020	61.130	118.992	114.294	50.485	1.137	7.730	251	40	341	65
2021	60.985	118.677	114.263	114.263	1.087	1.087	284	284	378	378
2022	49.655	126.054	114.308	114.308	1.096	1.105	286	286	378	378
2023	60.982	129.170	114.015	114.025	1.041	1.041	260	260	333	333

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka

Terdapat lima jenis komoditas unggulan di Kabupaten Tebo diantaranya adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Area tanaman terluas di Kabupaten Tebo pada tahun 2023 adalah komoditas karet kemudian diikuti dengan komoditas sawit. Luas tanaman karet mengalami penurunan seluas 8.594 hektar selama lima tahun terakhir dibandingkan luasan tahun 2019. Penurunan luas tanaman mempengaruhi jumlah produksi karet yang menurun sebesar 63.926 ton di tahun 2023. Sementara luas tanaman sawit mengalami penurunan 4.370 hektar di tahun 2023, namun produksinya bertambah 272 ton atau meningkat 0,22 persen dibandingkan tahun 2022.

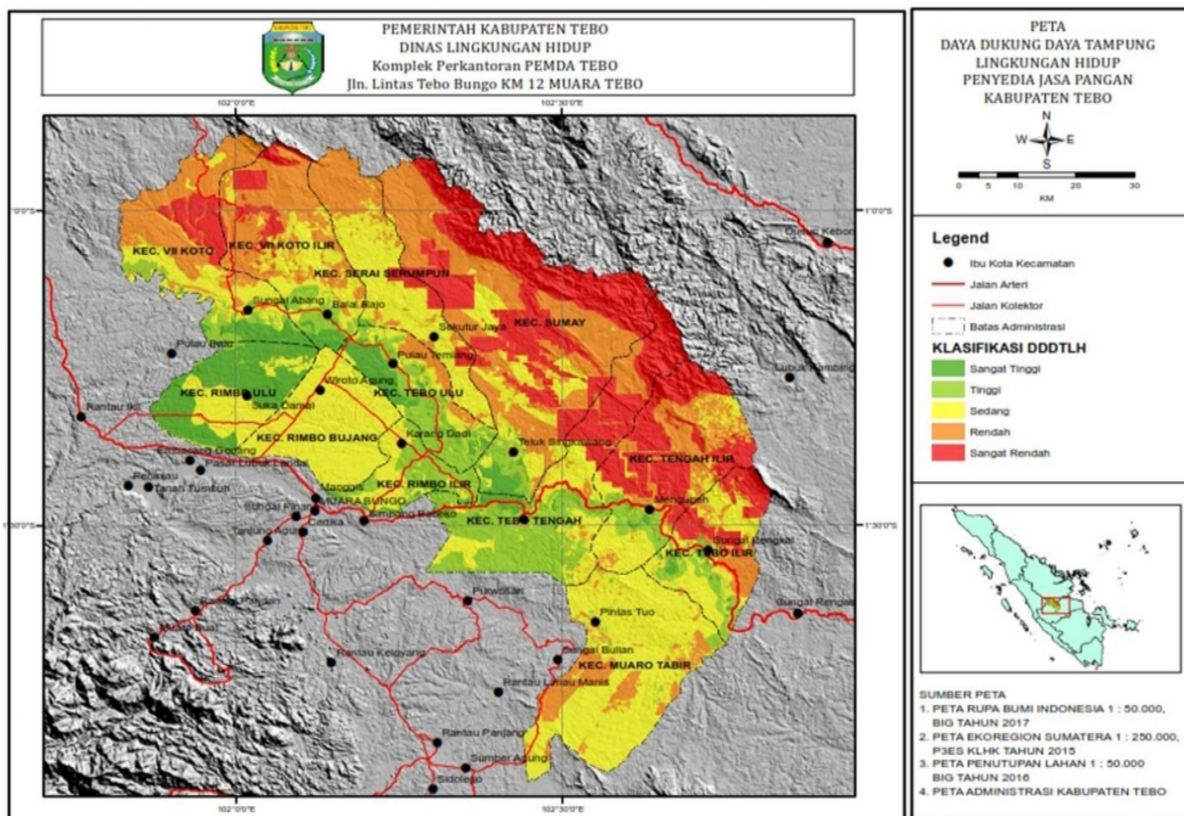
2.1.1.3 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Komponen lingkungan hidup terdiri atas berbagai entitas yang saling berinteraksi, menghasilkan seperangkat fungsi yang kemudian dimanfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) merupakan salah satu fungsi ekosistem dalam menyediakan sumber daya alam bagi manusia. Meluasnya pemanfaatan sumber daya, berpengaruh signifikan terhadap kualitas DDDTLH sebagai contoh deforestasi menyebabkan tata hidrologis DAS terganggu. Penyelarasan kondisi DDDTLH terhadap perencanaan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pembangunan berkeadilan yang menyeimbangkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

1. DDDTLH Penyedia Pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial yang diperoleh melalui sumber hayati pertanian dan perkebunan, serta protein hewani dari perikanan dan peternakan. Penyediaan sumber pangan sangat penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Disisi lain, karakteristik lingkungan hidup setiap wilayah akan berbeda-beda dalam menyediakan fungsi penyediaan pangan. DDDTLH penyediaan pangan di Kabupaten Tebo berusaha memetakan distribusi dan cakupan area yang potensial dalam mendukung produksi pangan secara optimal.

Cakupan luas jasa lingkungan penyedia pangan berkategori tinggi di Kabupaten Tebo hanya meliputi 18,11 persen. Sementara itu, jasa penyediaan berkategori Sedang meliputi area cukup luas yaitu 36,99 persen. Area dengan kategori Tinggi dan Sedang relatif mendukung budidaya lahan pertanian secara optimal untuk menghasilkan produktivitas yang jauh lebih maksimal dibandingkan kategori rendah. Sebaliknya, kategori Rendah di Kabupaten Tebo meliputi area cukup luas yaitu 44,89 persen. Area ini relatif kurang mendukung untuk budidaya pertanian, selain dari aspek topografi yang kurang mendukung, kesuburan tanah, dan persediaan tanah tidak mampu mengoptimalkan produktivitas lahan. Namun demikian, melalui upaya rekayasa lahan seperti pemupukan dan pengairan berkelanjutan, dapat memperbaiki karakteristik lahan untuk meningkatkan produktivitas lahan.



Gambar 2. 6. Peta Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Tebo

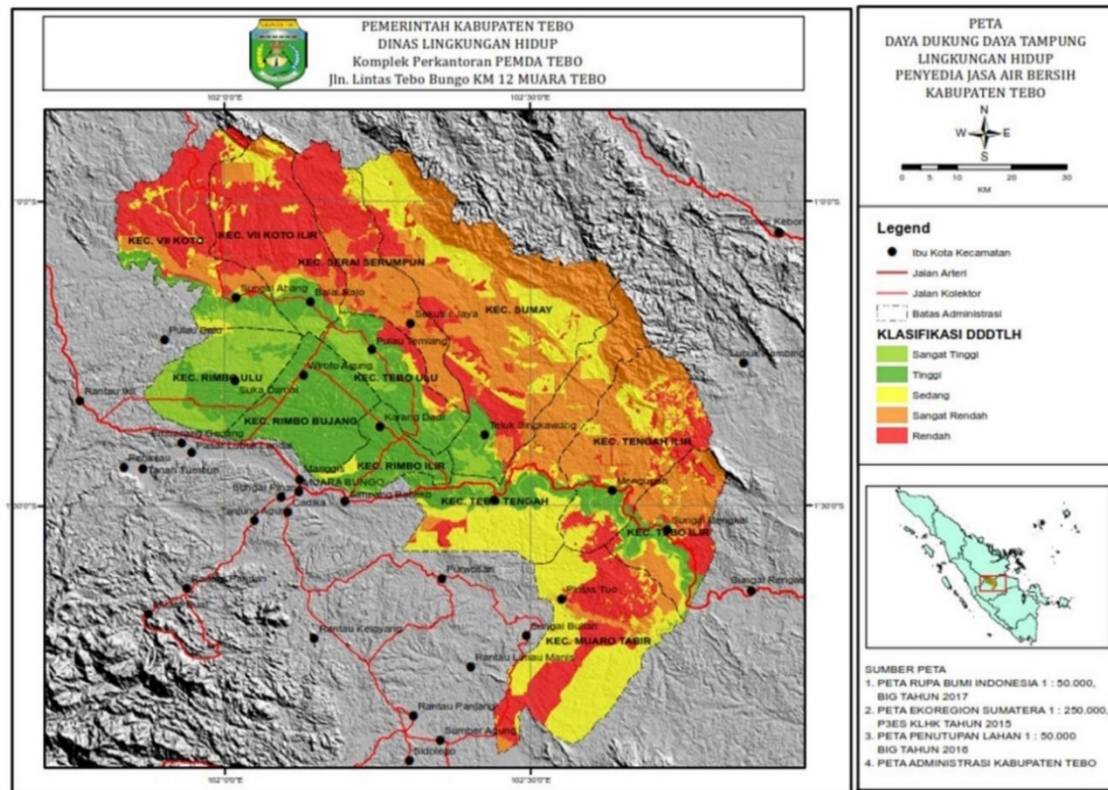
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

Peta jasa lingkungan penyediaan pangan menyajikan distribusi kategori penyediaan pangan di Kabupaten Tebo secara keruangan. Diketahui jasa penyediaan pangan berkategori tinggi berada pada topografi berlereng landai dengan bentanglahan fluvial serta berasosiasi dengan aliran sungai. Daerah tersebut termasuk pada Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir, dan kecamatan Tebo Tengah. Proses geomorfologis bentanglahan fluvial terbentuk oleh proses aliran sungai yang mengangkut dan mengendapkan sedimen yang kaya akan nutrisi dan mineral tanah. Tanah hasil sedimentasi dan endapan sungai umumnya lebih gembur dan mudah diolah. Selain itu, asosiasi terhadap sumber air sungai memudahkan akses terhadap sumber air.

2. DDDTLH Penyedia Air Bersih

Air baku digunakan secara luas untuk kebutuhan domestik, pengelolaan lahan pertanian, dan kebutuhan industri. Kebutuhan akan air baku akan semakin meningkat seiring berkembangnya suatu daerah. Namun ketersediaan air akan tetap sebagai suatu siklus hidrologis. Pengelolaan lingkungan yang tepat mutlak diperlukan untuk

menjaga kesinambungan antara ketersediaan air dengan kebutuhan pembangunan. Pemetaan jasa lingkungan penyedia air berusaha mengidentifikasi sebaran dan luas wilayah yang berkapasitas sebagai sumber penyedia air bersih di Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 7. Peta Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Tebo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

Penghitungan kategori jasa lingkungan menunjukkan bahwa penyediaan air kategori tinggi di Kabupaten Tebo meliputi area seluas 24,67 persen, kemudian kategori sedang meliputi area seluas 20,87 persen. Area dengan kategori tinggi dan sedang mampu menyimpan cadangan air permukaan dengan sangat baik. Area ini tersebar pada bentanglahan fluvial berasosiasi dengan aliran sungai, morfologi yang membentuk material alluvial berkemampuan sangat baik dalam tata hidrologis permukaan. Material sedimen tergolong sebagai lapisan pembawa air yang baik karena ruang pori yang terbentuk antar-butir dan rekahan yang mudah meloloskan air. Sementara itu, jasa lingkungan penyedia air bersih Kategori Rendah meliputi lebih 54,46 persen. Area ini tersebar pada sisi utara dengan topografi perbukitan struktural. Namun demikian, ekologi bentanglahan hutan tropis di sisi utara berperan sebagai imbuhan air permukaan yang sangat baik, untuk itu tutupan tegakan hutan harus dipertahankan kelestariannya. Meskipun cakupan luas Kategori Rendah lebih luas,

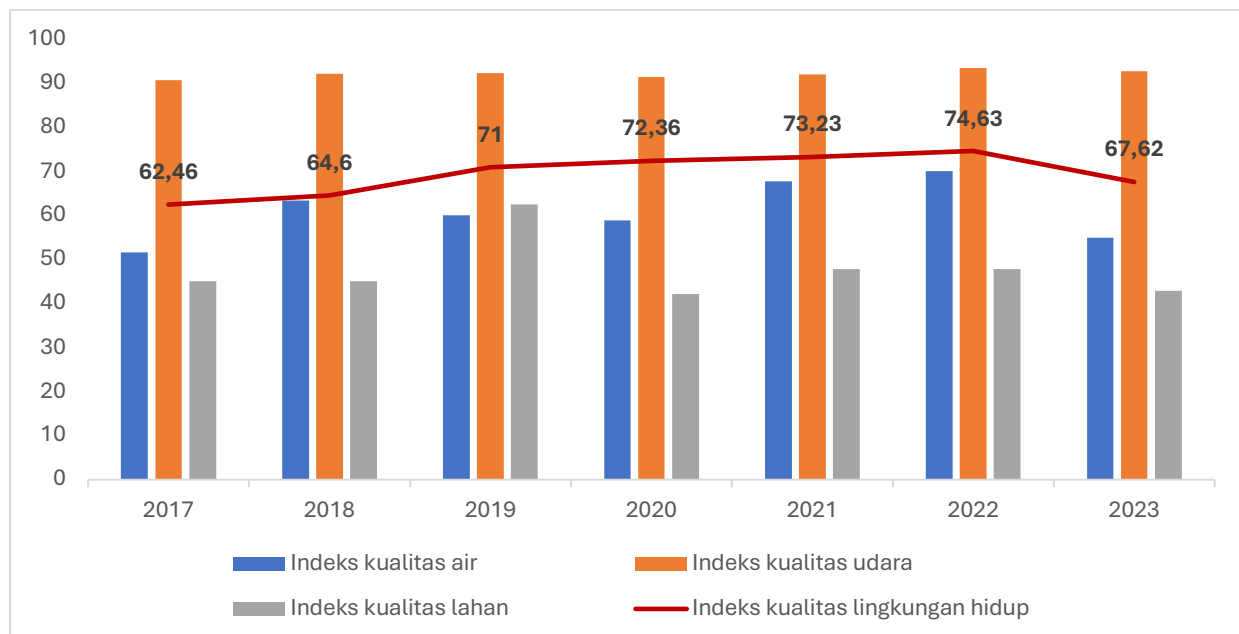
berdasarkan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019, status daya dukung penyedia air bersih di Kabupaten Tebo tergolong surplus. Artinya Tingkat ketersediaan air di Kabupaten Tebo mampu mencukupi kebutuhan air untuk kedepannya.

2.1.1.4 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam bersinggungan langsung dengan komponen lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya memerlukan pengelolaan yang bijak untuk mencegah tereduksinya fungsi esensial lingkungan hidup. Keserasian antara pengelolaan lingkungan hidup dan aktivitas pembangunan dapat terealisasi dengan baik melalui pemantauan kondisi lingkungan hidup. Berikut ini disajikan data yang merepresentasikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tebo.

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang berkualitas mampu menyediakan fungsi esensial secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH dimaknai sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan mengendalikan kondisi lingkungan hidup. Parameter penilaian IKLH terdiri atas kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Berikut ini merupakan capaian IKLH beserta komponen pengukurannya dengan data awal di tahun 2017 dan data termutakhir di tahun 2023.



Gambar 2. 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

Capaian nilai IKLH mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2017 sampai tahun 2022, menandakan upaya dan program pemerintah daerah berhasil meningkatkan kualitas lingkungan secara bertahap. Capaian nilai IKLH tersebut menunjukkan kualitas lingkungan Kabupaten Tebo dalam kondisi yang optimal dengan kategori berpredikat Baik. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian IKLH cukup besar 7,01 poin, mengakibatkan pergeseran kualitas lingkungan ke predikat Sedang.

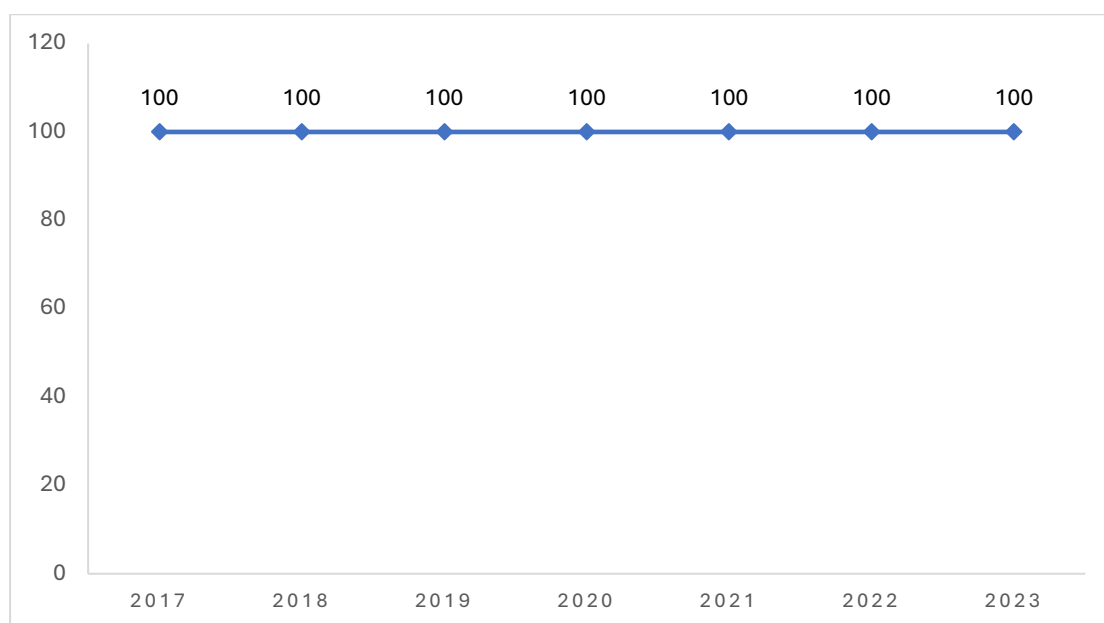
Indikator pembentuk IKLH di Kabupaten Tebo umumnya memiliki tren fluktuatif, dengan capaian tertinggi ditunjukkan oleh indeks kualitas udara (IKU). Capaian IKU menunjukkan nilai >90 setiap tahunnya, menandakan kondisi udara Kabupaten Tebo berkualitas sangat baik. Namun terjadi penurunan 0,7 poin pada tahun 2023 yang menandakan adanya pergeseran komponen lingkungan dalam purifikasi kolom udara. Minimnya sumber polusi udara dengan karakteristik wilayah dominan dengan tutupan lahan hijau merupakan pengaruh utama berkualitasnya udara di Kabupaten Tebo. Tegakan hutan yang cukup luas turut berperan besar dalam perbaikan udara melalui proses fotosintesis.

Sementara itu, capaian indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2022 berkategori Baik kemudian merosot cukup jauh dengan penurunan 15 poin dan berpredikat Sedang di tahun 2023. Sebelumnya capaian IKA mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022, dimana terjadi penambahan 8,88 poin dan 2,22 poin. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber air dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya kegiatan sanitasi masyarakat yang langsung membuang limbah ke sungai, pembuangan sampah ke badan sungai, sedimentasi yang cukup besar, dan pertambangan emas ilegal (PETI) sepanjang aliran sungai Batanghari dan Batang Tebo. Sedimentasi pada aliran sungai salah satunya disebabkan oleh penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan limpasan air tidak terbenyung dan membawa sedimentasi pada sistem aliran air. Pencemaran yang perlu mendapat perhatian serius adalah aktivitas PETI, penggunaan merkuri yang tidak bertanggung jawab memperbesar peluang masyarakat terekspos dengan zat kimia tersebut. Berbagai upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber air bertanggung jawab perlu untuk diperkuat untuk mengoptimalkan capaian IKA, baik dari aspek perbaikan perilaku masyarakat dan penegakan hukum terkait aktivitas yang

Capaian indeks kualitas lahan (IKTL) pada tahun 2023 memperoleh predikat Sedang dengan nilai 67,62. Capaian tersebut menurun 7,01 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Pemrosotan capaian IKTL cukup besar pernah terjadi pada tahun 2020 yaitu bergeser 20,33 poin, kemudian melonjak 5,66 poin di tahun 2021 dan berhasil mempertahankan predikat hingga tahun 2022. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh alih komoditas pada beberapa jenis pemanfaatan lahan, pergeseran pemanfaatan perkebunan karet menjadi perkebunan sawit lebih sering terjadi. Alih komoditas terjadi sebagai konsekuensi dari nilai ekonomi sawit yang terus melonjak dan relatif stabil dibandingkan dengan hasil perkebunan karet. Selain itu, perambahan hutan secara ilegal dan lahan kritis menjadi indikasi selanjutnya yang mendorong buruknya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tebo. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian dari IKTL.



stabilitas iklim, dan meningkatkan estetika dan kualitas lingkungan hidup di suatu kawasan. RTH berperan sangat signifikan terhadap pengaturan limpasan aliran dan penyaringan udara perkotaan, untuk itu keberadaannya sangat vital bagi kawasan perkotaan. Pengelolaan RTH di Kabupaten Tebo merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Catatan data menunjukkan pengelolaan kawasan RTH telah berjalan secara optimal dengan capaian 100 persen pada tahun awal 2017 sampai data termutakhir tahun 2023.



Gambar 2. 10 Persentase RTH dalam kondisi baik

Sumber: LKPJ Bupati Tebo, 2022 & RPD Kabupaten Tebo 2023-2026

Jenis RTH terbagi atas RTH publik dan RTH privat, pengelolaan RTH privat menjadi wewenang masyarakat yang menguasai dan memiliki lahan RTH tersebut. RTH privat cenderung mudah mengalami pergantian fungsi, sebagai contoh lahan pekarangan yang diubah menjadi perumahan. Dengan demikian penyediaan RTH yang disesuaikan dengan kebutuhan Kawasan perkotaan, umumnya dapat dimaksimalkan melalui RTH publik. Peran vital RTH dalam Kawasan perkotaan, membutuhkan pengelolaan yang tidak hanya mengedepankan estetika namun juga fungsi alamiahnya. Sinergitas antar pemangku kebijakan dan Masyarakat serta organisasi non pemerintahan menjadi penting untuk dimaksimalkan untuk mempertahankan keberlanjutan RTH pada kawasan perkotaan. Diharapkan kedepannya, pengelolaan RTH di Kabupaten Tebo dapat berjalan sinergis dan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah

Aktivitas manusia menghasilkan sisa buangan bahan yang tidak digunakan secara lanjut, dalam bentuk padatan disebut sebagai sampah sementara dalam bentuk cairan disebut sebagai limbah. Nilai guna sampah dan limbah umumnya berkurang atau tidak bernilai guna sama sekali. Cemar zat kimia dari sampah dan limbah berbahaya bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan sampah dan limbah harus ditangani dengan bijak dan bertanggung jawab. Berikut disajikan capaian penyediaan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 4 Perkiraan Timbulan Sampah Harian Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
Tebo Tengah	81,218
Tebo Ilir	57
Tebu Ulu	66,174
Rimbo Bujang	126,984
Muara Tabir	34,747
Sumay	43,546
Tengah Ilir	53,316
Rimbo Ulu	75,518
Rimbo Ilir	47,056
VII Koto	40,186
Serai Serumpun	19,476
VII Koto Ilir	36,738
Kabupaten Tebo	625,016

Sumber: DLH Kabupaten Tebo, 2021

Timbulan sampah di Kabupaten Tebo diperkirakan mencapai volume 625.016 m³/hari, dengan volume tertinggi dihasilkan oleh Kecamatan Rimbo Bujang yaitu mencapai 20,36 persen volume sampah total. Selain sebagai daerah jumlah penduduk tertinggi, Kecamatan Rimbo Bujang merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kabupaten Tebo. Sampah yang dihasilkan lebih beragam dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tabel 2. 5 Pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Buah	32	32	32	30	22	22	26
Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3R	Buah	1	1	1	1	1	1	1

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Buah	3	4	4	4	4	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2024

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo masih cukup terbatas. Hal ini mempengaruhi capaian pengelolaan sampah secara optimal di Kabupaten Tebo. Jumlah sampah yang tidak terkelola jauh lebih besar dan dikhawatirkan akan mencemari sumber penghidupan di Kabupaten Tebo seperti sumber air. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diindikasikan menjadi penyebab lain terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 6 Jumlah Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT)	Buah	0	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2024

Upaya pengelolaan limbah di Kabupaten Tebo juga masih belum optimal, terutama terkait pengelolaan lumpur tinja (*black water*). Catatan data di awal tahun 2017 sampai dengan data termutakhir di tahun 2023 menunjukkan instalasi pengelolaan lumpur tinja hanya berjumlah 1 unit yaitu IPLT pusat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian unit IPLT juga turut menjadi kendala. Jarak antar daerah yang akan dilayani angkutan penyedot limbah tinja yang sangat jauh dan belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung mobilisasi menjadi faktor penghambat lainnya dalam mengelola limbah tinja tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, didukung dengan teknisi terampil perlu untuk diupayakan, supaya dapat mengoptimalkan pengelolaan sanitasi yang lebih baik dan bertanggungjawab di Kabupaten Tebo.

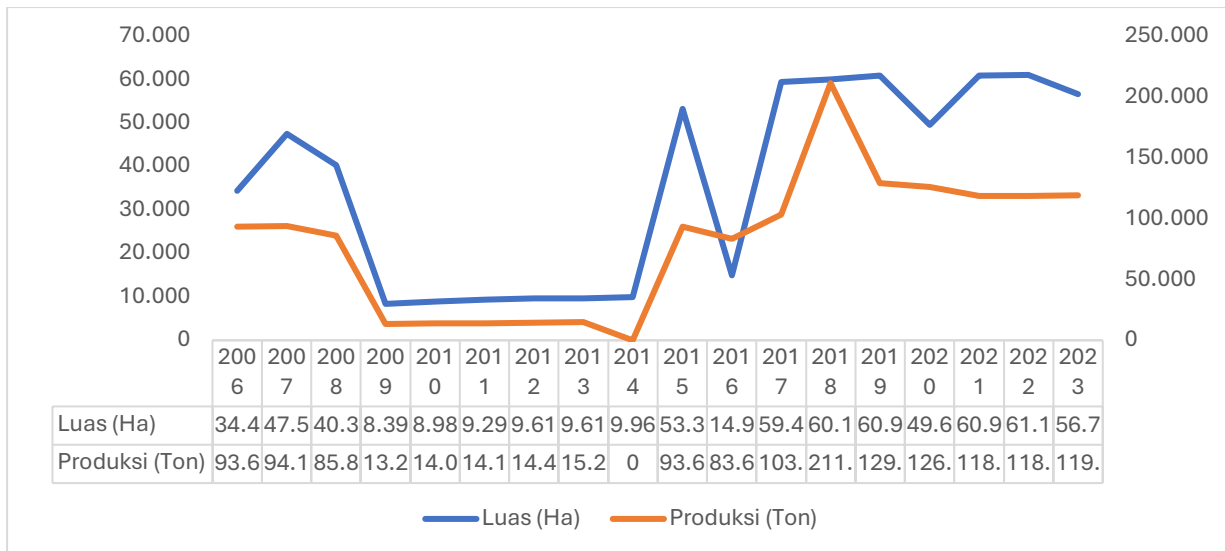
c) Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Lingkungan

Sejarah panjang Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyisakan permasalahan lingkungan yang luas, khususnya terkait angka deforestasi di Indonesia. Menurut catatan data di tahun 2001 hingga 2016, kemunculan Perkebunan

kelapa sawit di kawasan hutan telah menyumbang 40 persen deforestasi nasional. Data termutakhir menunjukkan Perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab telah mereduksi 82 persen tutupan pohon Indonesia tahun 2000-2021 diikuti dengan peningkatan luas panen kelapa sawit 65 persen serta peningkatan volume ekspor minyak sawit 83 persen.

Hasil analisis oleh *trade specialization index* (TSI) dan *Acceleration Ratio* (AR), menyatakan Indonesia sebagai salah satu pemroduksi dan pengeksport minyak sawit terbesar di pasar global. Pernyataan ini didukung dengan berat bersih komoditas ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 4.494.715.653 Kg atau sama dengan menghasilkan nilai keuntungan US\$ 3.941.836.767. Analisis lain oleh *Revealed Comparative Advantage* (RCA), *Export Product Dynamics* (EPD), dan *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) mengemukakan bahwa komoditas kelapa sawit, memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan kompetitif (daya saing) di pasar Uni Eropa (EU). Kondisi tersebut secara tidak langsung menuntut laju produksi sawit untuk tetap dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan. Dampak positif Perkebunan kelapa sawit turut mendorong pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui kemandirian pengelolaan perkebunan oleh petani. Disisi lain, pengelolaan Perkebunan yang tidak bertanggung jawab dikhawatirkan akan menyumbang angka deforestasi dan degradasi kawasan hutan yang lebih massif di Indonesia.

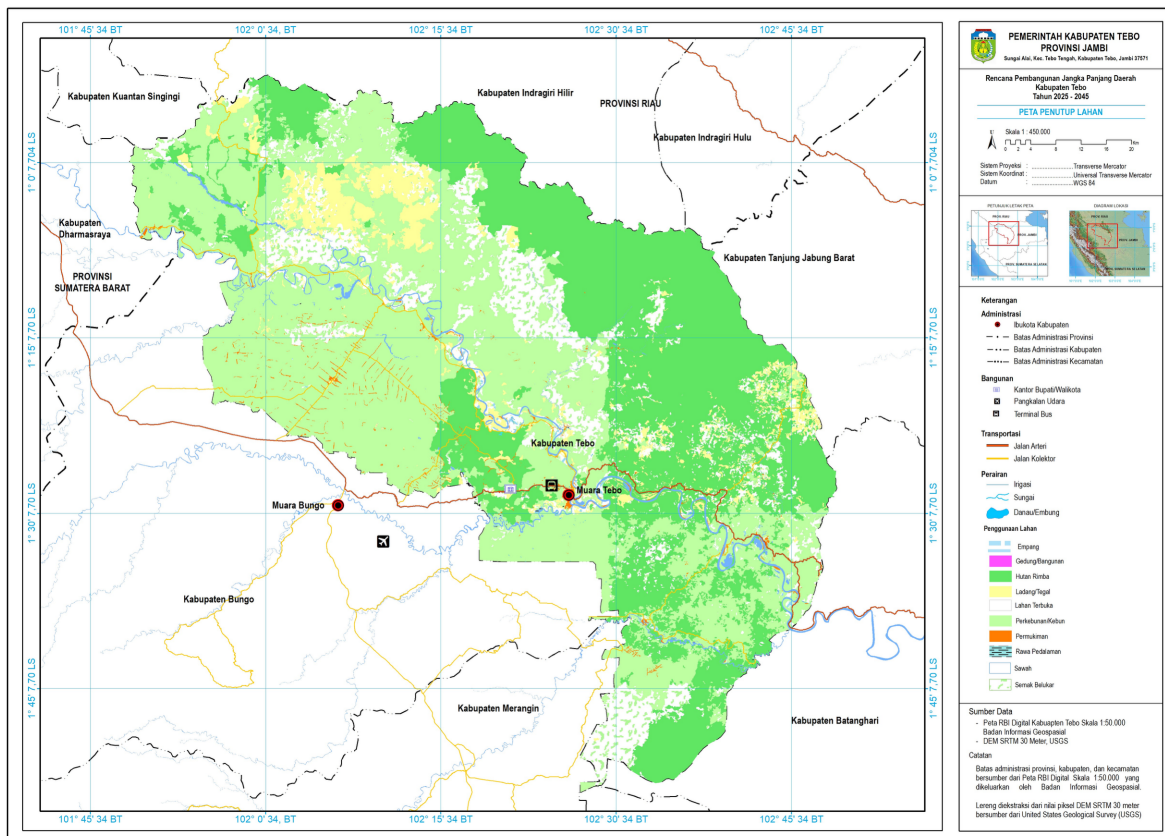
Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia memberlakukan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai upaya dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, layak sosial budaya, dan layak ekonomi. Sertifikasi ISPO menerapkan tujuh prinsip bagi perusahaan perkebunan diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggungjawab sosial dan ekonomi masyarakat, transparansi, dan peningkatan usaha dengan prinsip berkelanjutan.



Gambar 2. 11 Luasan tanam dan Produksi sawit Kabupaten Tebo

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2006-2023

Catatan data luas tanam dan produksi di Kabupaten Tebo menunjukkan adanya keterkaitan antara luas tanam dengan jumlah produksi sawit setiap tahunnya. Data tersebut menggambarkan tren peningkatan produksi dan luas tanam kelapa sawit di Kabupaten Tebo sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2023. Ditinjau dari tutupan lahan yang dimanfaatkan sebagai area perkebunan mencapai 44,3% dari luasan total Kabupaten Tebo. Adapun tutupan hutannya mencakup 35,96% dari luasan total Kabupaten Tebo.



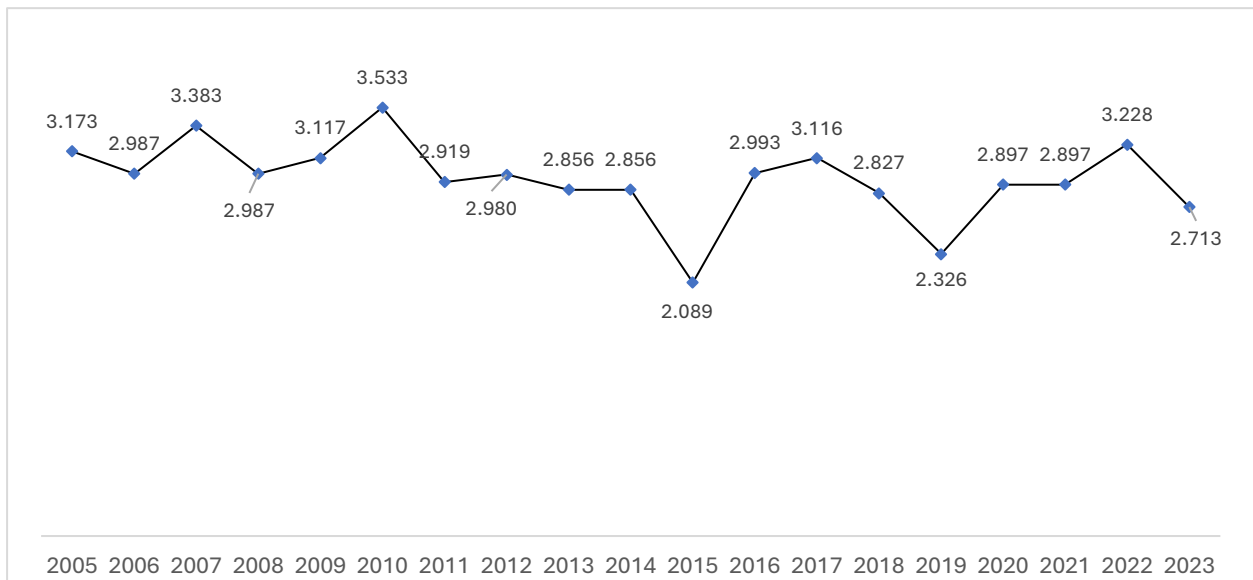
Gambar 2. 12 Penggunaan lahan di Kabupaten Tebo

Sumber: Olah Data, 2023

Permasalahan lingkungan hidup yang berpotensi ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan sawit adalah asap pabrik dan limbah. Berkembangnya kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Tebo secara langsung akan turut meningkatkan volume asap pabrik dan limbah. Untuk itu, pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi menjadi kunci dalam upaya pemajuan industri hijau melalui Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tebo. Pengawasan dan pengendalian alih fungsi dan kerusakan hutan secara tegas dan terstruktur diharapkan dapat diperkuat di Kabupate Tebo. Selain itu, pengukuran kualitas lingkungan dan penindakan secara tegas bagi perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan dari industri sawit perlu didukung dengan sinergi antar pemangku kebijakan. Lebih lanjut, pengelolaan Perkebunan terintegrasi dengan peternakan sapi, dan produksi pupuk berpotensi dapat memberikan keuntungan timbal balik antara ekosistem dengan perekonomian lokal Masyarakat. sawit yang berkelanjutan dan ekosistem yang lestari di Kabupaten Tebo dapat diwujudkan agar tetap dapat menjaga kualitas lingkungan.

d) Perubahan Iklim

Perubahan iklim terjadi akibat konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang telah melampaui ambang batas. GRK memantulkan kembali energi panas yang diradiasikan bumi, memicu peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Pergeseran salah satu variabilitas iklim memicu pergeseran variabilitas lainnya, seperti perubahan pola curah hujan musiman dan berubahnya tekanan udara global. Salah satu variabilitas iklim yang berperan penting adalah curah hujan, variabilitas yang dipengaruhi oleh arus massa udara global. Wilayah Kabupaten Tebo terutama dipengaruhi oleh arus *El-Nino Southern Oscillation (ENSO)*, Muson timur dan muson barat, dan arus *Indian ocean dipole (IOD)*.

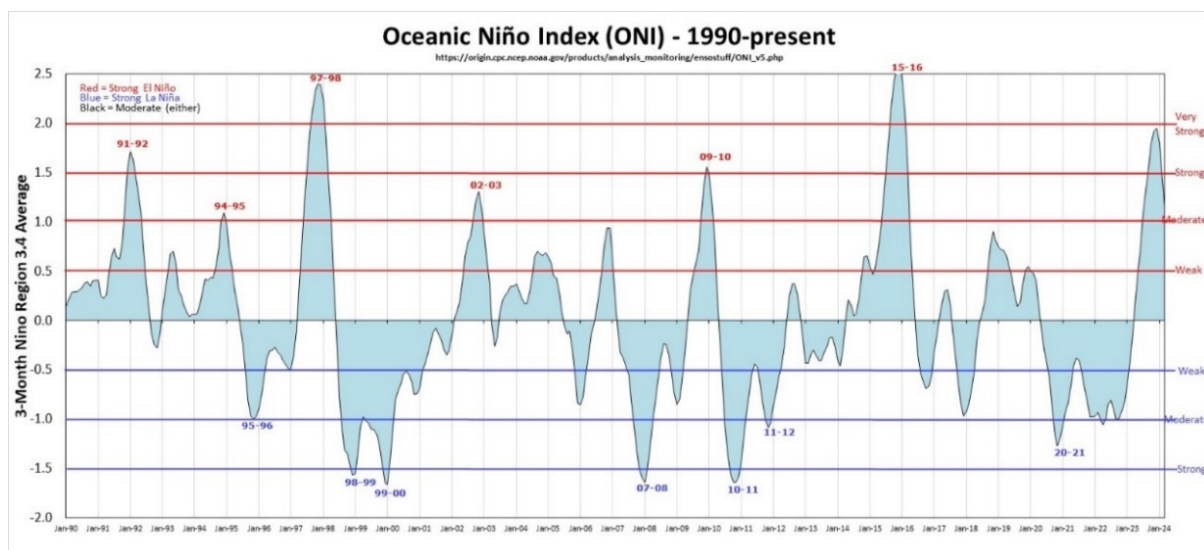


Gambar 2. 13. Tren Curah Hujan Kabupaten Tebo Tahun 2005 – 2023

Sumber: Olah Data, 2023

Fluktuasi curah hujan di Kabupaten Tebo umumnya antara 2500 sampai >3000 mm/tahun, namun terjadi penurunan sangat signifikan di tahun 2015 hingga 2.089 mm/tahun. Tren tersebut mengindikasikan adanya pengaruh iklim global yang mengubah siklus hidrologi daratan. Diketahui wilayah Indonesia di tahun 2015 mengalami fenomena El-Nino berintensitas sangat kuat, menimbulkan kekeringan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tebo. Kekeringan yang cukup ekstrem di Kabupaten Tebo tidak hanya menyulitkan masyarakat mengakses air bersih, namun juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan secara luas di Kabupaten Tebo. KPHP Unit IX Tebo Barat mencatat karhutla tahun 2015 merusak sekitar 17.335 hektar lahan, sementara pada KPHP Tebo unit X terjadi 3.521 hektar karhutla (Sinpasdok KPH, 2016).

Penurunan curah hujan kembali berulang pada tahun 2019 hingga mencapai 2.326 mm/tahun dari semula 2.827 mm/tahun di tahun 2018. Musim kemarau di tahun tersebut tidak dipengaruhi oleh El-Nino, melainkan peristiwa IOD Positif berintensitas 3,26 atau sangat kuat. Kekeringan cukup ekstrem dan panjang kembali dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tebo, imbas dari fenomena El-Nino berintensitas Kuat (indeks 1,9) dan IOD Positif Sangat Kuat (indeks 4,26) pada tahun 2023. Fenomena ini mengakibatkan 950 hektar lahan terbakar dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

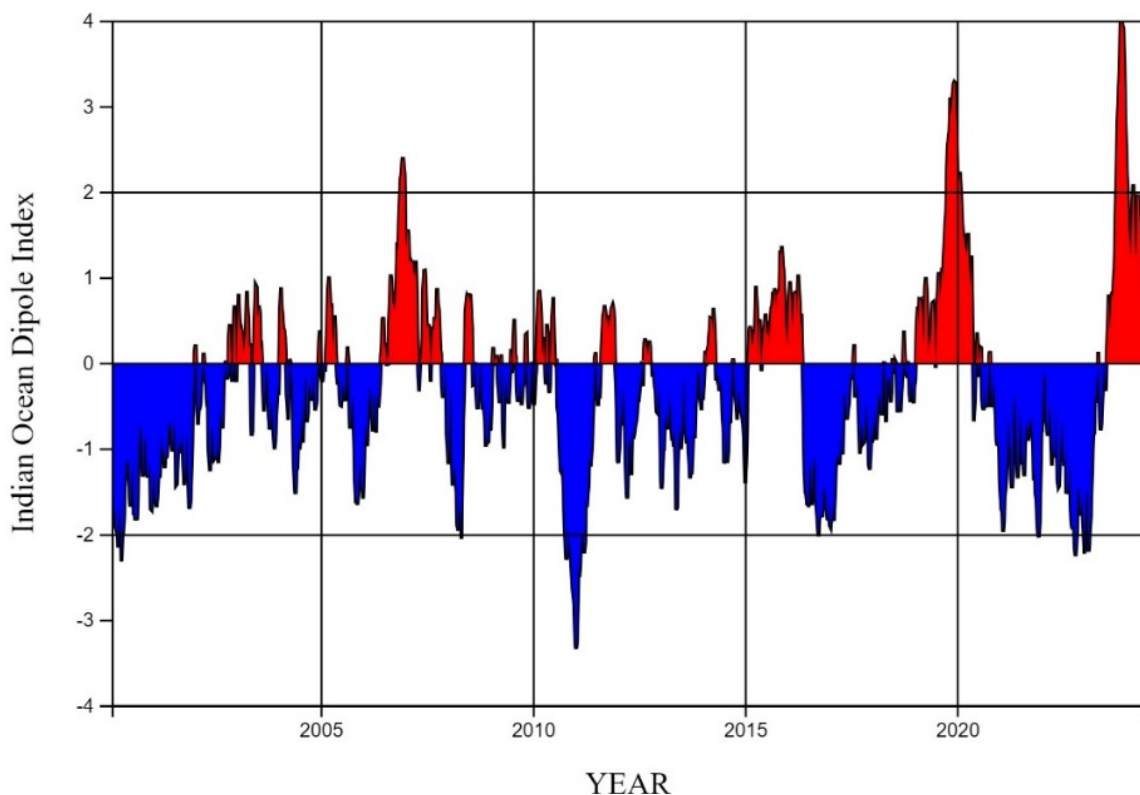


Gambar 2. 14 Histori Kejadian ENSO Tahun 1990 – 2023

Sumber: <https://ggweather.com/enso/oni.htm>

ENSO adalah anomali suhu permukaan laut Samudera Pasifik yang mengakibatkan perubahan variabilitas hujan di Indonesia setiap periode 7 tahun sekali. ENSO terdiri atas La-Nina yang menyebabkan intensitas curah hujan meningkat dan El-Nino yang menyebabkan turunnya intensitas curah hujan. Catatan data dari pantauan satelit NASA diterjemahkan dalam *Oceanic Niño Index (ONI)* menunjukkan peristiwa El-Nino sangat kuat terjadi pada tahun 1998 dan 2015, diantara periode tersebut juga terjadi peristiwa El Nino kuat di tahun 2010 dan El-Nino mendekati intensitas kuat di tahun 2003. El-Nino di tahun 2023 masih tergolong dalam intensitas kuat, meskipun demikian mendekati nilai sangat kuat. Sedangkan fenomena La-Nina dengan intensitas sangat kuat, dalam 25 tahun terakhir belum pernah terjadi. Peristiwa La-Nina kuat terjadi di tahun 1999, 2008, dan 2011. Umumnya, La-Nina akan

memicu curah hujan berintensitas sangat tinggi dalam beberapa bulan, hingga menyebabkan banjir pada sejumlah wilayah di Indonesia.



Gambar 2. 15 Tren Indeks *IOD* Tahun 2000 s/d 2023

Sumber: <https://sealevel.jpl.nasa.gov/overlay-iod/>

Indian Ocean Dipole (*IOD*) merupakan peristiwa anomali suhu permukaan Samudera Hindia, memicu pergeseran arus massa udara antara sisi timur dan sisi barat. *IOD* terbagi menjadi *IOD* positif yang menyebabkan kekeringan di Indonesia dan *IOD* negatif yang menyebabkan kekeringan di Indonesia. *IOD* positif dengan intensitas kuat terjadi pada 2006, kemudian *IOD* positif sangat kuat terjadi selama tahun 2019 (indeks 3,27) dan tahun 2023 (indeks 4,26) yang terjadi bersamaan dengan El-Niño Sangat Kuat. Intensitas *IOD* negatif terkuat tercatat pada indeks -3,34 pada tahun 2011. Secara kewilayahan, Pulau Sumatera dan Jawa akan merasakan dampak yang lebih kuat dari *IOD* karena asosianya dengan Samudera Hindia. Beberapa wilayah di kedua pulau tersebut akan mudah mengalami banjir dan musim kemarau yang berkepanjangan karena pengaruh peristiwa *IOD*.

Upaya mitigasi bencana struktural maupun non-struktural diperlukan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian terhadap kejadian bencana yang lebih besar di Kabupaten Tebo. Mitigasi struktural yang dapat diterapkan antara lain pembangunan

kolam retensi, normalisasi sungai, rehabilitasi kawasan serapan air, dan pengembalian fungsi DAS. Sedangkan mitigasi non-struktural ialah membangun ketahanan bencana dan perubahakn iklim dengan membudayakan karakter peduli lingkungan dan membangun pengetahuan bencana Masyarakat, serta menciptakan Masyarakat yang tanggap dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

2.1.1.5 Indeks Risiko Bencana

Kerawanan bencana alam diukur melalui indeks risiko bencana (IRB) yang dimuat dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Tebo disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 7. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

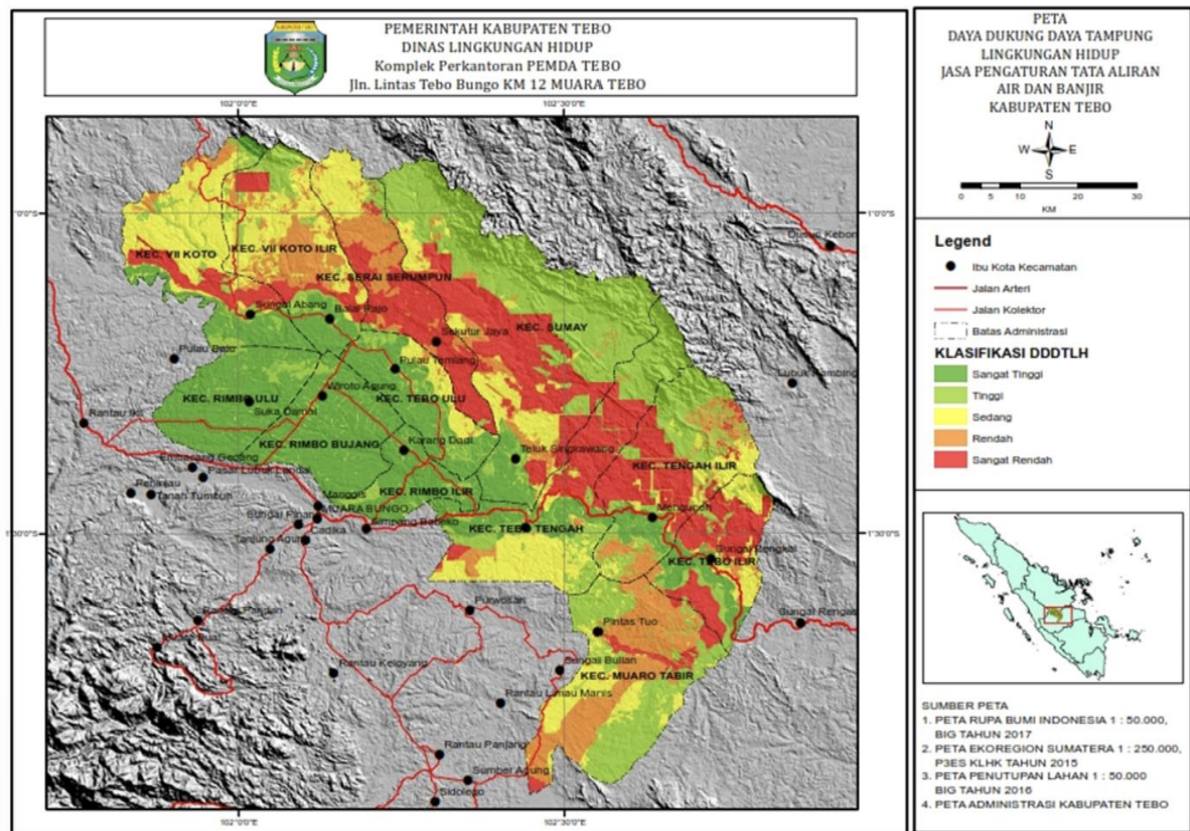
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRB	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2	131,2
Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia

Tingkat IRB di Kabupaten Tebo tergolong kategori sedang setiap tahunnya dengan nilai konsisten 131,2 poin. Kategori tersebut menandakan kapasitas Kabupaten Tebo dalam menangani kejadian bencana telah berjalan baik dan optimal. Disamping itu, tingkat risiko bencana banjir, gembabumi, karhutla, kekeringan, dan cuaca ekstrim di Kabupaten Tebo masih berpredikat tinggi. Tingginya IRB pada beberapa jenis bencana di Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh tingkat bahaya yang melekat, konsekuensi dari kondisi wilayahnya.

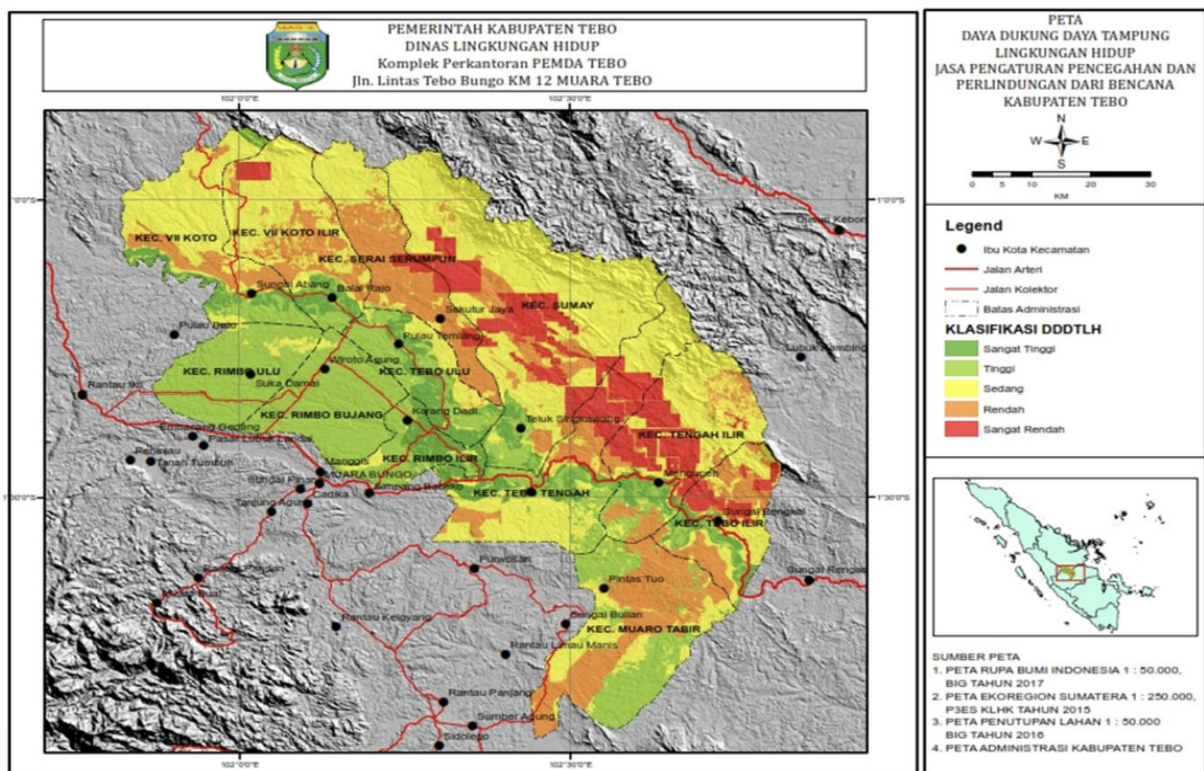
Kondisi lingkungan Kabupaten Tebo dalam merespon secara alami kejadian bencana direpresentasikan dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) jasa pengaturan tata aliran air dan banjir serta jasa pengaturan pencegahan bencana dan perlindungan dari bencana. Jasa pengaturan perlindungan bencana dengan kelas sangat tinggi dan tinggi mencakup rea 65,40 persen wilayah Kabupaten Tebo, mengindikasikan kemampuan komponen lingkungan yang sangat baik dalam mencegah terjadinya kejadian bencana. Jasa yang diberikan diantaranya seperti pengaturan tata aliran air dan menjaga stabilitas lereng. Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dengan kategori sangat tinggi dan tinggi meliputi area lebih luas yaitu

62,18 persen, menandakan kapasitas lingkungan hidup yang optimum dalam mengatur limpasan permukaan untuk mencegah bencana banjir.



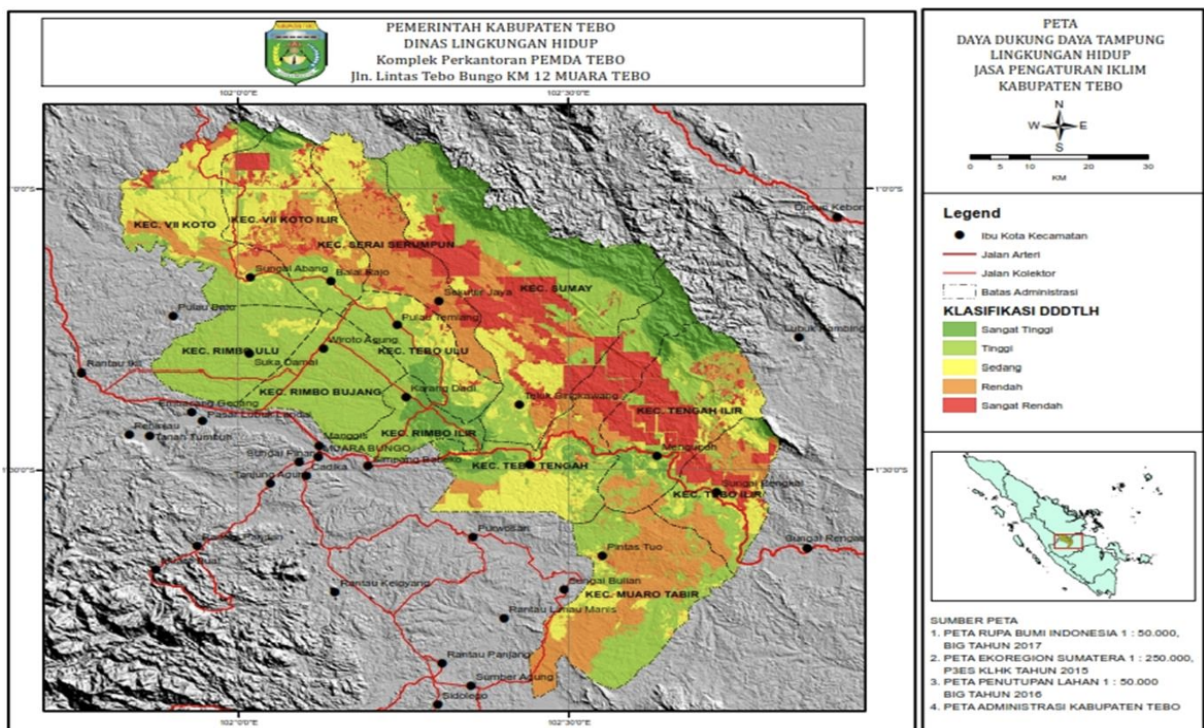
Gambar 2. 16 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tebo

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045



Gambar 2. 17 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Pencegahan Bencana dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tebo

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045



Gambar 2. 18 Peta DDDTLH Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tebo

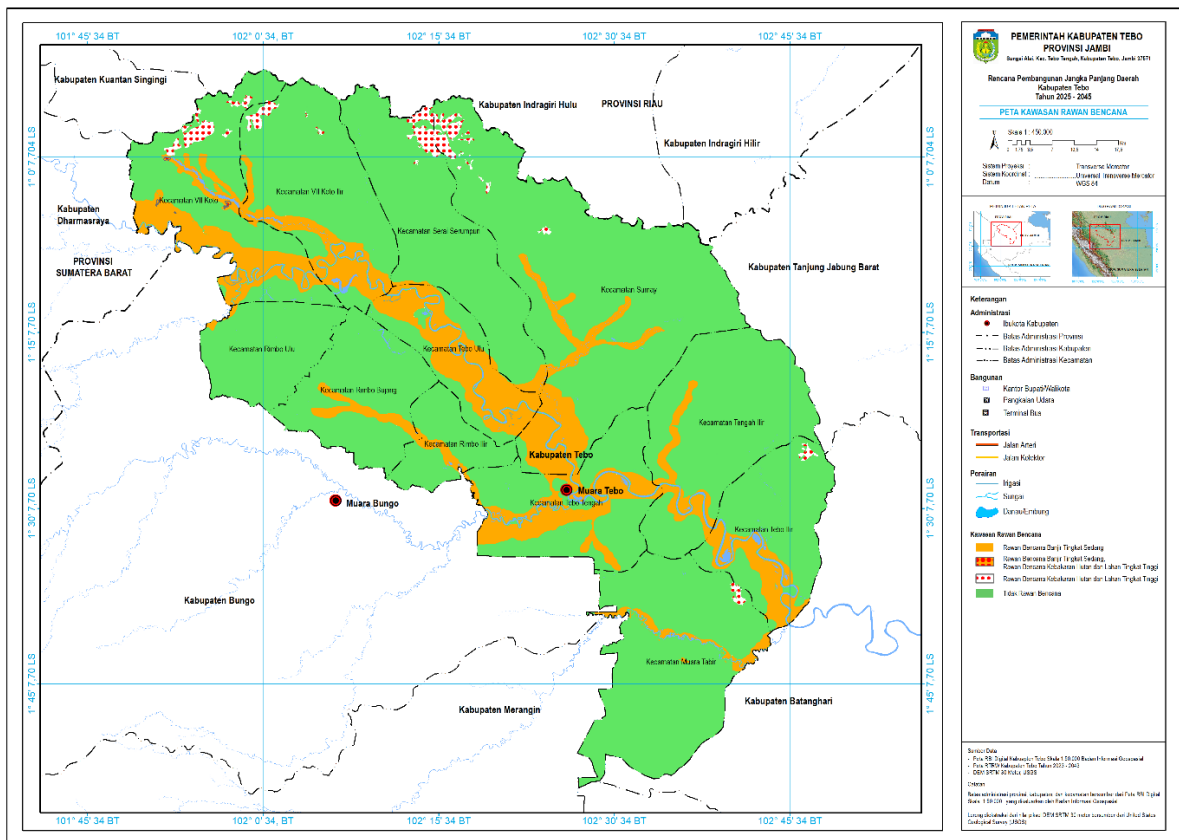
Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045

Ancaman bencana alam di Kabupaten Tebo akan semakin meningkat seiring meningkatnya krisis iklim global. Fenomena pendidihan global atau meningkatnya suhu permukaan bumi hampir menyentuh ambang batas kritikal akan berdampak pada bergesernya siklus udara global yang berpotensi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Indonesia termasuk Kabupaten Tebo. Kapasitas lingkungan hidup memberikan jasa pengaturan dalam memperlancar siklus iklim lokal seperti penyerap GRK, simpanan cadangan karbon, tata aliran air, dan mereduksi radiasi. Kapasitas DDDTLH menunjukkan bahwa jasa pengaturan iklim kategori sangat tinggi dan tinggi meliputi 48,12 persen dari luas wilayah, kemudian kapasitas sedang meliputi 33,50 persen wilayah. Dengan demikian, komponen lingkungan hidup di Kabupaten Tebo mampu menjaga dan melindungi dampak krisis iklim secara optimal.

Kapasitas daerah Kabupaten Tebo perlu untuk terus diperkuat, mengingat tingginya tingkat kerawanan dan risiko kejadian bencana alamnya. Penguatan kapasitas dapat diarahkan dengan penguatan kebijakan kebencanaan, membangun masyarakat sadar dan tanggap bencana, pemberlakuan sanksi tegas, membangun infrastruktur adaptif terhadap bencana seperti kolam retensi, dan mitigasi struktural seperti normalisasi sungai, rehabilitasi kawasan serapan air, dan pengembalian fungsi DAS.

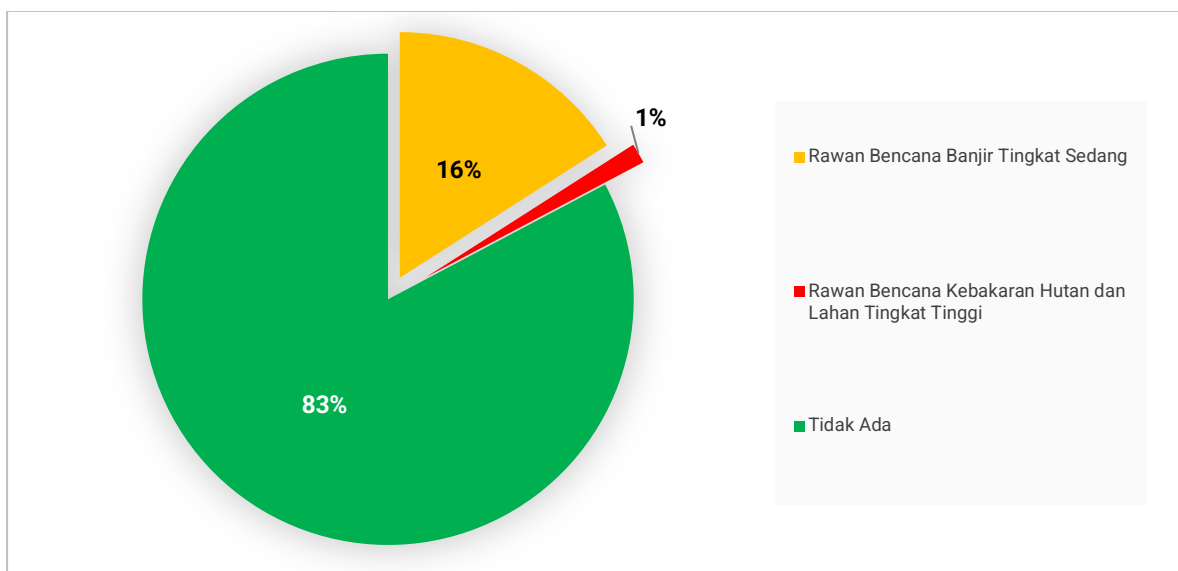
a) Risiko Bencana Alam

Peristiwa bencana alam disebabkan oleh proses geologis, geomorfologis, klimatologis, serta dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah seperti topografi, jenis tanah, dan penggunaan lahan. Penilaian tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Tebo disajikan pada visual peta di bawah ini.



Gambar 2. 19 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Alam Kabupaten Tebo

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2043



Gambar 2. 20 Proporsi Wilayah Terhadap Kerawanan Bencana Alam di Kabupaten Tebo

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2043

Tingkat kerawanan bencana yang dipetakan menunjukkan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana yang diwaspadai oleh Kabupaten Tebo karena frekuensinya cukup tinggi dibandingkan bahaya

bencana lainnya. Distribusi spasial kerawanan bencana banjir berasosiasi dengan jalur aliran sungai utama, seperti Sungai Batanghari dan Sungai Batang Tebo. Disamping itu, wilayah rawan banjir berada pada topografi dataran rendah pada kemiringan lereng kurang dari 8 derajat. Selain faktor geomorfologis, faktor klimatologis berupa curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun juga berpengaruh kuat terhadap frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Tebo. Histori kejadian banjir di Kabupaten Tebo menunjukkan sejumlah 80 desa mengalami kejadian banjir di tahun 2021 dan 46 desa di tahun 2020. Luapan aliran sungai umumnya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi di Kabupaten Tebo, sebagaimana kejadian banjir tahun 2023 yang melanda 9 kecamatan di Kabupaten Tebo saat musim hujan. Kejadian banjir berketinggian 50-centimeter sampai 4 meter mengakibatkan 11.631 KK terdampak.

Kejadian karhutla di Kabupaten Tebo tergolong rawan dengan potensi kerawanan tinggi berada wilayah perbukitan dengan tutupan utama hutan. Kejadian karhutla pada tahun 2023 menghanguskan 24,71 hektar lahan dan terdeteksi 550 titik api (*hot spot*). Karhutla yang melanda Kabupaten Tebo disebabkan oleh budaya membuka lahan dengan cara membakar. Titik api umumnya mudah muncul pada saat musim kering atau kemarau, Kabupaten Tebo mudah mengalami kekeringan karena terdampak kondisi iklim lokal maupun pengaruh *El-Nino* dan fenomena *Indian Ocean Dipole Positif*.

b) Risiko Bencana Sosial

Bencana sosial ditimbulkan oleh interkasi masyarakat yang mengarah pada kekerasan seperti konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Konflik sosial di Kabupaten Tebo yang sering terjadi adalah permasalahan konflik lahan antar masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan. Salah satu konflik lahan yang telah berlansung lama yaitu konflik lahan antara Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti yang berlangsung sejak 2007. Penyebabnya adalah lahan pertanian seluas 1.500 hektar di Desa Lubuk Mandarsah masuk ke dalam konsesi perusahaan. Selain itu, di tahun 2022 terdapat dua konflik di Kabupaten Tebo yaitu antara masyarakat di enam desa pada Kecamatan VII Koto dan terdapat 3 desa pada VII Koto Ilir mengalami konflik lahan dengan PT Tebo Multi Agro (TMA) dan PT Tebo Utama Cipta (THC). Dalam menanganinya, Pemerintah Kabupaten Tebo menghadirkan upaya mediasi untuk penyelesaian konflik tersebut, diantaranya

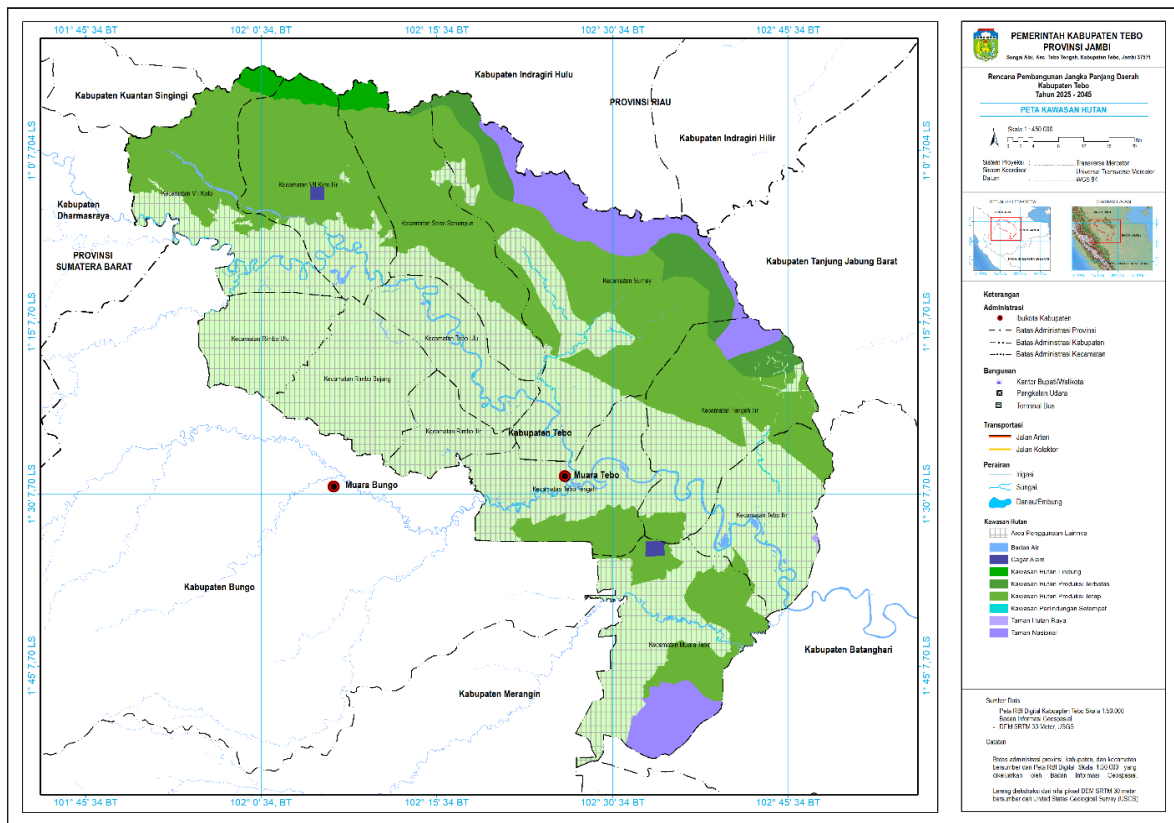
dengan menyepakati *corporate social responsibility* (CSR) akan dikelola melalui Forum CSR kabupaten.

Potensi konflik sosial di Kabupaten Tebo salah satunya disebabkan oleh masyarakat belum mengetahui batas konsesi lahan perusahaan. Upaya untuk mencegah konflik, salah satunya aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batas dan luas kawasan konsesi perusahaan. Disamping itu, pemerintah juga harus mengakomodir masukan dan saran masyarakat dalam menetapkan lahan konsesi baru demi menghindari potensi konflik kedepan.

2.1.1.6 Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung memainkan peran penting bagi keberlangsungan proses ekologis dalam menyediakan, mengatur, dan mendukung fungsi lingkungan. Keserasian antara pemanfaatan sumber daya alam dengan proses ekologis dapat ditentukan dari keseimbangan yang tercipta dalam kawasan lindung. Kawasan lindung dibatasi pemanfaatannya hanya untuk mendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Kawasan dengan fungsi lindung di Kabupaten Tebo yang terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2043 terdiri dari kawasan konservasi berupa cagar alam dan kawasan konservasi taman nasional dan taman hutan raya; badan air; kawasan perlindungan setempat; dan hutan lindung.



Gambar 2. 21 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tebo

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2043

Kabupaten Tebo memiliki tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi karena posisi wilayahnya menciptakan bioma hutan hujan tropis dataran rendah yang menyediakan fungsi penting seperti wilayah tangkapan air permukaan, stabilitas lereng, daur nutri, dan organik tanah dan habitat endemik satwa liar seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, dan Trenggiling.

Tabel 2. 8 Kawasan Hutan Kabupaten Tebo

Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Proporsi Luas (%)
Badan Air	5.894,19	0,96
Cagar Alam	1.173,04	0,19
Kawasan Hutan Lindung	8.320,48	1,36
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	20.074,11	3,28
Kawasan Hutan Produksi Tetap	222.974,36	36,48
Kawasan Perlindungan Setempat	4.158,85	0,68
Taman Hutan Raya	128,79	0,02
Taman Nasional	37.192,52	6,08
APL	311.264,74	50,93
Kabupaten Tebo	646.100	100

Sumber: RTRW Kabupaten Tebo 2023 - 2043

Kawasan lindung di Kabupaten Tebo meliputi 48,10 persen dari wilayah Kabupaten Tebo. Cakupan jenis kawasan terluas adalah kawasan hutan produksi tetap dengan bentangan 36,48 persen dari luas wilayahnya. Beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Tebo diantaranya adalah Cagar Alam Bulu Hitam di Kecamatan VII Koto Ilir, Cagar Alam Cempaka/Sungai Bengkal/Tabir Kejasung di Kecamatan Muara Tabir. Fungsi cagar alam antara lain untuk tempat penangkaran gajah sumatera. Kawasan konservasi lainnya adalah Taman Nasional (TN) Bukit Tiga Puluh yang berlokasi di Kecamatan Sumay dan Tengah Ilir dengan luas 25.729,52 hektar. Kemudian terdapat TN Bukit Dua Belas di Kecamatan Muara Tabir seluas 11.454,50 hektar. TN memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dan merupakan habitat terakhir bagi fauna terancam seperti harimau sumatera, gajah sumatera, dan badak sumatera.

b) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya diizinkan secara luas untuk dimanfaatkan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan bagi berlangsungnya aktivitas kawasan. Dalam tata batas kawasan hutan, kawasan budidaya dikenal sebagai area penggunaan lainnya (APL).

Tabel 2. 9 Jenis Penutup Lahan Kabupaten Tebo

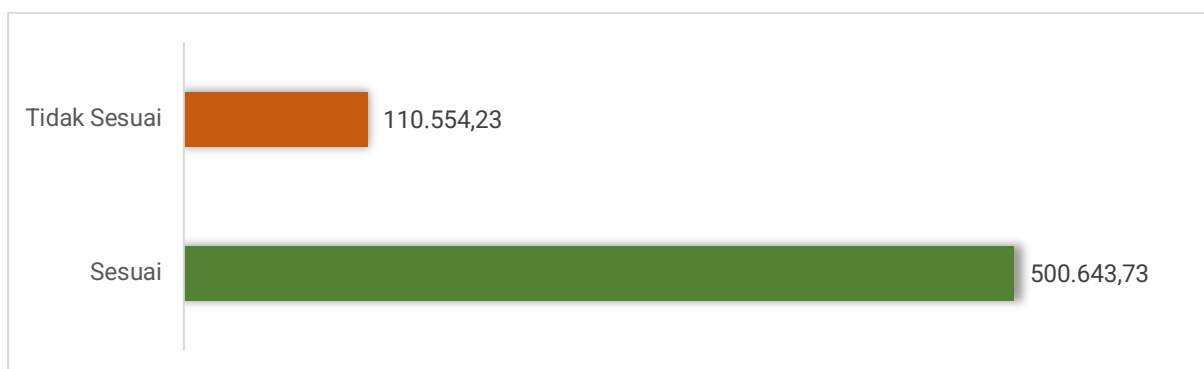
No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi Luas (%)
1	Danau/Waduk/Embung	71,77	0,01
2	Kolam Air Tawar	69,31	0,01
3	Permukiman	4.675,48	0,77
4	Lahan Terbangun Non Permukiman	45,56	0,01
5	Hutan	219.481,41	35,96
6	Ladang/Tegal	32.975,77	5,40
7	Perkebunan	270.395,08	44,30
8	Lahan Terbuka	584,36	0,10
9	Rawa Pedalaman	931,58	0,15
10	Sawah	2.832,90	0,46
11	Semak Belukar	72.255,50	11,84
12	Sungai	6.055,20	0,99
Kabupaten Tebo		646.100	100

Sumber: Olah Data, 2024

Penggunaan lahan di Kabupaten Tebo terpetakan ke dalam 12 kelas, proporsi jenis perkebunan memiliki cakupan terluas yaitu 44,30 persen. Penggunaan lahan selanjutnya yang meliputi area lebih luas adalah penggunaan lahan hutan dengan proporsi 35,96 persen. Penggunaan lahan yang dibudidayakan untuk pertanian tergolong sangat rendah luasannya yaitu hanya 0,46 persen, sedangkan ladang/tegalan hanya meliputi 5,40 persen. Pemanfaatan untuk lahan permukiman juga masih tergolong sangat rendah dengan proporsi 0,77 persen, artinya pemanfaatan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tebo belum mencakup wilayah yang luas.

c) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Arahan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam pola ruang daerah ditujukan untuk alokasi pemanfaatan ruang sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya, sebagai upaya mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara pembangunan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan ruang merupakan bentuk intervensi manusia dalam memperoleh sumber daya alam untuk kebutuhan hidup, namun pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan arahan yang ditetapkan sehingga mengarah pada terganggunya ekosistem hingga konflik sosial. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mengidentifikasi luas dan sebaran Lokasi indikatif penggunaan lahan yang menyalahi ketentuan dalam RTRW. Kesesuaian pemanfaatan ruang dianalisis dengan memanfaatkan data pola ruang yang termuat dalam RTRW dan data spasial penutup lahan mutakhir di Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 22 Luas Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan RTRW Kabupaten Tebo

Sumber: Analisis Data, 2024

Analisis tumpangtumpukan data geospasial (*overlay*) menunjukkan beberapa pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang termuat dalam pola ruang Kabupaten Tebo. Terdapat 110.554 hektar atau sekitar 18,08 persen area yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang daerah. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang teridentifikasi pada kawasan hutan dengan jenis pemanfaatan lahan berupa permukiman, sawah, ladang/tegalan, perkebunan/kebun, dan gedung/bangunan.

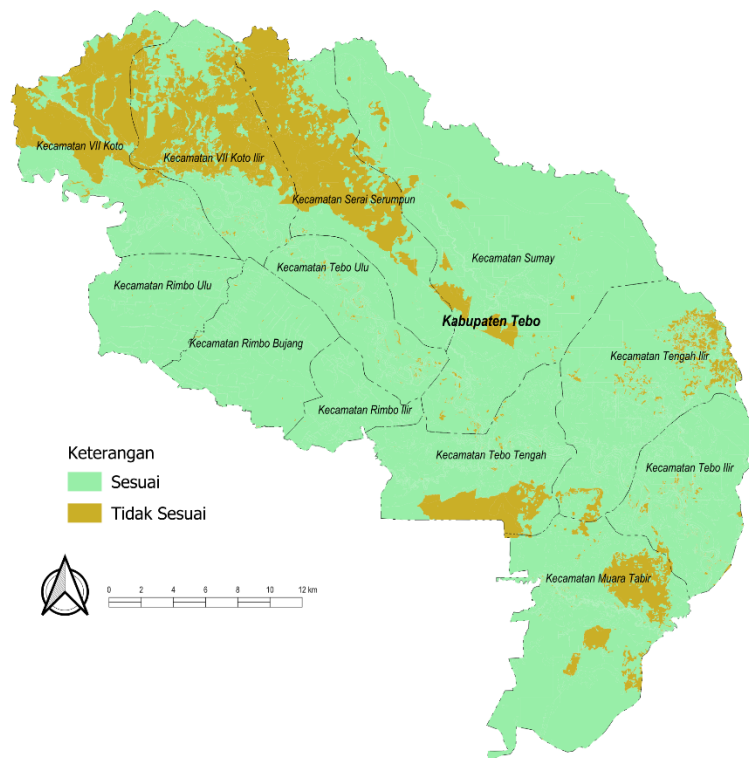
Tabel 2. 10 Pemanfaatan Lahan yang Tidak Sesuai dengan Pola Ruang RTRW

Pola Ruang (Ha)	Penggunaan Lahan (Ha)					Total (Ha)
	Gedung/Bangunan	Permukiman	Sawah	Ladang/Tegalan	Perkebunan/Kebun	
Taman Nasional	0.00	0.00	0.00	2.35	38.02	40.37
Taman Hutan Raya	0.00	0.00	0.00	5.40	45.74	51.14
Kawasan Tanaman Pangan	0.01	5.11	0.00	0.00	1,486.02	1,491.15
Kawasan Perkebunan	5.85	232.60	364.13	0.00	0.00	602.59
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.29	21.26	4.62	21,510.93	81,791.27	103,329.37
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	0.00	2.08	0.00	1,227.28	404.17	1,633.52
Kawasan Hutan Lindung	0.00	3.07	0.00	1.69	3,049.99	3,054.76
Cagar Alam	0.00	0.00	0.00	257.45	93.89	351.34
Total (Ha)	7.15	264.12	368.75	23,005.09	86,909.11	110,554.23

Sumber: Analisis Data, 2024

Luas total area yang pemanfaatannya diluar peruntukan pola ruang mencakup 110.554,23 hektar. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap menunjukkan indikasi penyalahgunaan peruntukan ruang terluas di Kabupaten Tebo. Area dengan pemanfaatan selain hutan produksi mencakup 103.329,37 hektar atau sekitar 93,46 persen dari total luas kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Penggunaan lahan Perkebunan/Kebun yang terindikasi dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi 81.791 hektar atau sekitar 73,98 persen dari total area yang pemanfaatan lahannya tidak sesuai. Pemanfaatan perkebunan pada Kawasan Hutan setidaknya mencakup 78,61 persen dari total keseluruhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai arahan pola ruang. Permukiman masyarakat juga diindikasikan berada pada kawasan hutan seluas 26,41 hektar yang tersebar pada kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan lindung. Sebaran area dengan pemanfaatan lahan tidak sesuai terhadap pola ruang ditemukan pada

Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tengah Ilir dan Kecamatan Muara Tabir.



Gambar 2. 23 Peta Sebaran Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan RTRW Kabupaten Tebo

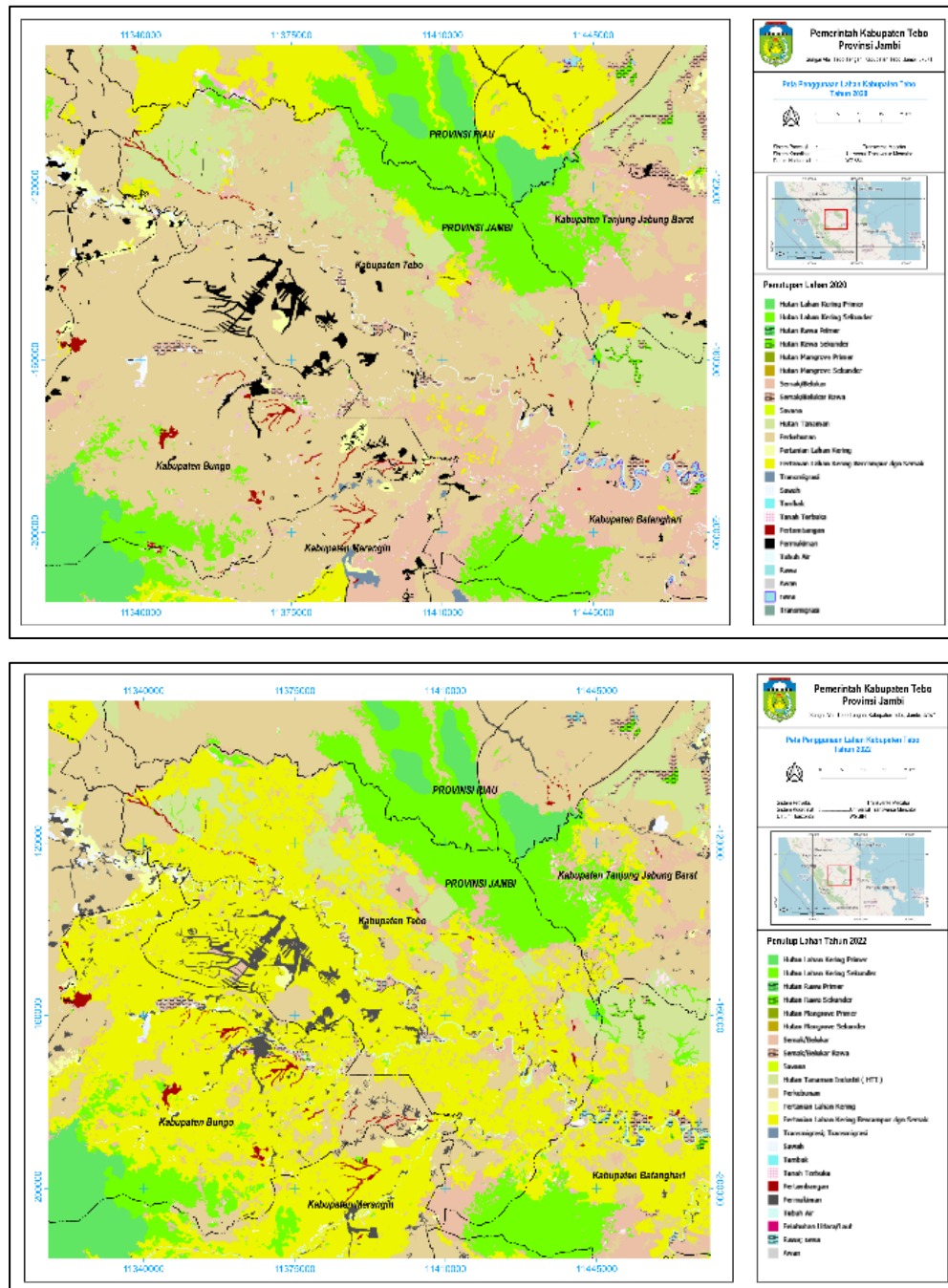
Sumber: Analisis Data, 2024

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masih marak pemanfaatan lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Tebo. Disamping memberikan ekonomi bagi masyarakat, lahan yang dimanfaatkan bersifat ilegal tanpa batas bidang tanah yang jelas sehingga rentan menjurus pada konflik lahan. Penggunaan sumber daya lahan yang tidak terkontrol juga meningkatkan kerentanan terhadap menurunnya fungsi lingkungan hidup terutama pada fungsi lindung di kawasan hutan. Hasil analisis merupakan evaluasi awal dan memerlukan validasi lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan, mengingat perubahan penggunaan lahan melaju dengan cepat.

2.1.1.7 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan pergeseran pemanfaatan lahan dalam kurun waktu tertentu, umumnya perubahan fungsi ini menjadi indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Pemantauan alih fungsi lahan penting untuk

diketahui sebagai upaya preventif dalam manajemen tata landscape yang bertanggung jawab. Identifikasi perubahan penutup lahan maupun alih fungsi lahan di Kabupaten Tebo menggunakan data geospasial yang bersumber dari geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memanfaatkan citra satelit penginderaan jauh untuk mencapai Lokasi yang lebih spesifik.



Gambar 2. 24 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tebo Tahun 2020 (atas) dan Tahun 2022 (bawah)

Sumber: KLHK, 2023

Peta penggunaan lahan dengan dua periode berbeda menunjukkan adanya pergeseran fungsi lahan menjadi perkebunan. Selain itu, terdapat pula pembukaan lahan yang diindikasikan sebagai kegiatan pertambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai.



a)

b)

Gambar 2. 25 Perbandingan Penutup Lahan Tahun 2019 (a) dan Tahun 2023 (b)

Sumber: Dataset Citra Google Earth

Identifikasi dengan memanfaatkan citra satelit, menyorot lokasi lebih spesifik, ditemukan pembukaan lahan cukup luas pada sepanjang aliran Sungai. Berdasarkan interpretasi visual menggunakan teknik kunci interpretasi citra, ditemukan objek tersebut merupakan hasil dari aktivitas pertambangan yang berlokasi pada Kawasan Hutan. Pembukaan lahan yang tidak teratur teridentifikasi dari hamparan pasir berwarna putih terang dengan diselingi genangan air berbentuk tidak beraturan dan berpola menyebar sepanjang aliran Sungai. Perbedaan yang begitu kontras antara penutup lahan tahun 2019 dengan 2023 telah mempengaruhi kualitas lingkungan, tidak hanya kualitas air yang menurun akibat sedimentasi dan cemaran merkuri, namun juga mengurangi tutupan vegetasi cukup luas.



a)

b)

Gambar 2. 26 Perbandingan Penutup Lahan Tahun 2013 (a) dan Tahun 2023 (b)

Sumber: Dataset Citra Google Earth

Perubahan tutupan lahan yang umum ditemukan di Kabupaten Tebo adalah perubahan tutupan Perkebunan atau tegalan/ladang menjadi lahan terbuka ataupun sebaliknya karena rotasi tanam. Perbandingan tutupan lahan pada tahun 2013 dan tahun 2023 menunjukkan adanya pengurangan tutupan vegetasi tegakan menjadi Perkebunan sawit. Perubahan penggunaan lahan tersebut berlokasi dekat dengan Kawasan Hutan. Ekstensifikasi yang terus berlanjut dikhawatirkan akan merambah pada Kawasan hutan dan menurunkan fungsi ekologi hutan. Berkaca pada kondisi tersebut, penguatan dalam penegakan hukum dan pengawasan penataan ruang sangat diperlukan di Kabupaten Tebo.

2.1.1.8 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mencerminkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, diwakilkan dari ketersediaan yang cukup baik dari jumlah dan mutu serta terjangkau dengan akses merata. Ketersediaan yang cukup terkadang tidak diimbangi dengan mutu dan gizi pangan ataupun dukungan kemudahan akses terhadap sumber pangan yang masih kurang. Tersedianya informasi yang menyajikan ukuran ketahanan pangan daerah secara akurat dan komprehensif diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan status gizi di suatu daerah. Indeks ketahanan pangan (IKP) menyajikan data tingkat ketahanan pangan pada level Kabupaten dengan melibatkan indikator ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Berikut ini merupakan IKP

Kabupaten Tebo pada tahun 2019 sampai tahun 2023 yang diperoleh dari Badan Pangan Nasional.

Tabel 2. 11 Indeks ketahanan pangan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan	NA	NA	70,51	51,39	66,9	55,01	50,48
Keterjangkauan	NA	NA	85,78	86,04	85,46	88,07	86,61
Pemanfaatan	NA	NA	65,75	67,74	67,55	68,99	74,41
IKP	NA	79,19	73,19	68,33	72,37	70,52	70,89

Sumber: Badan Pangan Nasional

Tren ketahanan pangan Kabupaten Tebo berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Capaian IKP tertinggi terjadi pada tahun 2019, kemudian menurun cukup jauh dengan 4,86 poin di tahun 2020. Ketahanan pangan kembali membaik di tahun 2021 seiring dengan capaian IKP yang kembali melonjak 4,4 poin. Meskipun kemudian terjun 2,21 poin di tahun 2022, perbaikan terhadap pemanfaatan pangan berhasil meningkatkan 0,37 poin capaian IKP di tahun 2023. Meskipun demikian, tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Tebo berhasil mempertahankan kategori Tahan selama lima tahun terakhir.

Secara umum, ketersediaan pangan di Kabupaten Tebo menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan penurunan tingkat ketersediaan. Penurunan tingkat ketersediaan pangan cukup signifikan pada tahun 2020 dengan beda minus 19,12 poin. Secara perlahan, perbaikan ketersediaan pangan berhasil meningkatkan 15,51 poin capaian di tahun 2021, kemudian berkurang cukup jauh 11,89 poin di tahun 2022 dan terus menurun hingga mencapai nilai 50,48 yang merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir di tahun 2023. Artinya tingkat distribusi, stabilisasi pasokan dan harga, manajemen stok, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Tebo terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan pola konsumsi, perbaikan gizi, dan penganekaragaman konsumsi pangan terus melonjak menuju stabilisasi pemanfaatan pangan oleh masyarakat.

2.1.1.9 Indeks Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan suatu kondisi kebutuhan energi tercukupi secara aman, terjangkau, dan merata. Ketahanan energi dapat tercipta jika suatu daerah dapat menyeimbangkan ketersediaan, penerimaan masyarakat, keterjangkauan, dan

jaminan akses dari sumber energi. Energi listrik menjadi sektor energi yang harus dijamin pemerataan dan aksesnya, karena perannya yang vital terhadap kebutuhan rumah tangga dan industri.

Tabel 2. 12 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2023

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tebo Ilir	N/A	N/A	1.331	1.561	1.761	2.330	2.659
Muara Tabir	N/A	N/A	1.014	1.117	1.199	1.309	1.367
Tebo Tengah	N/A	N/A	3.185	3.322	3.583	3.898	4.078
Sumay	N/A	N/A	386	404	433	461	478
Tengah Ilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rimbo Bujang	N/A	N/A	3.159	3.711	4.343	4.794	5.115
Rimbo Ulu	N/A	N/A	305	289	333	336	391
Rimbo Ilir	N/A	N/A	514	445	535	673	702
Tebo Ulu	N/A	N/A	1.093	1.140	1.348	1.603	1.790
VII Koto	N/A	N/A	556	1.058	1.408	1.521	1.490
Serai Serumpun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VII Koto Ilir	N/A	N/A	338	344	379	399	517
Kabupaten Tebo	N/A	N/A	11.931	13.391	15.322	17.324	18.587

Sumber: Kabupaten Tebo Dalam Angka, 2024

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Penambahan jumlah pelanggan listrik di tahun 2021 mencapai 14,42 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sedangkan di tahun 2023 penambahan jumlah pelanggan listrik mencapai 7,29 persen. Jumlah pelanggan listrik lebih banyak terdapat di Kecamatan Rimbo Bujang dan Tebo Tengah sebagai ibukota kabupaten dan pusat ekonomi daerah. Peningkatan jumlah pelanggan di Kecamatan VII Koto mencapai 90,29 persen pada tahun 2020, sebuah persentase yang cukup signifikan dalam pemerataan energi listrik. Sementara itu, Kecamatan VII Koto Ilir, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, dan Sumay merupakan daerah dengan jumlah pelanggan lebih sedikit, kurang dari 1000 pelanggan dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, setiap kecamatan telah menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan listrik.

2.1.1.10 Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air merupakan suatu kondisi ketersediaan dan keterjangkauan air yang mencukupi bagi kebutuhan domestik, pengelolaan lahan, dan kegiatan industri. Ketersediaan air bergantung pada sistem hidrologis suatu wilayah, berdasarkan jasa lingkungan penyediaan air di Kabupaten Tebo berada dalam kondisi surplus. Artinya

penyediaan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Suplai air baku oleh sumber permukaan dapat diidentifikasi lebih jauh melalui sistem daerah aliran sungai (DAS) sebagai batas imbuhan, akumulasi, dan distribusi air menurut tata hidrologis. Wilayah Kabupaten Tebo termasuk dalam empat DAS yaitu DAS Batanghari hulu, DAS Batanghari hilir, DAS Batang Tebo, dan DAS Batang Tabir.

Tabel 2. 13. DAS yang Melewati Wilayah Kabupaten Tebo

DAS	Luas (Ha)	Cakupan Kabupaten
Batanghari Hulu	1.277.947	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tebo • Kabupaten Bungo • Kabupaten Kerinci • Kabupaten Solok • Kabupaten Soloh Selatan • Kabupaten Sawahlunto • Kabupaten Sijunjung • Kabupaten Dharmasraya
Batang Tebo	538.725	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tebo • Kabupaten Bungo • Kabupaten Kerinci
Batang Tabir	381.329	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tebo • Kabupaten Merangin • Kabupaten Batanghari • Kabupaten Kerinci • Kabupaten Sarolangun
Batanghari Hilir	979.559	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tebo • Kota Jambi • Kabupaten Tanjung Jabung Timur • Kabupaten Muaro Jambi • Kabupaten Batanghari

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo Dalam Angka 2023

DAS Batanghari Hilir merupakan wilayah DAS dengan cakupan sangat luas, didukung dengan debit air rata-rata mencapai 2.140,7 m³/detik. Debit DAS Batanghari berfluktuasi setiap bulannya, dipengaruhi oleh intensitas curah hujan juga pengelolaan lahan. Debit puncak mencapai 4,712 m³/detik dan umumnya terjadi pada bulan-bulan basah dari bulan november hingga april. Curah hujan di DAS Batanghari tergolong tinggi dengan rata-rata tahunan 2.500 mm/tahun. Curah hujan akan menurun pada

bulan-bulan kering seperti bulan juni hingga oktober, menyebabkan debit DAS menurun drastis, memicu kekeringan dan kesulitan akses air bersih pada beberapa daerah di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 14 Debit Rata-rata Bulanan Sub DAS Wilayah Kabupaten Tebo

Bulan	Debit Rata-rata Bulanan (m ³ /detik)			
	Batanghari Hulu	Batang Tebo	Batang Tabir	Batanghari Hilir
Januari	453	218.14	77.88	4,712
Februari	298.1	178.14	63.92	4,027
Maret	388.89	166.75	87.01	3,389
April	451.8	123.13	92.59	3,670
Mei	357.45	109.63	78.82	3,495
Juni	242.82	70.11	52.75	1,620
Juli	195.55	56.72	35.71	1,071
Agustus	159.91	51.21	35.54	713
September	186.33	57.12	53.03	741
Oktober	230.33	65.83	56.89	1,026
November	398.4	160.44	87.73	2,291
Desember	426.3	193.88	80.79	3,076

Sumber: Sunu Tino, 2000

Debit air rata-rata pada DAS Batanghari hulu, Batang Tebo, dan Batang Tabir jauh lebih rendah dibandingkan DAS Batanghari hilir. Namun demikian, debit puncak DAS Batang Tebo dapat mencapai 1.664,57 m³/detik. Pola fluktuasi umumnya linier untuk semua DAS, karena pengaruh intensitas curah hujan yang cukup signifikan terpengaruh fenomena dinamika iklim seperti ENSO dan Indian Ocean Dipole.

Tabel 2. 15. Luas Danau/Waduk/Situ/Embung Kabupaten Tebo

No	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Danau Sigombak	45	1.230.499,56
2	Danau Tanduk	5	N/A
3	Waduk Cermin Alam	5	N/A
Total		55	1.230.499,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, 2019

Potensi sumber air baku lainnya tersimpan sebagai akumulasi limpasan permukaan danau dan waduk. Danau Sigombak adalah danau terluas di Kabupaten Tebo dengan cakupan 45 hektar mampu menampung volume air hingga 1 juta meter³ setiap tahunnya. Sementara Danau Tanduk mencakup area lebih kecil yaitu seluas 5 hektar. Disamping danau alami, Kabupaten Tebo memiliki waduk yang berlokasi di Kecamatan VII Koto Ilir yaitu Waduk Cermin Alam dengan luas genangan air seluas 5 hektar.

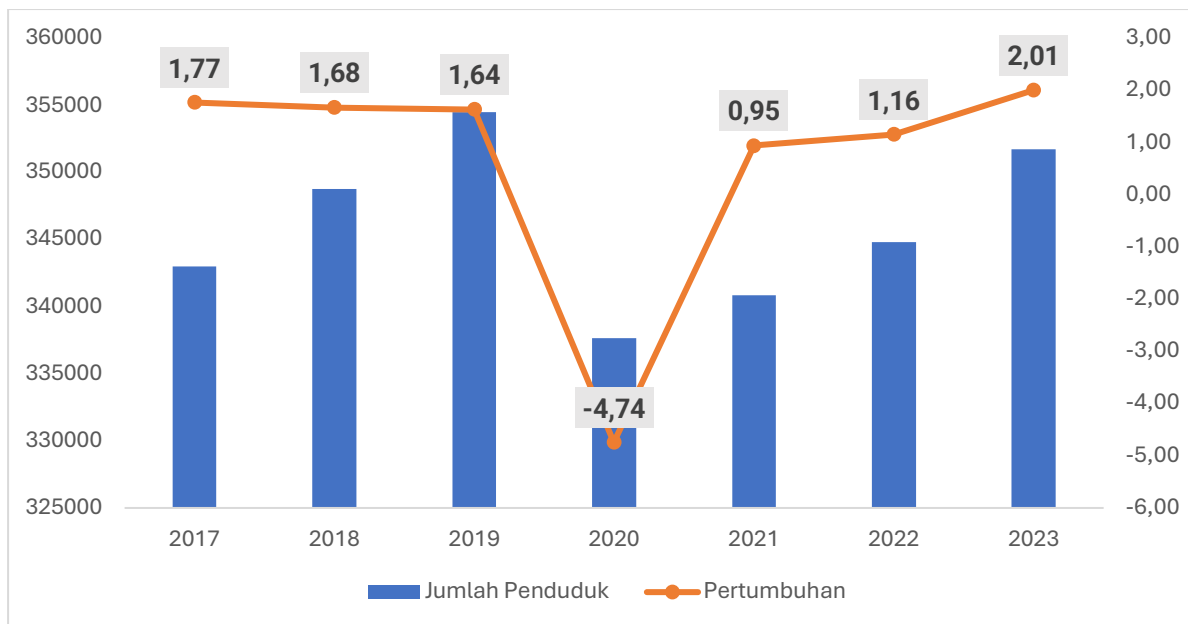
Input air didasarkan pada curah hujan tahunan, Kabupaten Tebo memiliki kapasitas penyediaan air sangat besar. Curah hujan tahunan mencapai 3.000 – 3.500 mm/tahun, artinya dominasi iklim basah meliputi wilayah Kabupaten Tebo. Sebagai wilayah dengan karakteristik bentangalam fluvial, imbuhan air sub-permukaan Kabupaten Tebo berpotensi menyediakan air permukaan dalam jumlah yang besar. Manajemen pengelolaan hidrologi permukaan penting untuk menstabilkan suplai air sebagai bentuk preventif dalam menghadapi anomali iklim ekstrem seperti El-Nino dan IOD negatif.

2.1.2. Demografi

Aspek demografi di Kabupaten Tebo bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Tebo. Demografi di Kabupaten Tebo mencakup data terkait jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Data eksisting terkait demografi akan menjadi dasar pada proyeksi kependudukan selama lima tahun kedepan di Kabupaten Tebo.

2.1.2.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Tebo bersifat dinamis karena dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Tebo. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo mencatat bahwa terdapat penduduk sebanyak 351.743 jiwa yang pada tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 179.918 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dan 171.825 penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan terutama semenjak tahun 2020 yang juga ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo pada tahun 2025-2029.



Gambar 2. 27 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

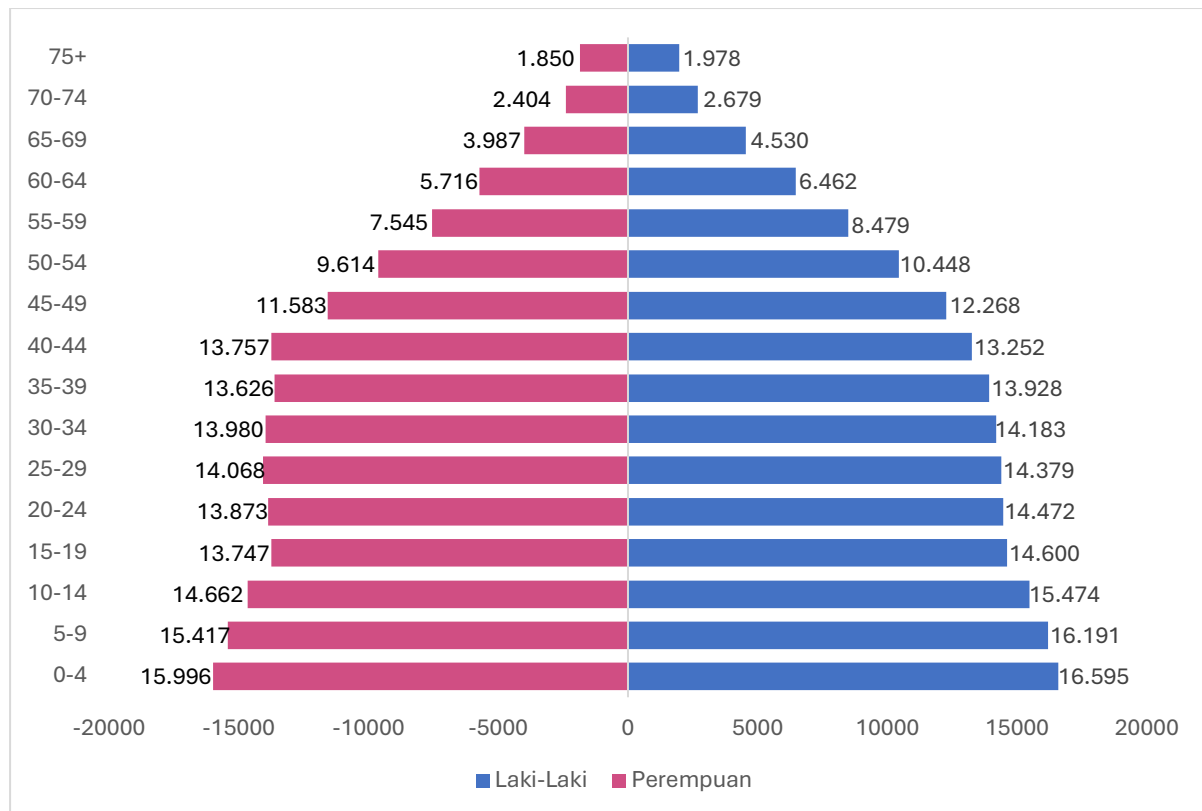
Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2018-2024

Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo pada tahun 2017 hingga 2023. Penurunan jumlah penduduk tampak pada tahun 2020 yakni akibat pembaharuan data kependudukan melalui sensus penduduk per sepuluh tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2020 tampak berkurang sebesar 16.816 jiwa dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk mencapai 6,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena data yang digunakan pada tahun 2019 merupakan data hasil proyeksi dengan data dasar sensus penduduk 2010. Penurunan data jumlah penduduk di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara riil lebih kecil dibandingkan yang diprediksikan pada tahun 2010. Selain itu, pandemi Covid-19 juga berkontribusi akan penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Tebo akibat peningkatan angka mortalitas di masyarakat. Meskipun begitu, data pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan kembali terkait jumlah penduduk di Kabupaten Tebo hingga hampir mendekati jumlah penduduk pada tahun 2019.

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk memiliki pengertian sebagai pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Pengelompokan dapat berdasar pada kondisi geografis, biologis, sosial, atau

ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dilihat melalui kelompok usia dan jenis kelamin dan mengindikasikan beberapa hal, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan non produktif, bonus demografi, dan angka ketergantungan. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan beberapa kebijakan suatu daerah. Komposisi penduduk di Kabupaten Tebo berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tahun 2023 dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 2. 28 Bentuk Piramida Penduduk Kabupaten Tebo Tahun 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2024

Komposisi penduduk di Kabupaten Tebo yang memiliki bentuk piramida dengan kategori stasioner menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo relatif stabil pada tahun 2023. Piramida juga menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tebo didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni yang berkisar usia 15-64 tahun. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari kelompok usia produktif sebesar di Kabupaten Tebo sebesar 68,23 persen dan non produktif sebanyak 31,77 persen. Kelompok usia produktif tersusun atas 51,40 persen penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 48,60 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk usia non produktif di Kabupaten Tebo didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang

mencapai 26,82 persen, sedangkan kelompok usia non produktif lansia hanya 4,95 persen. Piramida penduduk yang demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo sedang dalam fase bonus demografi atau kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang kelompok non-produktif. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kabupaten Tebo, namun bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kabupaten Tebo kedepannya.

2.1.2.3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Tebo dapat dilihat melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Perbandingan jumlah penduduk dapat dilihat melalui data *sex ratio* yang menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. *Sex Ratio* dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Tebo berdasarkan *Sex Ratio* dengan data awal tahun 2017 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2017	176.800	166.203	343.003	106,38
2018	179.709	169.051	348.760	106,30
2019	182.614	171.871	354.485	106,25
2020	173.708	163.961	337.669	105,94
2021	175.208	165.660	340.868	105,76
2022	177.090	167.726	344.816	105,58
2023	179.918	170.843	350.761	105,31

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2019-2024

Angka *sex ratio* di Kabupaten Tebo secara kontinyu mengalami penurunan pada rentang tahun 2017 hingga 2023. Penurunan angka *sex ratio* tertinggi terjadi pada tahun 2020, yakni selisih 0,31 poin dibandingkan data *sex ratio* pada tahun sebelumnya. Semakin rendah angka *sex ratio* di suatu wilayah, maka semakin sedikit pula jumlah laki-laki pada wilayah tersebut. Penurunan angka *sex ratio* yang semakin mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk

berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tebo. Penurunan angka *sex ratio* yang cukup tinggi memiliki tiga makna, yakni terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kabupaten Tebo, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah.

2.1.2.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Hasil dari perhitungan indikator tersebut adalah gambaran bentuk penyebaran dan merata tidaknya penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Tebo pada rentang tahun 2017 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tebo Ilir	708,7	13978,2	17,50	27567	38,90	27862	39,31	28314	39,95	28525	40,25	28796	40,63	23361	32,963
2	Muara Tabir	509,3	9049,867	17,77	18526	36,38	18834	36,98	17128	33,63	17237	33,84	17381	34,13	17,606	0,035
3	Tebo Tengah	983,56	21355,8	21,71	42698	43,41	43652	44,38	40161	40,83	40609	41,29	41145	41,83	42039	42,742
4	Sumay	1268	9916,194	7,82	19806	15,62	20071	15,83	21398	16,88	21773	17,17	22200	17,51	22659	17,870
5	Tengah Ilir	221,44	13616,6	61,49	27403	123,75	28071	126,77	25968	117,27	26658	120,38	27422	123,83	28347	128,012
6	Rimbo Bujang	406,92	35227,18	86,57	67577	166,07	68277	167,79	63320	155,61	63492	156,03	63793	156,77	64363	158,171
7	Rimbo Ulu	295,74	19590,2	66,24	39286	132,84	39827	134,67	37586	127,09	37759	127,68	38009	128,52	38453	130,023
8	Rimbo Ilir	214,34	13346,75	62,27	26224	122,35	26762	124,86	23408	109,21	23528	109,77	23697	110,56	24029	112,107
9	Tebo Ulu	410,3	16729,03	40,77	33789	82,35	34061	83,01	33011	80,46	33087	80,64	33230	80,99	33524	81,706
10	VII Koto	658,79	10394,33	15,78	20381	30,94	20618	31,30	19958	30,29	20093	30,50	20270	30,77	20619	31,298
11	Serai Serumpun	315,7	5534,335	17,53	10033	31,78	10337	32,74	9551	30,25	9738	30,85	9948	31,51	10218	32,366
12	VII Koto Ilir	468,21	8061,523	17,22	15830	33,81	16113	34,41	17866	38,16	18369	39,23	18925	40,42	19513	41,676
Kabupaten Tebo		6461	176.800	36,06	348760	53,98	354485	54,87	337669	52,26	340868	52,76	344816	53,37	350761	54,289

Sumber: BPS, Kabupaten Tebo dalam Angka, 2018-2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tebo mengalami tren fluktuasi pada tahun 2017 hingga 2023. Penurunan kepadatan penduduk pada level kabupaten terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari adanya penyesuaian data kependudukan berdasarkan sensus penduduk 2020 dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka mortalitas. Meskipun begitu, ada beberapa kecamatan yang tetap mengalami peningkatan kepadatan penduduk, seperti di Kecamatan Tebo Ilir, Sumay, dan VII Koto Ilir. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Rimbo Bujang dengan angka 166,07 pada tahun 2018 dan menurun menjadi 158,17 pada tahun 2023. Tingkat kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Sumay yang hanya ditempati oleh 16 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2018 dan hanya meningkat menjadi 18 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan sebagian wilayah Kecamatan Sumay termasuk dalam kawasan ekosistem esensial, yakni kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, sehingga tidak bisa dijadikan permukiman secara luas.

2.1.2.5. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Masyarakat adat di Kabupaten Tebo dinaungi oleh Lembaga Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung yang diresmikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2021. Setidaknya terdapat dua kelompok masyarakat adat yang diberikan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Tebo, yakni Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, dan Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir. Kedua kelompok tersebut berada di naungan masyarakat hukum adat yang sama, yakni Suku Anak Dalam atau bisa disebut pula Orang Rimba. Keberadaan masyarakat adat salah satunya berperan untuk turut serta

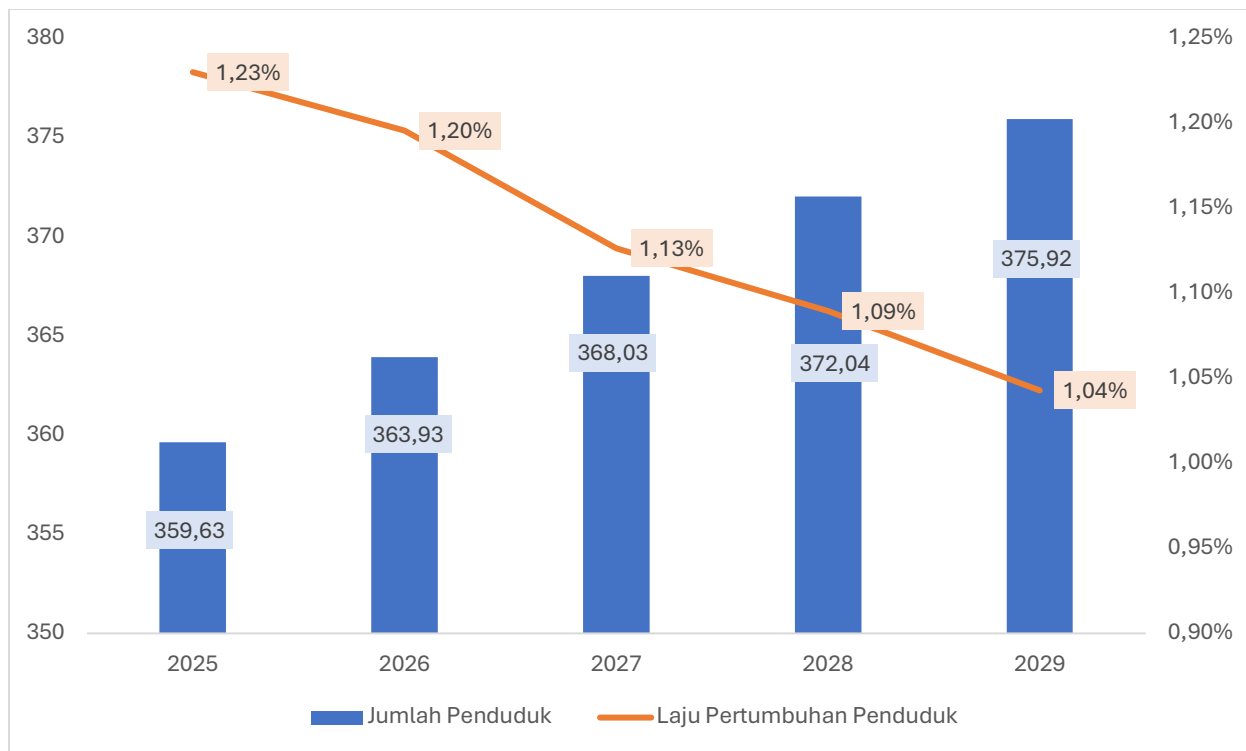
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya daerah maupun nasional.

2.1.2.6. Proyeksi demografi

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kabupaten Tebo. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kabupaten Tebo selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kabupaten Tebo pada tahun 2025 hingga 2029



Gambar 2. 29 Proyeksi Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk namun mengalami penurunan dari segi laju pertumbuhan penduduk pada periode 2025 hingga 2029. Jumlah penduduk di Kabupaten Tebo diproyeksikan bertambah sebanyak 16,29 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dengan rata-rata 1,14 persen pada tahun 2025-2029. Hasil proyeksi yang demikian tetap mempertimbangkan *total fertility rate* (TFR) yang berada pada angka 2,45. TFR mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kabupaten Tebo akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 2,45 merujuk rata-rata seorang perempuan di Kabupaten Tebo melahirkan dua orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tebo.

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Kabupaten Tebo memiliki peluang sekaligus tantangan dalam

mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Tebo pada tahun 2025-2029.

Tabel 2. 18 Proyeksi Tingkat Kepadatan per Kecamatan di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Tahun 2020 (Ribu jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Tebo Ilir	708,7	28,42	30,424	31,04	31,64	32,23	32,80
2	Muara Tabir	509,3	17,06	17,553	17,65	17,73	17,81	17,88
3	Tebo Tengah	983,56	40,04	43,055	43,46	43,84	44,21	44,56
4	Sumay	1268	21,30	24,373	25,17	25,96	26,73	27,49
5	Tengah Ilir	221,44	25,99	26,963	27,14	27,29	27,44	27,58
6	Rimbo Bujang	406,92	63,74	68,475	69,14	69,79	70,43	71,03
7	Rimbo Ulu	295,74	37,07	39,104	39,40	39,69	39,97	40,23
8	Rimbo Ilir	214,34	23,90	26,384	26,58	26,76	26,94	27,10
9	Tebo Ulu	410,3	33,12	33,318	33,49	33,66	33,82	33,96
10	VII Koto	658,79	20,08	20,377	20,54	20,70	20,86	21,01
11	Serai Serumpun	315,7	9,54	10,336	10,41	10,49	10,56	10,62
12	VII Koto Ilir	468,21	16,37	19,282	19,88	20,47	21,06	21,63
KABUPATEN TEBO		6461	336,64	359,64	363,90	368,02	372,02	375,88

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tebo terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Dari 12 kecamatan, terdapat 3 kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Tebo Tengah, dan Kecamatan Rimbo Ulu. Tingginya kepadatan penduduk di tiga kecamatan tersebut disebabkan oleh alasan yang berbeda, yakni Kecamatan Rimbo Bujang sebagai pusat perekonomian, Kecamatan Tebo Tengah sebagai pusat pemerintahan, dan Kecamatan Rimbo Ulu yang memiliki luas wilayah terkecil ketiga di Kabupaten Tebo. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Serai Serumpun.

Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena perkotaan selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kabupaten Tebo. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir di Kabupaten Tebo.

b. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk berdasarkan umur krusial untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertumbuhan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun atau dikategorikan pula sebagai penduduk yang berada pada usia kerja. Persentase penduduk usia produktif yang tinggi menuntut pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi dari penduduk usia produktif. Potensi yang dimiliki oleh penduduk kelompok usia produktif mampu mendatangkan kesejahteraan bagi wilayah terkait, namun apabila tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi potensi permasalahan yang tidak kalah luar biasa. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia produktif pada rentang tahun 2025 hingga 2029 di Kabupaten Tebo.

Tabel 2. 19 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	95,42	95,72	95,89	95,91	95,87

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
15-64	244,26	246,89	249,41	251,92	254,34
65+	19,95	21,32	22,73	24,21	25,71
Angka ketergantungan	47,23%	47,41%	47,56%	47,68%	47,80%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan bertambah sebanyak 10,08 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,03 persen. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk usia non produktif pada rentang usia 10-14 tahun pada tahun 2020-2025. Kelompok penduduk usia tersebut memasuki usia produktif dan ikut menyumbang proporsi dan jumlah penduduk usia produktif sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Tebo. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 67,66 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada. Apabila kuantitas tidak sejalan dengan kualitas, maka dapat berpotensi menghadirkan permasalahan kependudukan dan turunannya di masa yang akan datang di Kabupaten Tebo.

c. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan didefinisikan sebagai suatu indikator yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja di suatu wilayah. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban

penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Angka ketergantungan Kabupaten Tebo menunjukkan tren peningkatan setiap periode. Pada tahun 2025 ketergantungan, yaitu sebesar 47,23 persen dan meningkat menjadi 47,80 persen pada tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 47 hingga 48 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif pada tahun 2025 hingga 2029. Dari segi jumlah, tanggungan penduduk usia produktif pada tahun 2029 tidak bertambah atau maksimal bertambah satu penduduk non produktif per 100 penduduk usia produktif apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Namun kondisi tersebut juga perlahan memberikan pengaruh terhadap produktivitas penduduk usia produktif di Kabupaten Tebo. Implikasi dari beban tanggungan yang terus bertambah adalah adanya potensi perlambatan kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif.

Meningkatnya angka ketergantungan di Kabupaten Tebo disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif, yakni selisih 0,19 persen. Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 95,42 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 95,87 ribu jiwa pada tahun 2029. Hal itu dipengaruhi dengan laju pertumbuhannya yang cenderung lambat dan terus mengalami penurunan hingga mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,20 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun. Selain itu, laju pertumbuhan dari kelompok usia non produktif 65 tahun ke atas juga menunjukkan tren penurunan di setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,60 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2025 hingga 2029, yakni sebanyak 5,76 ribu jiwa. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Tebo ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi

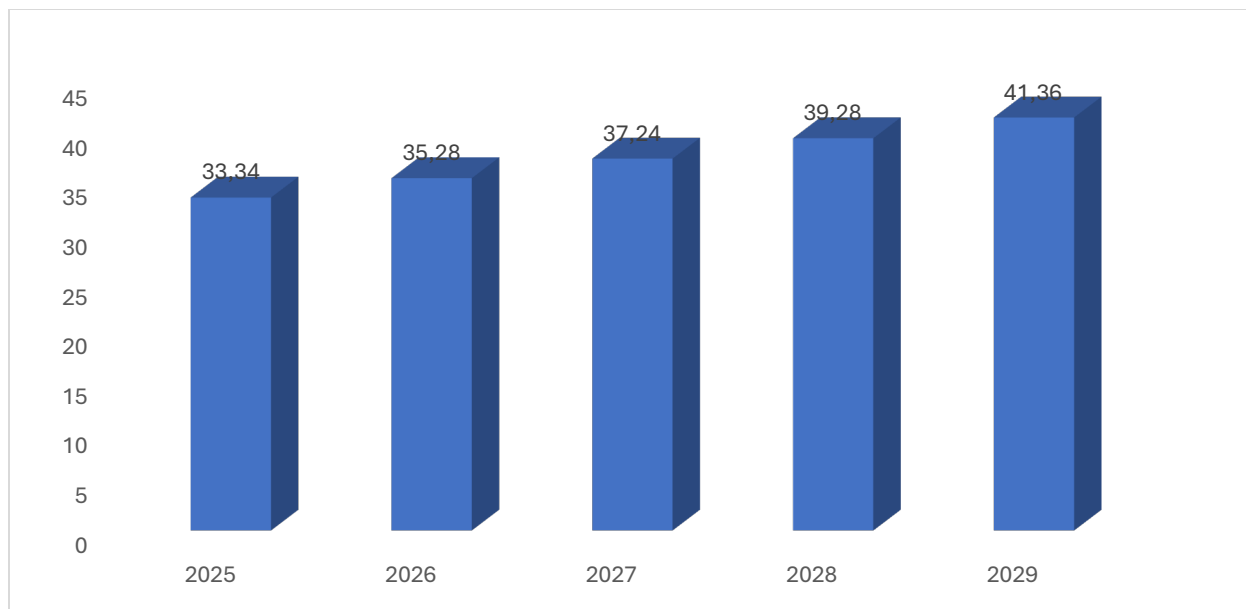
mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok usia tersebut.

d. Bonus Demografi

Rasio ketergantungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tebo tidak memiliki atau belum mendapatkan peluang bonus demografi, termasuk ketika tahun 2025 hingga tahun 2029. Hal itu tampak dari rasio ketergantungan yang lebih tinggi dari 45 persen. Kabupaten Tebo tidak memiliki atau belum mendapatkan bonus demografi karena proporsi penduduk usia produktif semakin berkurang dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Perubahan proporsi antara penduduk usia produktif dan non produktif dapat dilihat melalui bentuk piramida yang semakin menyempit di bagian tengah. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak peroduktif semakin tinggi yang kemudian memengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas.

e. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan komposisi penduduk Kabupaten Tebo di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, jumlah lansia sebanyak 24,50 ribu jiwa dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2025 hingga 2029. Berikut merupakan data hasil proyeksi penduduk usia lanjut di Kabupaten Tebo pada tahun 2025-2029.



Gambar 2. 30 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi 2020-2035; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Penduduk usia lanjut di Kabupaten Tebo diproyeksikan mengalami penambahan sebesar 8,02 ribu jiwa pada tahun 2025 hingga 2029. Hasil proyeksi yang menunjukkan peningkatan tersebut disertai dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 5,62 persen. Meskipun tampak mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduk usia lanjut diproyeksikan menurun sebesar 0,68 persen pada tahun 2025-2029. Bertambahnya penduduk lansia tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Tebo karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

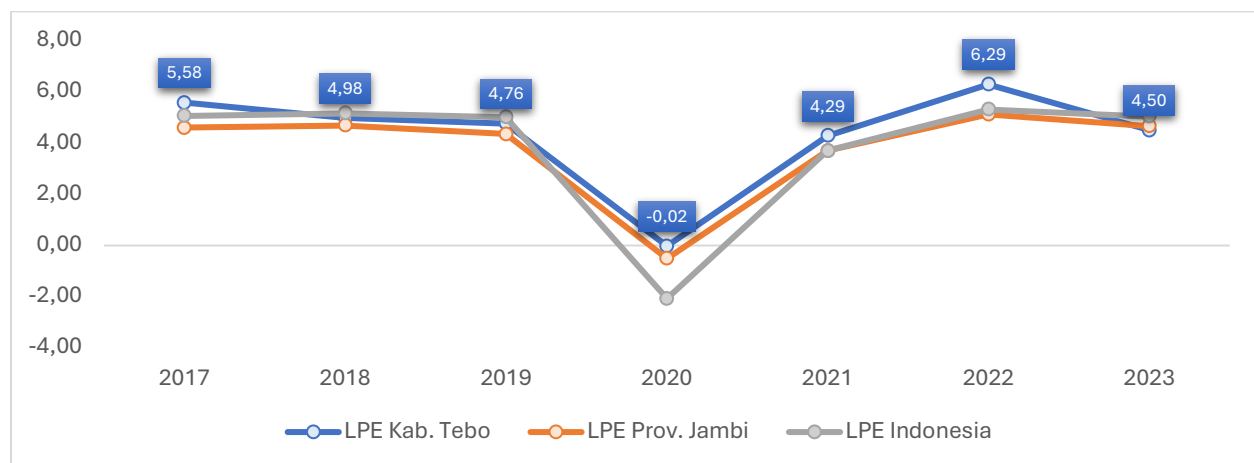
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pembangunan Kabupaten Tebo ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sejumlah indikator ekonomi meliputi laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Penjelasan dari setiap indikator dijabarkan pada sub bab berikut ini.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator laju pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan untuk menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan PDRB riil tahun bersangkutan (t) terhadap PDRB riil tahun sebelumnya ($t-1$). Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengindikasikan masifnya aktivitas ekonomi di daerah dan sebaliknya jika semakin rendah mengindikasikan melemahnya perekonomian daerah. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.



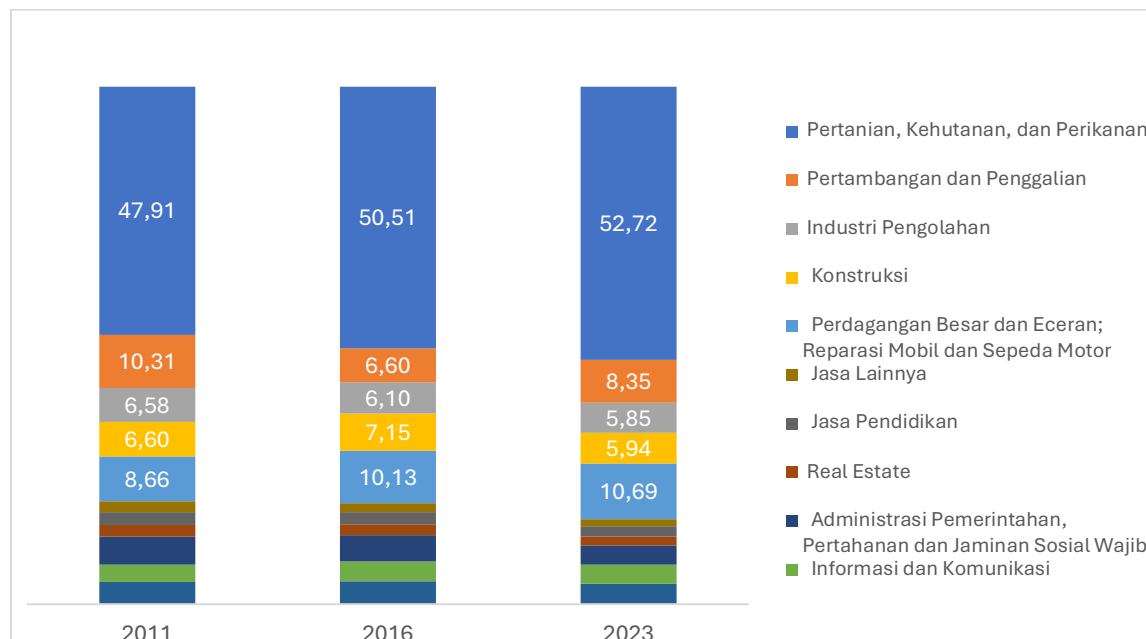
Gambar 2. 31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia (%) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2024

Perekonomian Kabupaten Tebo menunjukkan pertumbuhan yang positif terkecuali pada tahun 2020. Kondisi tersebut juga terjadi pada tingkat Provinsi Jambi dan nasional seiring dengan merebaknya kasus Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo secara umum menunjukkan tren yang serupa dengan Provinsi Jambi maupun nasional

yaitu cenderung berfluktuasi. Perekonomian Kabupaten Tebo mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan nasional pada tahun 2020-2022. Kondisi ini didorong oleh kinerja seluruh lapangan usaha, khususnya sektor pertanian, yang terus meningkat.

Tabel 2. 20 Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Tebo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2023



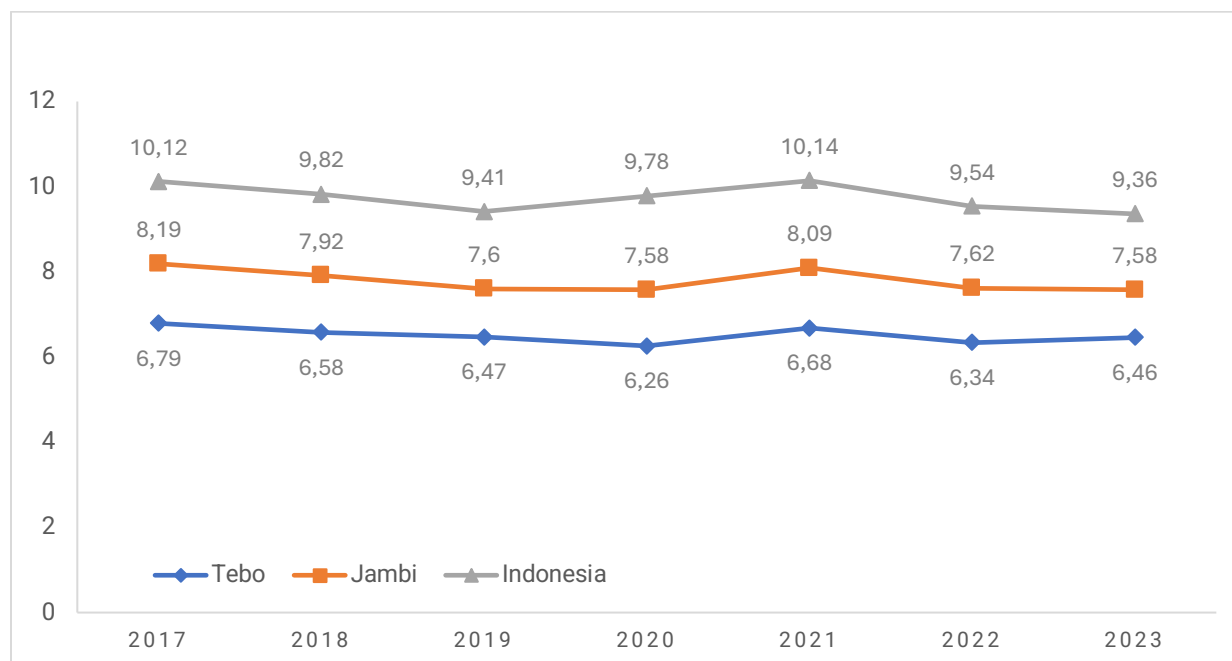
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Lapangan usaha pertanian memiliki peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo. Pada tahun 2023, lapangan usaha pertanian tumbuh 4,51 persen dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo hingga 50,25 persen. Produksi kelapa sawit hingga kini terus mendorong kinerja sektor pertanian daerah diikuti dengan produksi karet. Meskipun saat ini kontribusi terhadap perekonomian daerah masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi selama periode 2019-2023. Pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 9,28 persen pada tahun 2023 dan menunjukkan kenaikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, sektor perdagangan besar dan eceran hanya berkontribusi sebesar 10,63 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan tahun 2023 kontribusinya naik menjadi 16,99 persen.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang pertumbuhannya cukup berfluktuasi. Pada tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh hingga 41,55 persen dan berkontribusi hingga 58,36 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada tahun 2023, pertumbuhannya berkontraksi ke angka 0,06 persen dan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,18 persen. Kondisi ini mengindikasikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian masih belum stabil dan optimal.

2.2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan diukur menggunakan indikator persentase penduduk miskin yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pendapatan dan tingkat harga barang pokok. Faktor pendapatan dan harga barang pokok mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.



Gambar 2. 32 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia (%) Tahun 2017-2023

Sumber: BPS, 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jambi maupun nasional pada periode 2017-2023. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo lebih rendah 31 persen dibandingkan dengan nasional dan lebih rendah 14,8 persen dibandingkan Provinsi Jambi. Pada periode 2017-2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo cenderung stagnan di angka 6,51 persen per tahun. Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan sebesar 1,89 persen dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 660 orang, dari yang sebelumnya sempat mengalami penurunan sebanyak 960 orang.

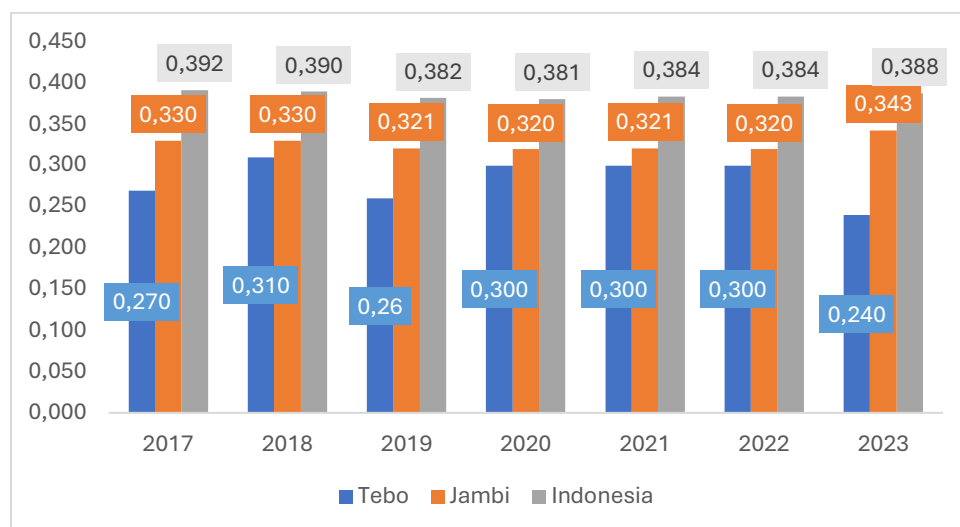
Bertambahnya jumlah penduduk miskin diduga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang pokok yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan. Kondisi ini dapat dilihat dari garis kemiskinan yang naik sebesar 8,73 persen yang mendorong garis kemiskinan menjadi Rp 528.310,00 yang diikuti dengan naiknya tingkat pengangguran sebesar 23,91 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan kemampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mengalami penurunan, khususnya bagi masyarakat yang menganggur.

Jenis pekerjaan masyarakat juga turut berpengaruh pada tingkat kemiskinan daerah. Rata-rata masyarakat Kabupaten Tebo bekerja di sektor pertanian yaitu mencapai 60,05 persen pada periode 2020-2022. Padahal, sektor pertanian merupakan sektor primer dengan nilai tambah yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan sektor industri dan jasa. Selain itu, jika dilihat dari status pekerjaan utama, 15,53 persen masyarakat Kabupaten Tebo berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar dan 5,46 persen berstatus sebagai pekerja bebas di pertanian. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan akan perubahan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kondisi pasar yang dinamis.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Rentang nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana semakin mendekati nilai 1 maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi,

sedangkan semakin mendekati nilai 0 maka pemerataan pendapatan semakin sempurna. Berikut adalah kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 33 Indeks Gini Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2017-2023

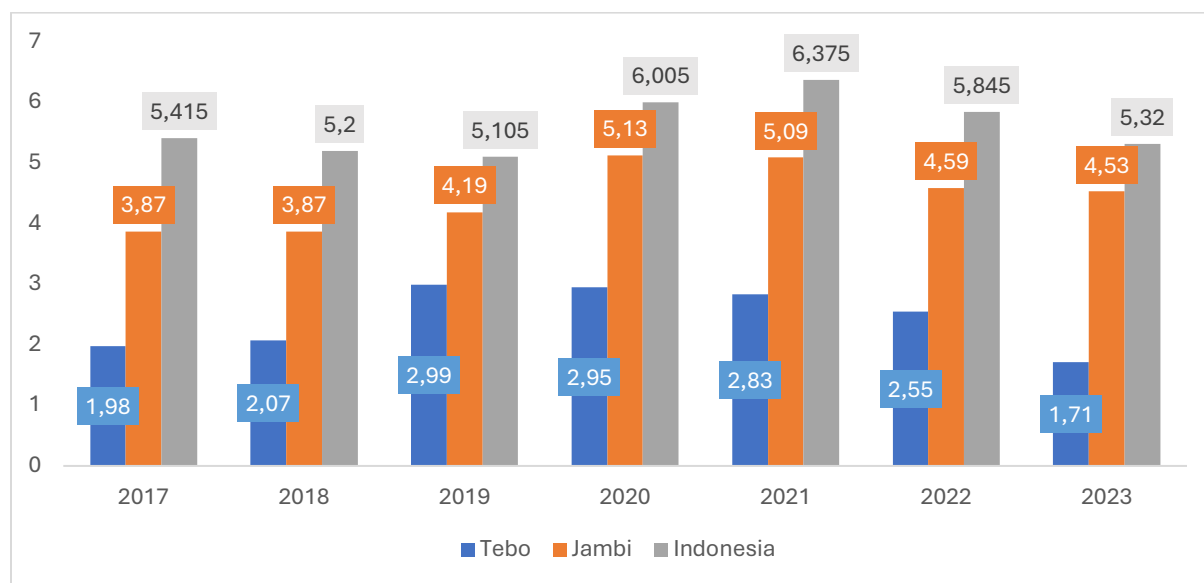
Sumber: BPS, 2024

Indeks gini Kabupaten Tebo lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi maupun nasional pada periode 2017-2023. Selain itu, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tebo menunjukkan penurunan sebesar 7,69 persen sejak tahun 2019 di saat ketimpangan pendapatan di tingkat Provinsi Jambi dan nasional justru menunjukkan tren yang semakin meningkat. Ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan dengan struktur perekonomian daerah dan jenis pekerjaan yang secara tidak langsung mempengaruhi variasi pendapatan antar kelompok masyarakat. Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian Kabupaten Tebo menjadi lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling tinggi. Pada tahun 2022, sebanyak 117.293 orang bekerja di sektor pertanian yang mengindikasikan 64,04 persen penduduk bekerja memiliki rata-rata pendapatan yang sama.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Tebo dapat dilihat dari besarnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Jumlah pengangguran terbuka di suatu wilayah

merujuk pada banyaknya jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun usaha dan tidak mencari pekerjaan, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, serta yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berikut adalah gambaran TPT Kabupaten Tebo.



Gambar 2. 34 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Indonesia Tahun 2017-2023 (%)

Sumber: BPS, 2024

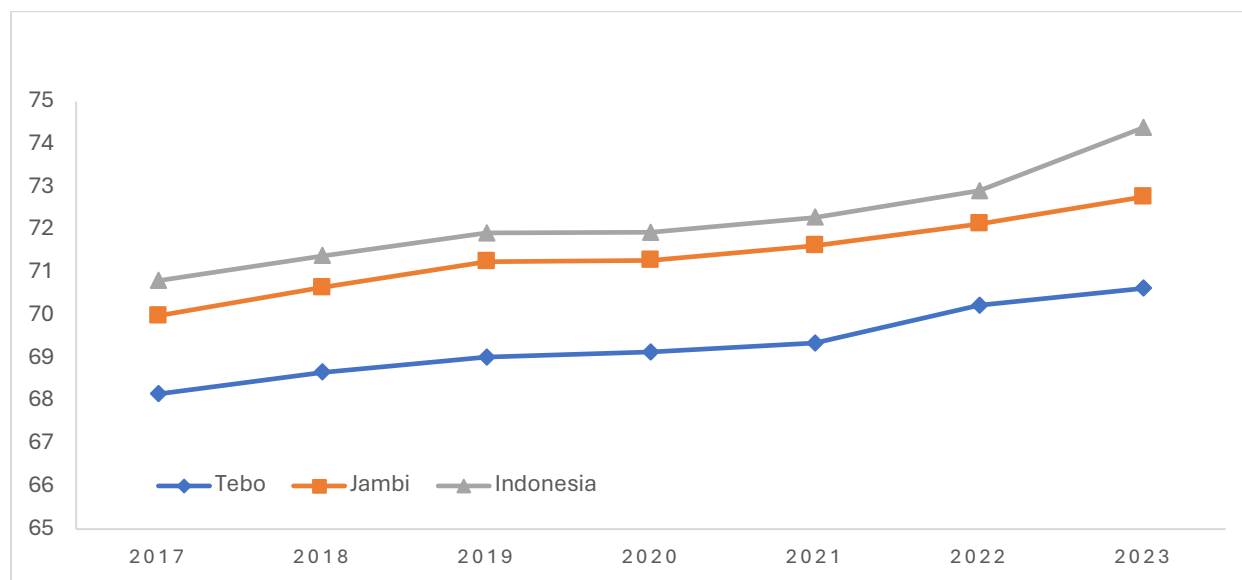
Tingkat pengangguran di Kabupaten Tebo terus menunjukkan tren yang cenderung menurun pada periode 2017-2023. TPT terendah tercapai pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 32,94 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Secara umum, tingkat pengangguran di Kabupaten Tebo lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi maupun nasional. Selain itu, tren tingkat pengangguran yang ditunjukkan di tingkat Provinsi Jambi dan nasional menunjukkan kenaikan, berbanding terbalik dengan kondisi di Kabupaten Tebo.

Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Tebo tergolong rendah, pendapatan yang diterima belum mampu meningkatkan taraf hidup seluruh kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang masih mencapai angka 6,46 persen di saat tingkat pengangguran menyentuh angka 1,71 persen pada tahun 2023. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah

tingkat pendidikan. Jika dilihat dari proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi, rata-rata baru 28,99 persen penduduk yang memiliki pendidikan SLTA/MA ke atas. Kondisi ini menyebabkan tingkat pendapatan yang diterima rendah meskipun masyarakat bekerja.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang mengukur capaian rata-rata dalam dimensi utama pembangunan masyarakat. IPM digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam tiga dimensi yang meliputi pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM dibentuk berdasarkan hasil pengukuran yang mencakup tiga parameter dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, lama pendidikan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat tampak dari indikator angka harapan hidup, pendidikan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak dari pengeluaran per kapita. IPM dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pembangunan manusia yang telah dilakukan. Berikut merupakan capaian IPM Kabupaten Tebo selama periode 2017 hingga 2023



Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi, BPS Indonesia, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2023. Tercatat adanya peningkatan sebanyak 2,47 poin pada periode 2017-2023. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tebo, khususnya pada komponen utama pembangunan masyarakat, yakni pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Meskipun capaian IPM Kabupaten Tebo mengalami peningkatan, namun IPM Kabupaten Tebo masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jambi dan Nasional, yakni secara berurutan selisih 2,14 dan 2,92 pada tahun 2023. Kondisi kesenjangan nilai IPM yang terjadi di Kabupaten Tebo perlu adanya intervensi oleh Pemerintah dengan melakukan perencanaan yang baik selama lima tahun kedepan dengan memperhatikan komponen-komponen pembentuk IPM. Rendahnya nilai IPM Kabupaten Tebo disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adanya permasalahan integrasi data pendidikan, artinya banyak pelajar yang melanjutkan studi SMA/ sederajat dan perguruan tinggi ke luar kabupaten, namun masih terdaftar sebagai masyarakat Tebo, namun tidak dilakukan pendataan, sehingga statusnya menjadi putus sekolah. Hal tersebut sangat berpengaruh pada komponen penghitungan IPM yaitu angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.

Faktor lain yang menjadi penyebab nilai IPM rendah di Kabupaten Tebo yakni persebaran tempat tinggal masyarakat yang mengikuti industri sawit di daerah hutan tanaman industri. Fasilitas publik dasar terutama bangunan sekolah yang layak dan fasilitas layanan kesehatan tidak dapat ditemukan di daerah hutan, karena faktor peruntukan ruang yang tidak sesuai. Pemerintah Kabupaten Tebo perlu melakukan intervensi dengan memperluas jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat, terutama masyarakat di kawasan kebun sawit. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tebo juga perlu memberikan intervensi terkait perekonomian masyarakat, salah satunya melalui kebijakan ketenagakerjaan yang layak, sehingga masyarakat tidak hanya bekerja, melainkan mendapatkan sumber penghidupan yang layak. Rendahnya TPT yang memiliki selisih cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat yang bekerja memiliki pendapatan yang layak. Kebijakan

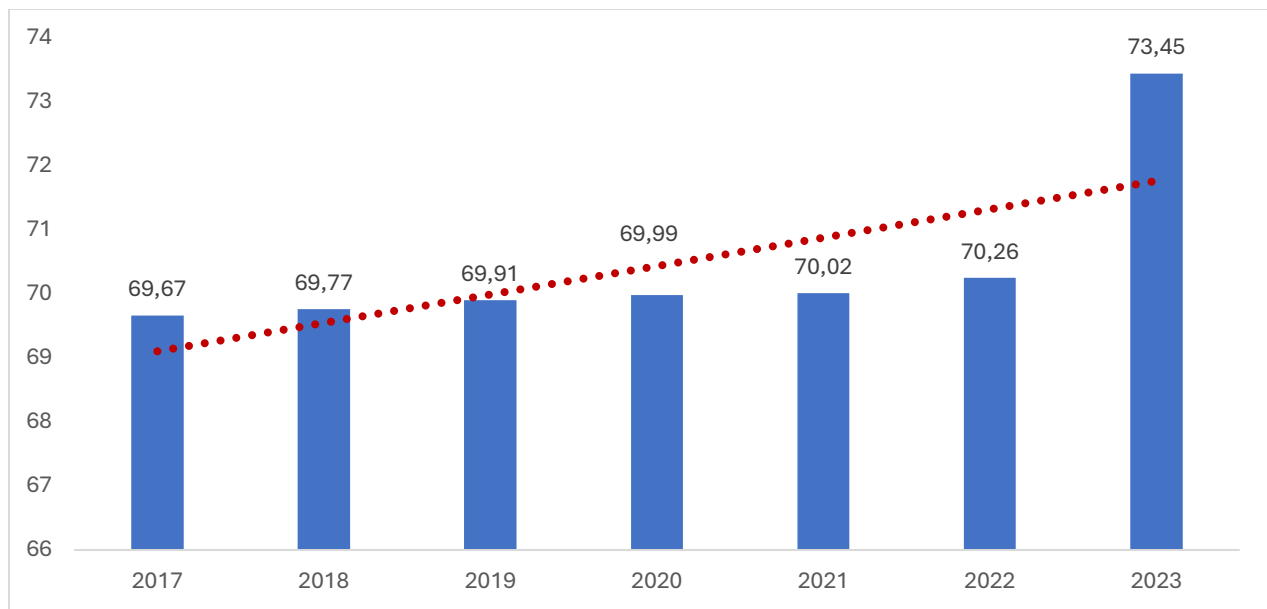
tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat dan berimplikasi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tebo.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Kualitas Kesehatan

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), upaya pembangunan kesehatan bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat adanya peningkatan dalam urusan kesehatan adalah angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator pada level dampak yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat secara umum yang berada di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Secara umum AHH juga erat kaitannya dengan beberapa aspek lain seperti pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, aksesibilitas pelayanan dasar, pendidikan, dan sebagainya. Sifat AHH yang multidisipliner membuat kolaborasi dan kerja sama lintas sektor menjadi perlu untuk meningkatkan capaiannya. Berikut perkembangan AHH di Kabupaten Tebo dengan data awal tahun 2019 dan data termutakhir di tahun 2023.



Gambar 2. 36 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2024

AHH di Kabupaten Tebo mengalami tren meningkat selama periode 2017 hingga 2023 yang menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo. Selama periode tersebut, capaian AHH di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebanyak 3,78 poin. Capaian saat ini menunjukkan bahwa rata-rata harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tebo adalah 73 tahun. Walaupun capaian AHH di Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat, namun capaian AHH di Kabupaten Tebo masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa upaya pembangunan dalam bidang kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya mendorong kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masih perlu untuk diperkuat dengan cara pemenuhan layanan spesialisik di daerah didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di suatu daerah, maka dukungan dan pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasarana kesehatan menjadi sangat penting. Selain itu, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan juga turut menjadi bagian penting yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tebo. Berikut merupakan gambaran

pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan di Kabupaten Tebo dengan histori data awal di tahun 2017 dan data termutakhir di tahun 2023

Tabel 2. 21 Jumlah Fasilitas Penunjang Layanan Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2022

Tahun	Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Puskesmas	Poskesdes	Posyandu	Klinik
2017	2	19	N/A	178	9
2018	2	21	117	170	10
2019	2	20	116	310	12
2020	2	20	113	321	12
2021	2	20	114	319	16
2022	2	20	113	319	12
2023	2	20	113	319	12

Sumber: BPS Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo memiliki dua rumah sakit berupa rumah sakit umum daerah (RSUS) yang berlokasi di Kecamatan Tebo Tengah dan rumah sakit umum di Kecamatan Rimbo Bujang. Pemerintah Kabupaten Tebo terus melakukan upaya pemenuhan fasilitas kesehatan dengan menambah fasilitas puskesmas, poskesdes, dan posyandu dalam sepuluh tahun terakhir, pada tahun 2023 Kabupaten Tebo telah memiliki 20 fasilitas puskesmas, 113 poskesdes, dan 319 posyandu.

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tebo sudah relatif memadai dalam segi jumlah. Namun demikian, jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan tersebut masih menjadi kendala dan harus segera diselesaikan. Fasilitas kesehatan yang masih terkonsentrasi di beberapa kawasan, menjadi kendala bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Selain upaya pemerataan fasilitas kesehatan, penambahan, dan pembangunan yang memperhatikan dinamika kependudukan menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya pembangunan kesehatan di masa yang akan datang. Catatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo disajikan dengan data awal di tahun 2017 dan data termutakhir di tahun 2023 pada tabel di bawah ini.

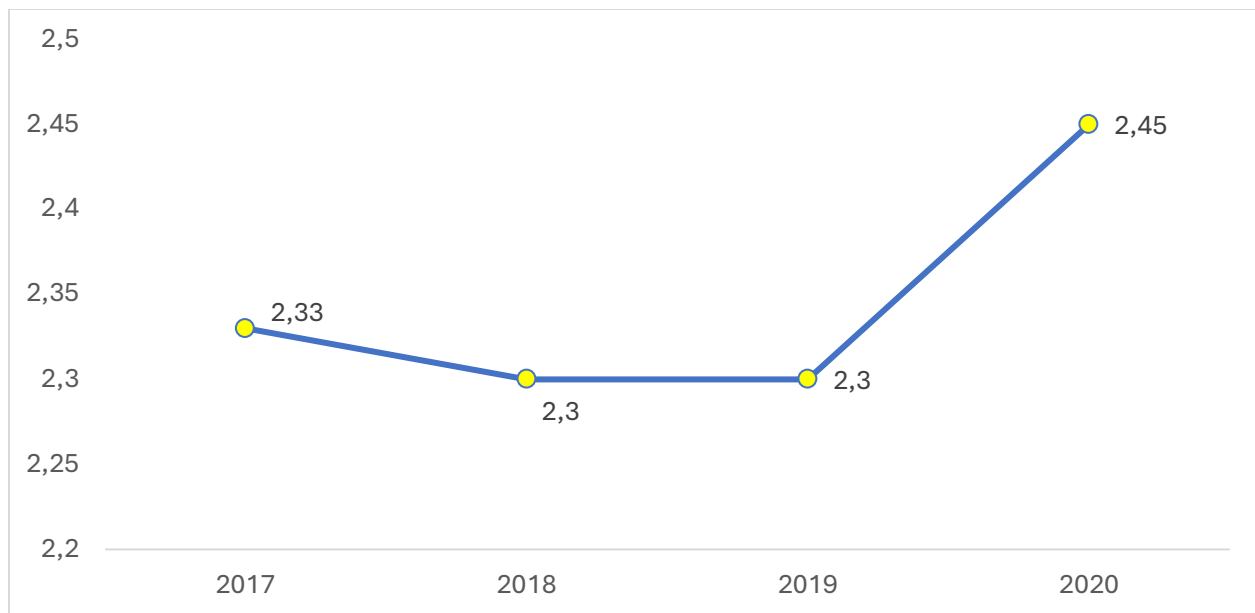
Tabel 2. 22 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tebo Tahun 2017 s/d 2023

Tahun	Fasilitas Kesehatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Lainnya
2017	12	59	141	210	21
2018	13	52	174	237	44
2019	55	135	207	27	16
2020	90	261	500	31	18
2021	97	466	619	68	44
2022	58	261	500	31	18
2022	58	313	515	35	18

Sumber: BPS Kabupaten Tebo

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo masih perlu untuk ditingkatkan, terutama terkait dengan kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk ditempatkan di Rumah Sakit yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Tebo. Upaya tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan umum dan spesialis di Kabupaten Tebo. Selain itu, pemerataan tenaga kesehatan juga menjadi isu penting yang perlu diselesaikan agar dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan menjadi lebih baik dan menyeluruh.

Peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan perlu dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan. Proyeksi penambahan penduduk di masa yang akan datang perlu diimbangi dengan penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Secara konseptual, penambahan dan pengurangan jumlah penduduk di suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti natalitas, mortalitas, dan migrasi. Berikut merupakan gambaran angka kelahiran total/ TFR di Kabupaten Tebo dengan data awal di tahun 2017 dan data termutakhir di tahun 2020.



Gambar 2. 37 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020

Sumber: BPS Kabupaten Tebo 2022

Angka kelahiran total di Kabupaten Tebo cenderung mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2020. Capaian ini menunjukkan bahwa selama periode 2017 hingga 2020, rata-rata perempuan di Kabupaten Tebo melahirkan 2 orang anak hingga akhir masa reproduksinya. Secara umum, diketahuinya TFR di suatu daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk merencanakan program pembangunan dalam hal mengontrol rata-rata usia kawin masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan bayi, serta menjadi acuan kebijakan untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selain itu, analisis angka kelahiran total juga dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung layanan dasar di masa yang akan datang dengan cara memperhitungkan proyeksi kelahiran di masa yang akan datang berdasarkan tren angka kelahiran di masa lalu.

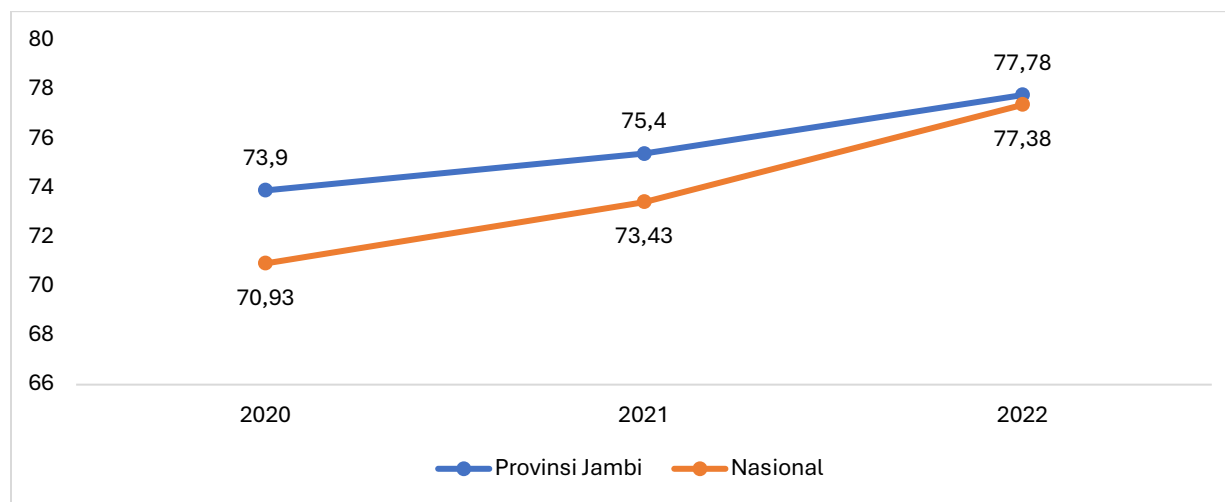
2.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat (IKS) adalah instrumen untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga. Pengukuran IKS melibatkan 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, sosial, mental, dan lingkungan. Nilai IKS memiliki rentang 0 – 1 dengan nilai mendekati 1 menandakan kesehatan keluarga yang

semakin baik dan sebaliknya. Nilai IKS Kabupaten Tebo ditaksir berdasarkan nilai IKS Provinsi Jambi. Nilai IKS Provinsi Jambi di tahun 2023 mencapai 0,205 poin dan tergolong cukup rendah. IKS berhubungan erat dengan beberapa indikator lain dalam bidang pembangunan kesehatan seperti angka harapan hidup (AHH) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk itu, diperlukan upaya dalam mengakselerasi kesehatan keluarga oleh Pemerintah Provinsi Jambi terutama bagi Pemerintah Kabupaten Tebo. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan layanan kesehatan, dan upaya lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.2.2.3 Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga memiliki peran sebagai pencetak sumber daya manusia berkualitas karena didalamnya terjadi interaksi interpersonal erat dalam pembinaan perkembangan anak. Sebagai unit terkecil dalam interaksi sosial, kualitas keluarga perlu diukur untuk menjamin terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Keluarga berkualitas dimaknai sebagai kondisi keluarga yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, kesetaraan dan keadilan gender, berperan aktif dalam bermasyarakat, serta memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.



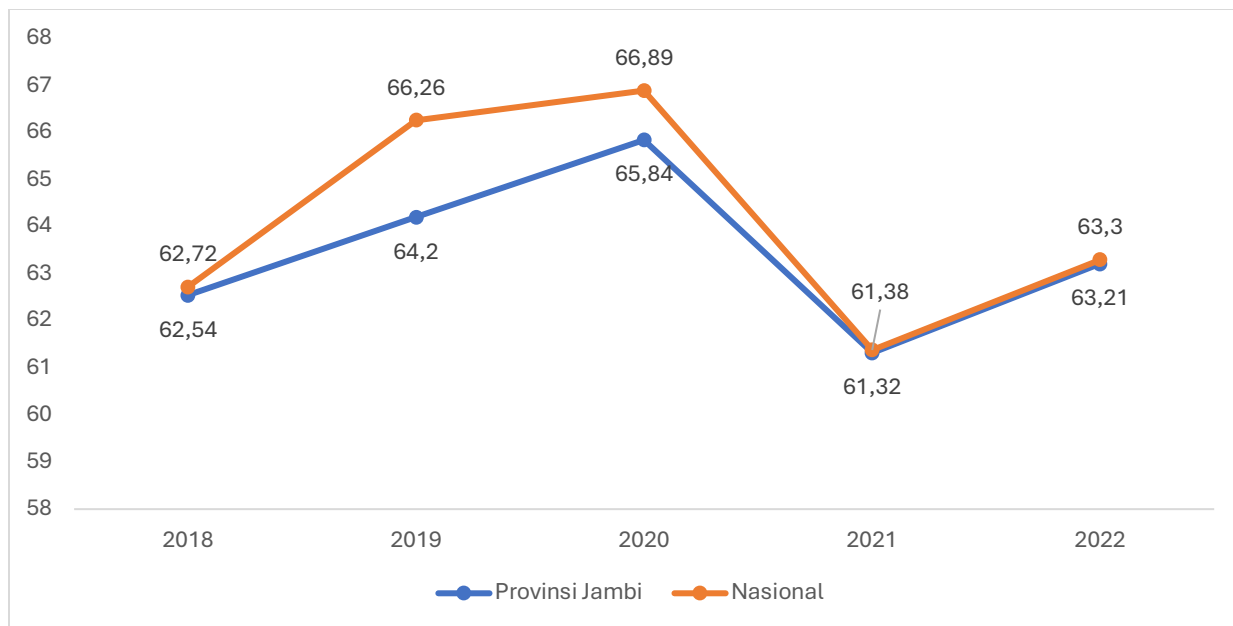
Gambar 2. 38. Capaian Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pengukuran indeks kualitas keluarga (IKK) Kabupaten Tebo menggunakan *proxy* indikator IKK dari Provinsi Jambi. Capaian IKK Provinsi Jambi dengan data awal tahun 2020 dan data termutakhir di tahun 2022. Provinsi Jambi memperoleh predikat kategori 3 selama tahun 2020 sampai tahun 2022, artinya kualitas keluarga di Provinsi Jambi telah berada dalam kondisi responsif terhadap gender dan pemenuhan hak anak. Capaian IKK Provinsi Jambi setiap tahunnya berada di atas capaian nasional dan berhasil memperoleh predikat daerah dengan nilai IKK tertinggi ketiga secara nasional. Keberhasilan capaian IKK perlu dipertahankan oleh Provinsi Jambi, termasuk salah satunya oleh Kabupaten Tebo. Unsur penilaian IKK dibentuk oleh lima dimensi diantaranya yaitu kualitas legalitas struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Dimensi tersebut penting diperhatikan bagi pemerintah Kabupaten Tebo dalam mewujudkan pembangunan keluarga mandiri dan berketahanan.

2.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak

Perkembangan anak dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai bentuk upaya dalam mencetak generasi unggul, cerdas, kompetitif, dan berakhlak. Upaya perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya kekerasan, literasi dan numerasi yang rendah, angka putus sekolah, tingginya persentase anak merokok, stunting dan pernikahan dini. Potret capaian perlindungan anak diukur dengan indeks perlindungan anak (IPA) melalui pengaplikasian 2 indikator diantaranya yaitu indeks pemenuhan hak anak dan indeks perlindungan khusus anak (IPKA).



Gambar 2. 39. Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

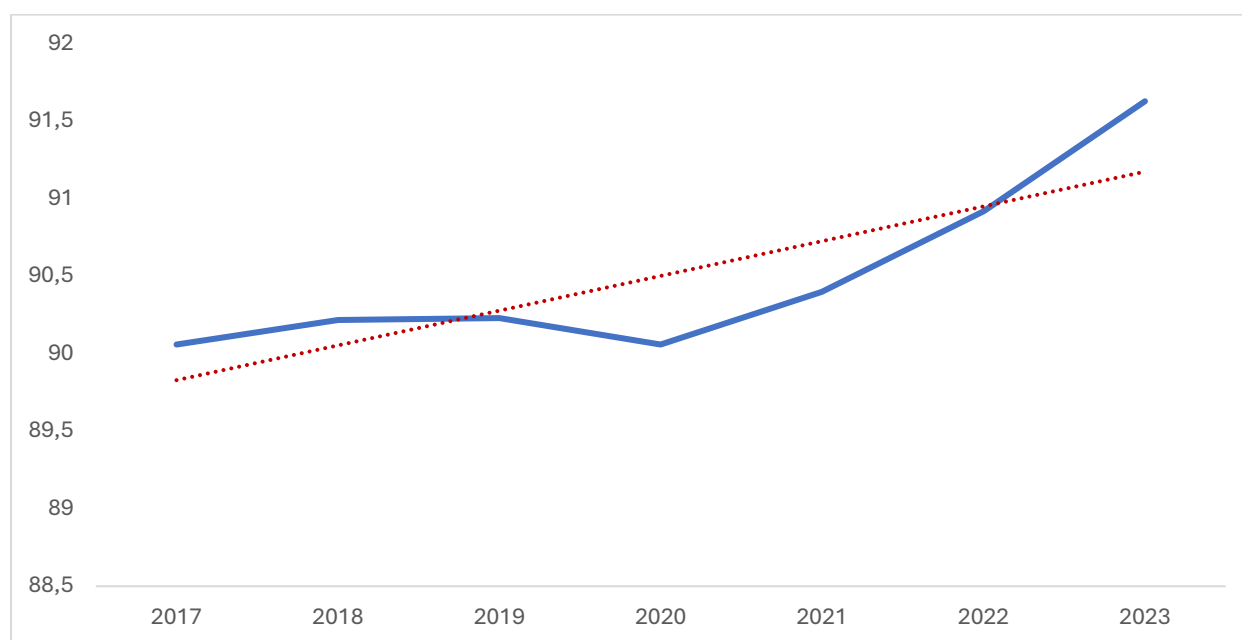
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Penilaian capaian IPA di Kabupaten Tebo menaksir dari capaian indikator IPA yang diperoleh Provinsi Jambi dari tahun 2018 sebagai data awal dan tahun 2022 sebagai data termutakhir. Secara umum capaian IPA Provinsi Jambi masih berada di bawah capaian nasional. Capaian IPA Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, peningkatan capaian IPA terjadi dari tahun 2018 hingga 2020, namun kemudian menurun sebesar 4,52 poin di tahun 2021 dan kembali meningkat secara perlahan di tahun 2022 dengan sebesar 1,89 poin. Data termutakhir menunjukkan capaian IPA Kabupaten Tebo berhasil memperoleh nilai yang tidak berbeda jauh dengan Provinsi Jambi yaitu 63,09. Perolehan nilai IPA Provinsi Jambi mengindikasikan masih perlunya upaya memperbaiki capaian IPA kedepannya dalam melindungi dan memenuhi hak anak.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender

Pembangunan di suatu daerah perlu memperhatikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan peran perempuan dalam

berbagai bidang dengan disertai upaya perlindungan perempuan dari kekerasan. Salah satu indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berikut merupakan gambaran upaya pembangunan bidang perempuan di Kabupaten Tebo dengan data awal tahun 2017 dan data termutakhir tahun 2023.



Gambar 2. 40 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

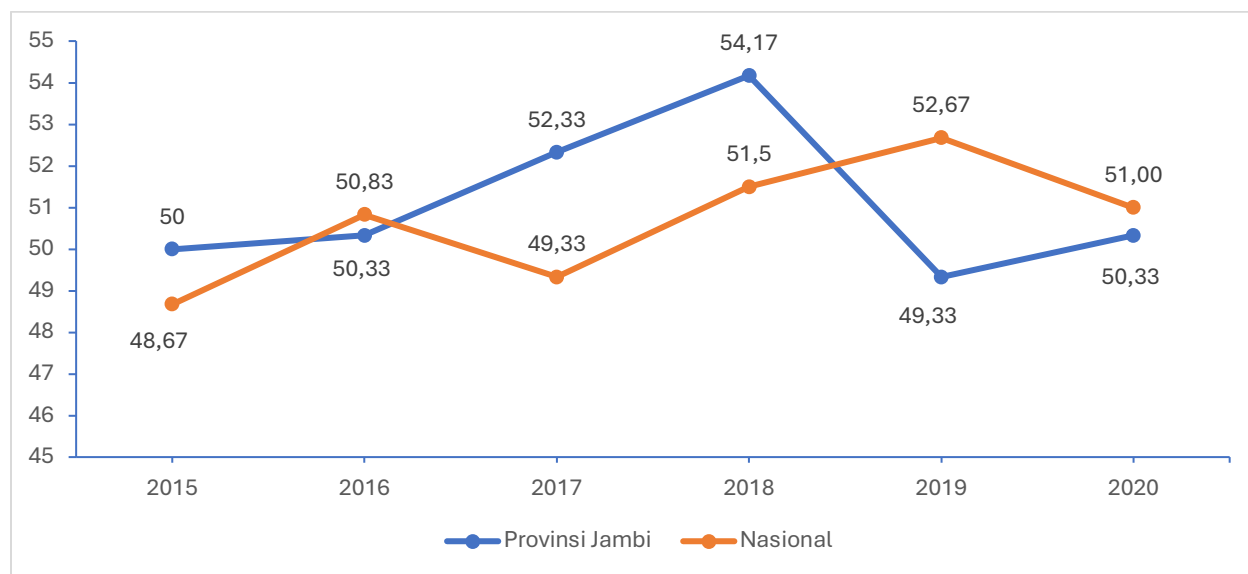
Sumber: BPS Provinsi Jambi 2018-2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100 atau lebih, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Capaian IPG Kabupaten Tebo menunjukkan tren yang baik selama periode 2017 hingga 2023. Terdapat peningkatan sebanyak 0,26 poin selama periode 2017-2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan perempuan di kabupaten Tebo sudah relatif baik. Namun demikian, upaya tersebut perlu untuk terus ditingkatkan terutama dalam hal pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan hingga urusan perekonomian.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks pembangunan pemuda (IPP) merupakan instrumen dalam mengukur upaya pembangunan pemuda dari sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Capaian

IPP mencerminkan status pembangunan berdasar domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi.



Gambar 2. 41. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2015-2020

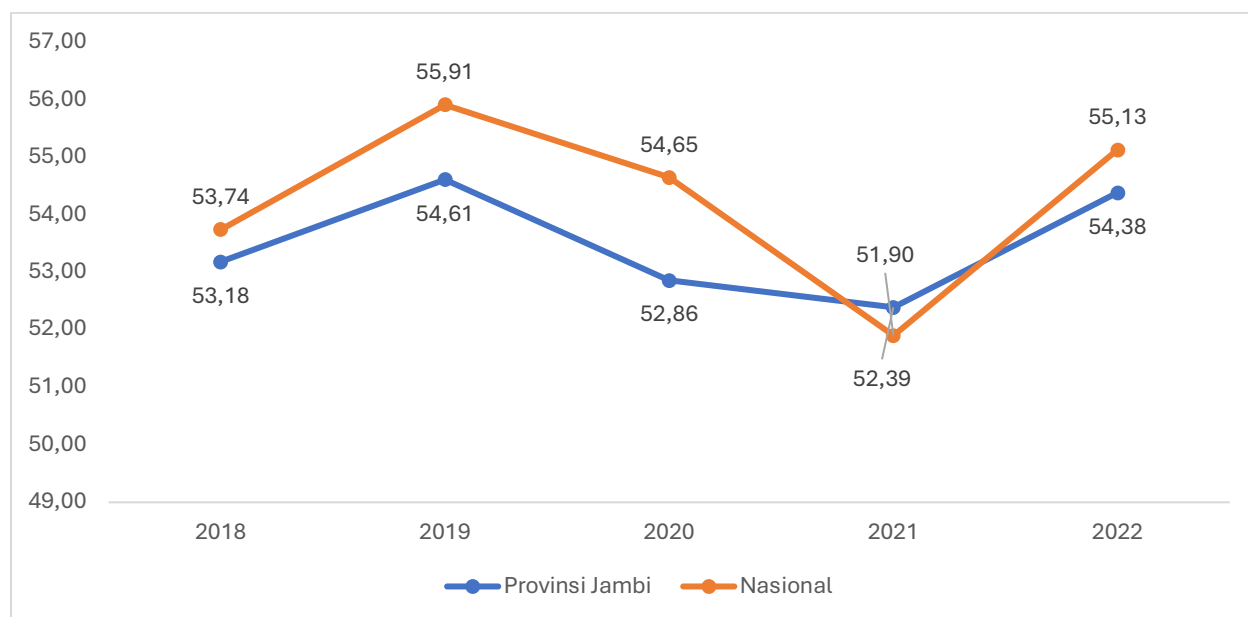
Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Capaian indeks Pembangunan pemuda (IPP) di Kabupaten Tebo ditaksir dari capaian indikator IPP Provinsi Jambi dengan data awal di tahun 2015 dan data termutakhir tahun 2020. Capaian IPP Provinsi Jambi mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun 2015 hingga memperoleh capaian tertinggi di tahun 2018. Capaian mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 4,84 poin kemudian secara perlahan kembali membaik di tahun 2020 dengan capaian 50,33. Menurut catatan data termutakhir, capaian IPP Provinsi Jambi masih berada di bawah capaian nasional. Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengoptimalkan capaian IPP untuk kedepannya melalui program yang menysasar pemenuhan hak dasar dan kreativitas pemuda, begitu pula untuk pemerintah Kabupaten Tebo.

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Peran kebudayaan dalam pembangunan mengintervensi kualitas sumberdaya manusia melalui nilai budaya dan mentalitas. Pembangunan yang memperhatikan warisan budaya berfokus dalam menjadikan kebudayaan sebagai investasi kedepan.

Serangkaian dimensi dan indikator yang memotret capaian kinerja pembangunan kebudayaan diwakilkan dalam indeks pembangunan kebudayaan (IPK).



Gambar 2. 42. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

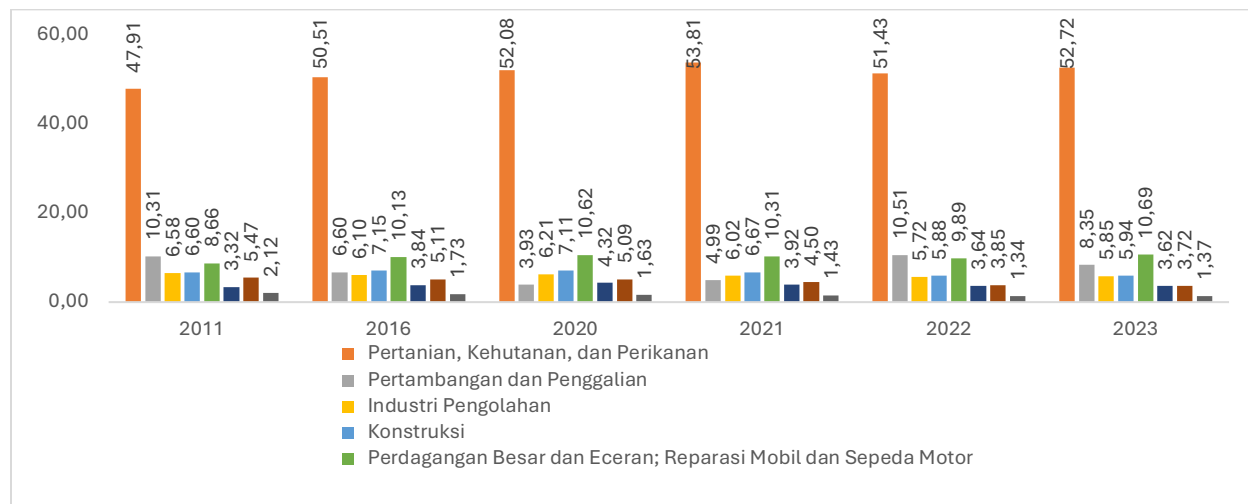
Pengukuran capaian IPK Kabupaten Tebo menaksir dari capaian IPK Provinsi Jambi dengan data awal di tahun 2018 dan data termutakhir di tahun 2022. Realisasi IPK tertinggi terjadi pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2021 dan mengalami lonjakan nilai di tahun 2022. Secara umum, realisasi IPK Provinsi Jambi tergolong berpredikat Cukup dan masih berada di bawah realisasi nasional. Penghitungan IPK melibatkan dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi literasi, dan dimensi kesetaraan gender. Untuk itu, diperlukan upaya dalam mengakselerasi capaian ketujuh dimensi IPK tersebut di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tebo.

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah tanpa melihat status kependudukan. Penghitungan PDRB menggunakan 2 penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (riil) digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi sedangkan PDRB ADHB (nominal) digunakan untuk melihat struktur perekonomian daerah. Berikut adalah nilai PDRB Kabupaten Tebo menurut harga konstan dan berlaku.



Gambar 2. 43 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2011-2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

PDRB Kabupaten Tebo terus mengalami kenaikan, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Perekonomian Kabupaten Tebo digerakkan oleh seluruh lapangan usaha dengan kontributor terbesar bersumber dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian mencapai 51,84 persen per tahun dengan tren yang semakin meningkat. Hasil produksi tanaman kelapa sawit dan karet menjadi komoditas unggulan Kabupaten Tebo yang terus mendorong kinerja sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan. Naiknya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tebo didorong oleh kenaikan harga kelapa sawit sebagai komoditas utama.

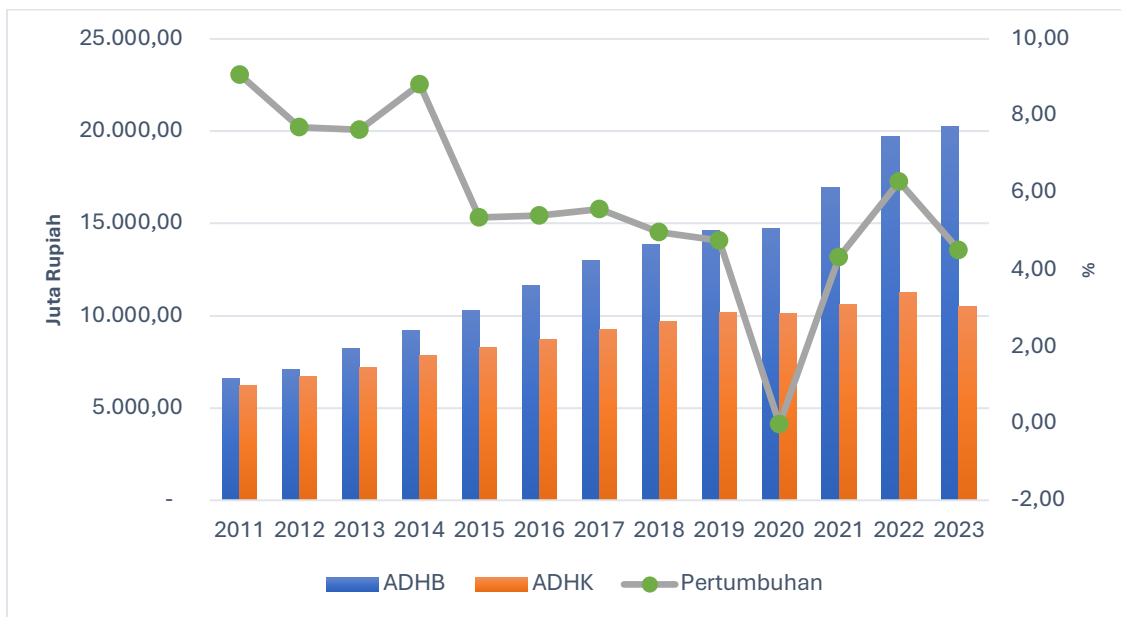
Kontributor terbesar kedua setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,45 persen. Kondisi ini didorong oleh ketersediaan sarana prasarana perdagangan yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga memudahkan transaksi jual beli barang di masyarakat. Tercatat terjadi kenaikan jumlah toko dari yang sebelumnya sebanyak 859 toko pada tahun 2020 menjadi 2.145 toko pada tahun 2023. Jumlah sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Tebo tercatat sebesar 2.975 unit pada tahun 2023, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan turut berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Tebo meskipun jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian. Masing-masing lapangan usaha berkontribusi sebesar 6,92 persen, 6,66 persen, dan 5,93 persen per tahun pada periode 2019-2023. Dari ketiga lapangan usaha tersebut, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang meningkat dari yang sebelumnya sebesar 6,73 persen pada tahun 2019 menjadi 8,35 persen pada tahun 2023. Kondisi ini didorong oleh kinerja sub kategori pertambangan batu bara dan lignit (65,08%) dan pertambangan minyak, gas, dan panas bumi (31,26%) sebagai sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tebo.

Dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu menjadi perhatian khusus mengingat nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini cenderung rendah. Kabupaten Tebo memiliki potensi kelapa sawit dan karet yang besar tetapi tidak diikuti dengan hilirisasi yang optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan yang cenderung stagnan di angka 5,93 persen per tahun selama periode 2019-2023. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian sebagai lapangan usaha terbesar kedua juga cenderung memiliki kerentanan mengingat fluktuasi harga komoditas di pasar global yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perekonomian Kabupaten Tebo perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi melalui agenda hilirisasi hasil SDA dan pengembangan sektor jasa.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Tingkat produktivitas dan pendapatan penduduk dapat diukur melalui indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membandingkan total PDRB terhadap total penduduk di suatu wilayah, sehingga dalam PDRB per kapita setiap penduduk diasumsikan menghasilkan nilai tambah yang sama. PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat karena setiap orang diasumsikan menerima imbal hasil berupa pendapatan atas nilai tambah yang dihasilkan dalam perekonomian.



Gambar 2. 44 PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan PDB Per Kapita Indonesia (Juta Rupiah) Tahun 2011-2023

Sumber: BPS, 2024

PDRB per kapita Kabupaten Tebo terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,26 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 7,72 persen dibandingkan tahun 2013. Tingginya pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2014 didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,82 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stagnan di kisaran 2 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita mengikuti pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo dimana PDRB per kapita setelah tahun 2014 menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin turun.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo sempat mengalami pertumbuhan yang negatif atau mengalami penurunan pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian Kabupaten Tebo menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi berkontraksi sedangkan jumlah penduduk tetap tumbuh positif. Namun, seiring dengan pulihnya perekonomian Kabupaten Tebo, PDRB per kapita kembali tumbuh positif sebesar 3,15 persen pada tahun 2021, semakin tinggi mencapai 5,17 persen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,56 persen. PDRB per kapita tahun 2022 mencapai 29,86 juta rupiah berdasar harga konstan atau 60,39 juta rupiah berdasar harga berlaku.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo mencapai 60,39 juta rupiah pada tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh Kabupaten Tebo sebagai daerah yang perekonomiannya digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Karakteristik daerah yang mengandalkan SDA sebagai sumber aktivitas ekonomi umumnya memiliki nilai PDRB yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang sudah bergeser pada sektor pengolahan ataupun jasa. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,29 persen.

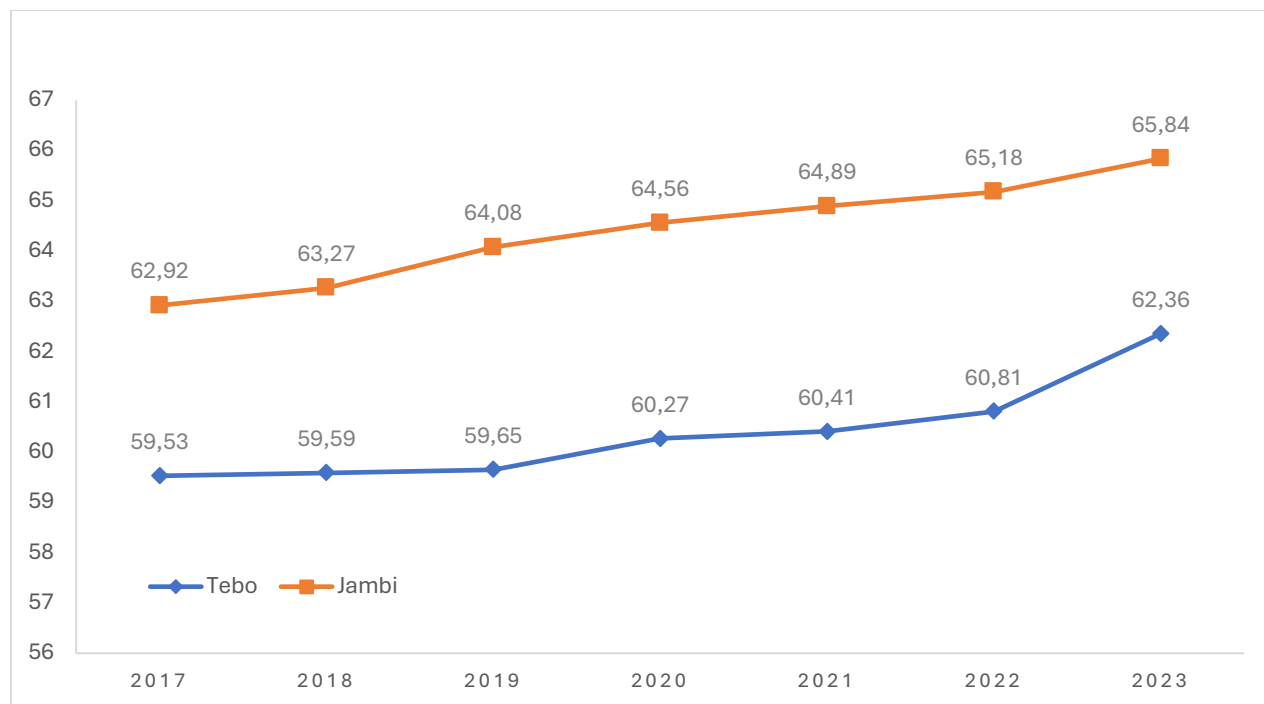
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja pada aspek daya saing sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan capaian beberapa indikator makro meliputi urusan pendidikan hingga daya saing ketenagakerjaan. Berikut merupakan gambaran daya saing sumber daya manusia Kabupaten Tebo.

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukan

semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kabupaten Tebo selama periode 2021 hingga 2024. Berikut ini indeks Pendidikan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023.



Gambar 2. 45 Indeks Pendidikan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

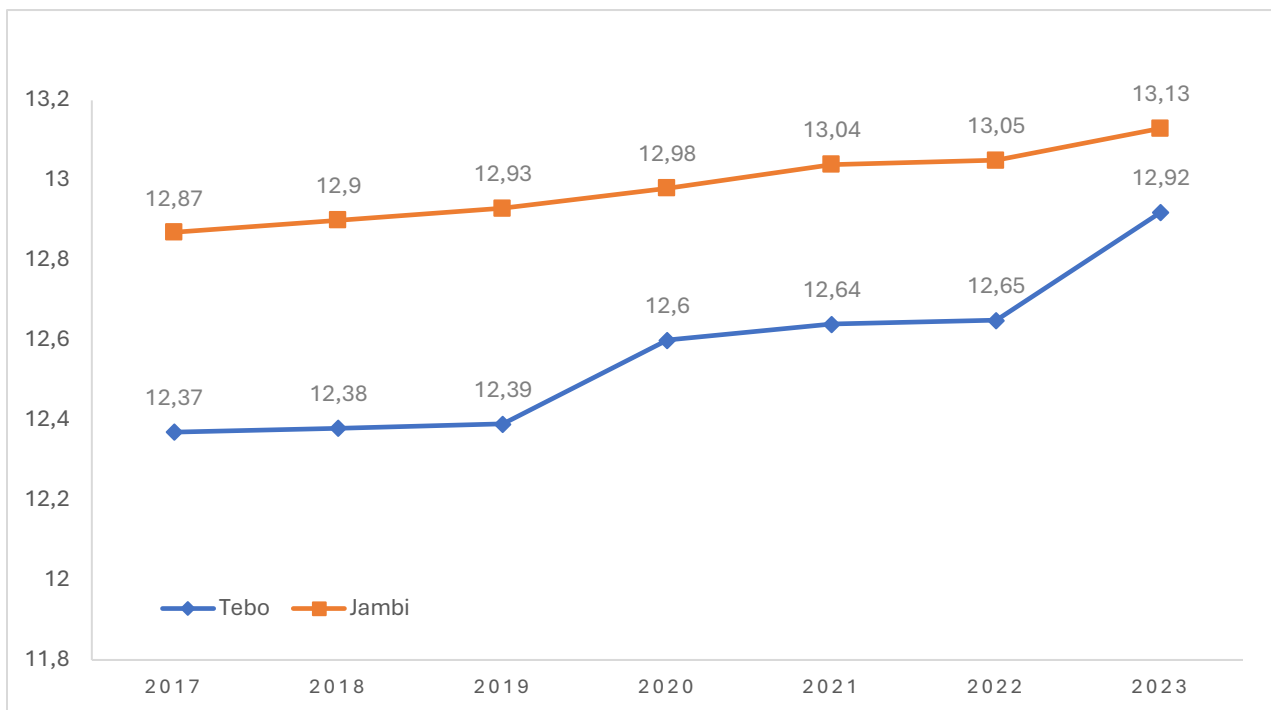
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Indeks Pendidikan di Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks pendidikan Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 4,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan. Indeks Pendidikan Kabupaten Tebo secara konsisten berada di bawah rata-rata indeks pendidikan Provinsi Jambi. Oleh karena itu, upaya peningkatan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Tebo, terutama dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di masa yang akan datang.

a) Harapan Lama Sekolah

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Urusan pendidikan menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tebo Tahun 2017 hingga 2023.



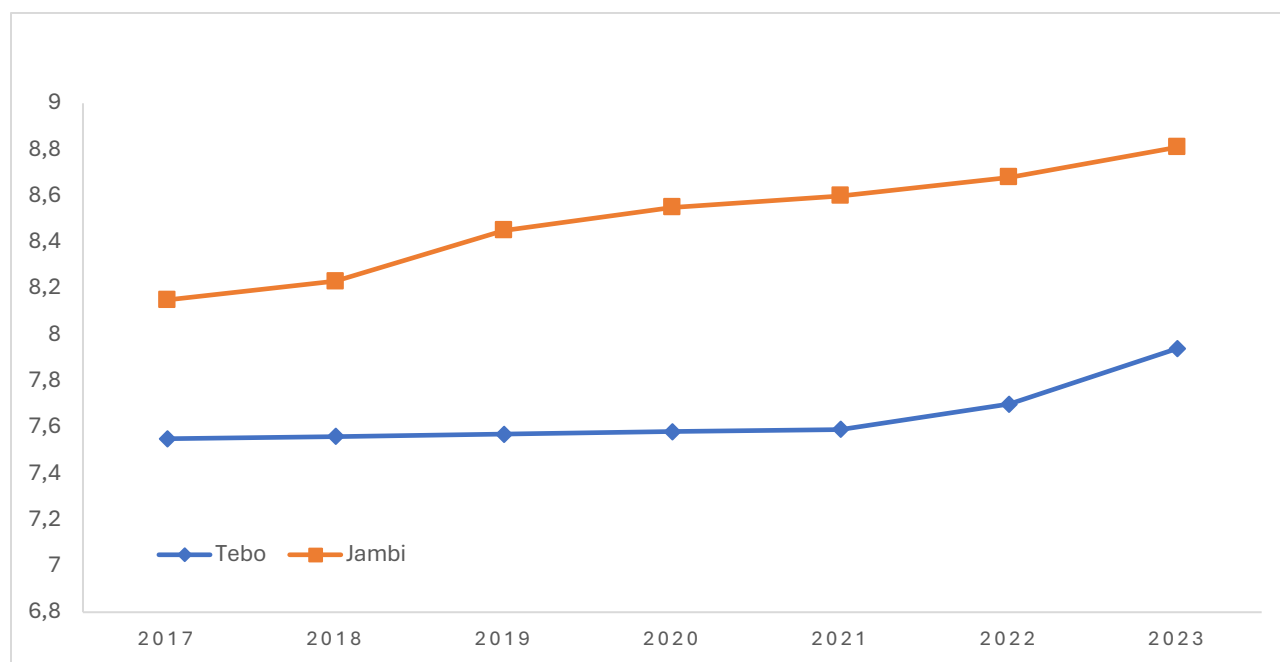
Gambar 2. 46 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2023. Capaian HLS Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Tebo berada pada angka 12,92 tahun atau setara dengan kelas 3 SMA. Walaupun mengalami tren yang positif, capaian HLS Kabupaten Tebo masih berada di bawah rata-rata HLS Provinsi Jambi, yang mana pada tahun 2023 sudah berada pada angka 13,13 atau setara dengan Diploma I. Upaya untuk meningkatkan capaian HLS perlu untuk terus dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat, terutama dalam mendukung program nasional Indonesia emas 2045.

b) Rata-rata Lama Sekolah

Indikator lain yang menjadi tolok ukur pembangunan pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Tebo periode 2017 hingga 2023.



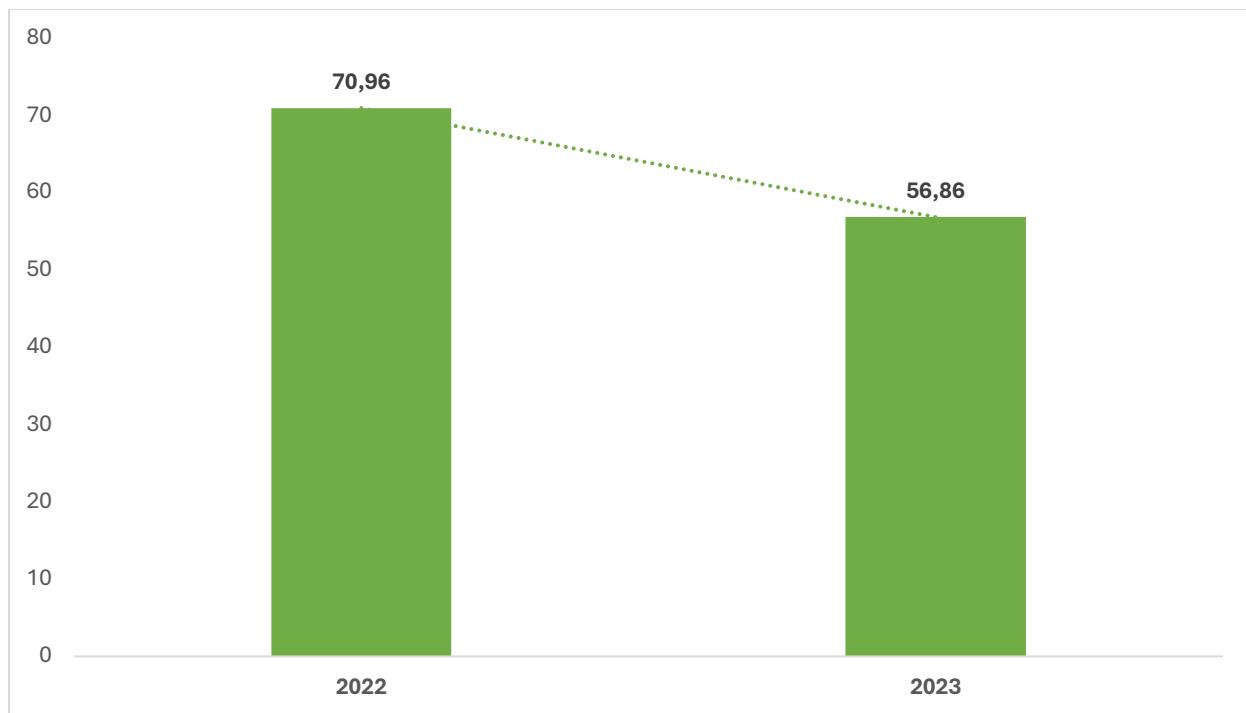
Gambar 2. 47 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tebo mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2023. Capaian RLS Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin. Pada tahun 2023, RLS Kabupaten Tebo berada pada angka 7,94. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Tebo dapat merasakan pendidikan formal selama 7,94 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Upaya peningkatan partisipasi sekolah di Kabupaten Tebo perlu menjadi perhatian, mengingat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Tebo masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Jambi. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tebo.

2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut adalah capaian IPLM Kabupaten Tebo tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tebo Tahun 2022-2023

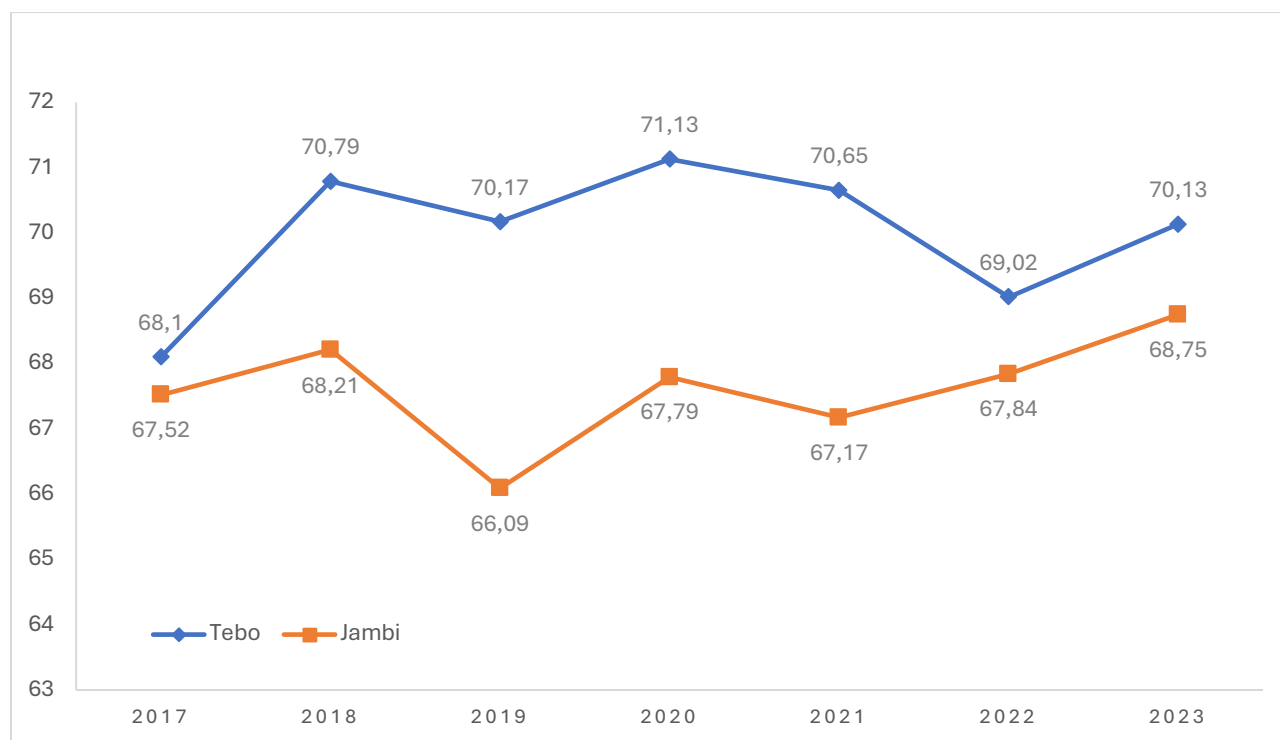
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

IPLM Kabupaten Tebo mengalami tren yang menurun selama periode 2022 hingga 2023. Pada tahun 2023 IPLM Kabupaten Tebo berada pada angka 56,86. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 14,1 poin. Kondisi ini menyebabkan capaian IPLM Kabupaten Tebo berada pada kategori sedang. Upaya dan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini menjadi salah satu modal penting yang harus dipenuhi guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Tebo. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, diantaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan yang berkualitas disertai dengan koleksi buku dan tenaga pustakawan yang berkompeten.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Di bagian hilir, kinerja pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia dapat dilihat dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolok ukur pembangunan pada bidang tenaga kerja adalah Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan indikator yang menghitung persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut merupakan capaian TPAK di Kabupaten Tebo selama periode 2017 hingga 2023.



Gambar 2. 49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

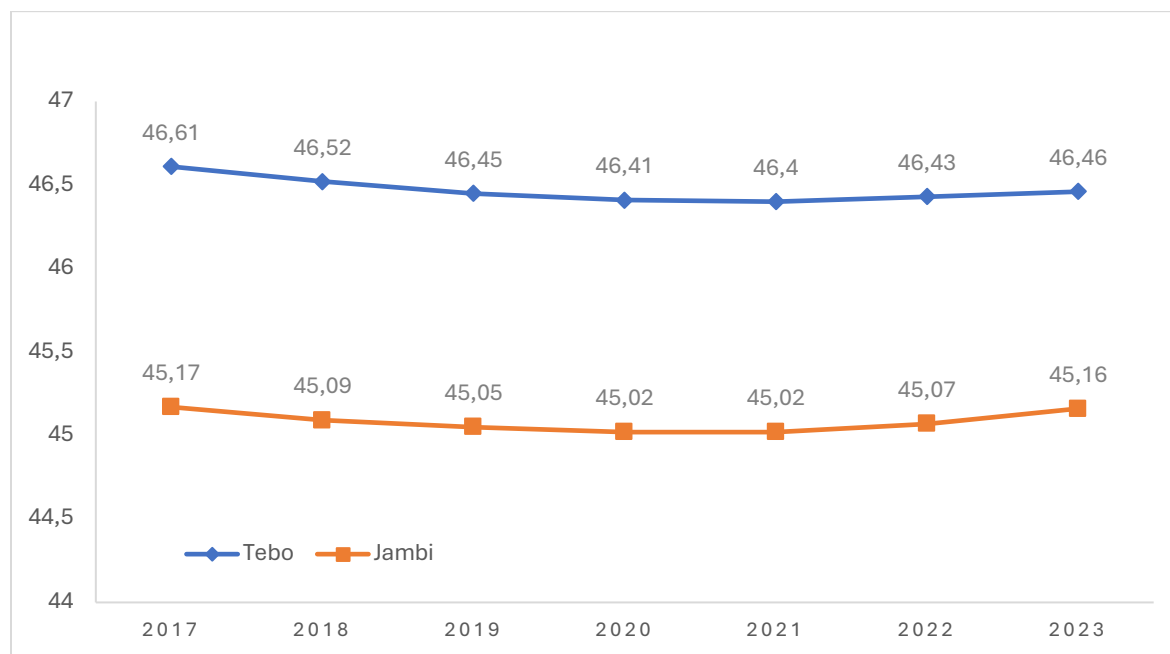
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Secara umum, TPAK Kabupaten Tebo mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung menurun, walaupun pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Tebo kembali mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, TPAK Kabupaten Tebo mengalami penurunan sebesar 0,04 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan penduduk usia kerja yang terserap di dunia kerja. Walaupun mengalami tren yang menurun, capaian TPAK Kabupaten Tebo secara konsisten berada di atas rata-rata TPAK Provinsi Jambi selama periode 2017 hingga 2023. hal lain yang perlu menjadi perhatian

pemerintah adalah memastikan serapan kerja yang tinggi disertai dengan penghasilan yang layak bagi masyarakat, sehingga selain dapat menekan angka pengangguran, serapan tenaga kerja juga turut menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo.

2.3.2.4 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan angka ketergantungan di Kabupaten Tebo selama periode 2017 hingga 2023.



Gambar 2. 50 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tebo mengalami tren yang cukup stagnan selama periode 2017 hingga 2023. Angka ketergantungan di Kabupaten Tebo hanya mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap 100

orang dengan usia produktif memiliki beban orang dengan usia non produktif yang relatif tidak banyak berubah. Angka ketergantungan di Kabupaten Tebo secara konsisten selalu berada di atas angka ketergantungan Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, setiap 100 orang produktif di Kabupaten Tebo memiliki tanggungan sekitar 46 orang dengan usia non produktif.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

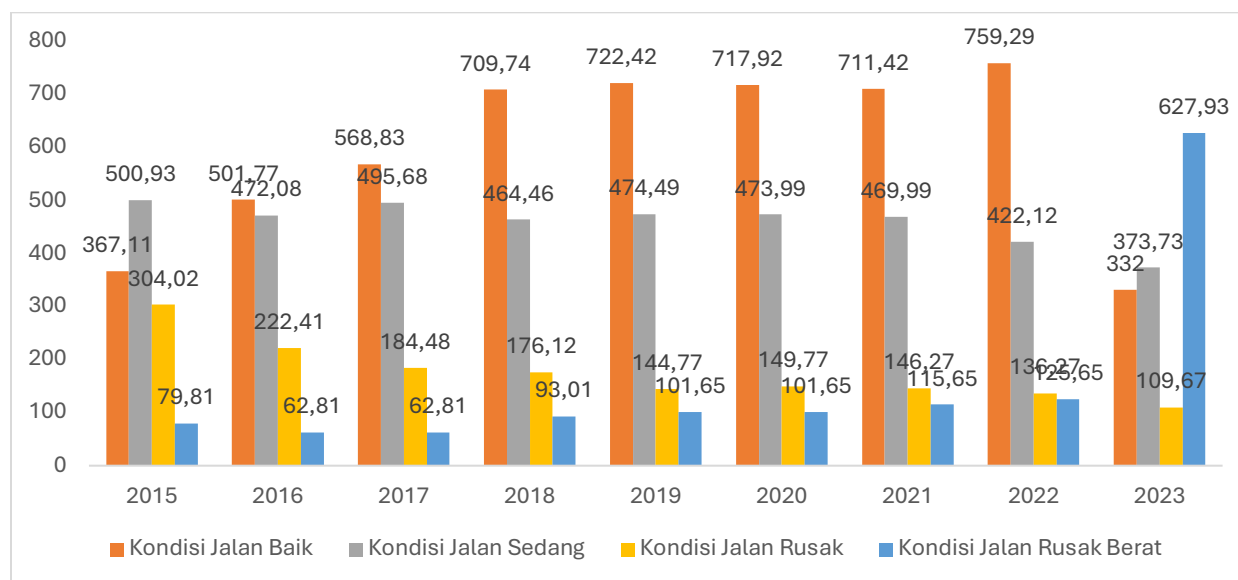
Kondisi fasilitas/infrastruktur daerah digunakan untuk menjelaskan kondisi daya saing daerah dengan menampilkan kondisi infrastruktur, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan. Penjelasan gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah eksisting sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Komponen indeks infrastruktur daerah digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan dukungan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lain.

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Tebo sesuai dengan perencanaan dalam dokumen tata ruang terdiri dari jaringan jalan, jaringan kereta api, serta jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Jaringan jalan di Kabupaten Tebo berdasarkan kelas jalannya terbagi menjadi Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Sedangkan jika dilihat dari fungsi jalannya antara lain jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kabupaten Tebo dilalui Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dengan Kabupaten Tebo. Jalur Lintas Sumatera juga menghubungkan pusat Pemerintahan Kabupaten Tebo dengan bandar udara di Kabupaten Bungo yang merupakan gerbang penghubung beberapa daerah di Sumatera bagian tengah.

Aksesibilitas wilayah Kabupaten Tebo didukung dengan adanya Terminal penumpang tipe C yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang serta terminal barang yang berada di Kecamatan Tebo Tengah. Jaringan transportasi darat di Kabupaten Tebo juga akan diperkuat dengan adanya jaringan kereta api yang menghubungkan antar kota dengan dilengkapi stasiun penumpang di Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tebo

Irir. Alur pelayaran sungai dan danau merupakan Alur Pelayaran Kelas II yang dilengkapi dengan pelabuhan sungai dan danau pengumpan yang terdapat di Kecamatan Tebo Tengah.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Tebo berdasarkan kewenangannya terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Total panjang jalan pada tahun 2021-2023 mencapai 1.693,33 Km, jumlah ini berkurang sebanyak 45 Km dibandingkan tahun 2019-2020. Jalan yang terdapat di Kabupaten Tebo didominasi oleh jalan kewenangan kabupaten yakni mencapai 85,24% dari keseluruhan jalan terbangun.



Gambar 2. 51 Kondisi jalan kewenangan Kabupaten Tebo Berdasarkan Kondisi Tahun 2015-2023 (Km)

Sumber: Kabupaten Tebo dalam Angka, 2016-2024

Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya meningkatkan mutu jalan, tercatat hingga tahun 2023 capaian jalan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 52,61% atau 759,29 Km. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik karena proporsi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat terus mengalami penurunan. Masih terdapat ruas jalan dengan material kerikil dan tanah. Belum optimalnya penganggaran sekaligus luasnya wilayah Tebo menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan. Hal inilah yang harus menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan masyarakat.

Lingkungan permukiman di Kabupaten Tebo memiliki luasan sebesar 33,65 persen atau 19.340 ha dibanding keseluruhan wilayah Kabupaten Tebo sebesar 57.482 ha. Pada tahun 2020 jumlah unit rumah yang terdapat di Kabupaten Tebo kurang lebih sebanyak 87.559 Unit sedangkan jumlah Backlog rumah ada +2.105 unit dan untuk rumah tidak layak huni sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT) dari di Kabupaten Tebo pada tahun 2020 terdapat 6.134 unit, nilai indikator rumah layak huni adalah 91,94 persen.

Tabel 2. 23 Kondisi Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tebo

No	Perumahan dan Permukiman	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tangga yang sudah terakses air bersih		56.92%	57.23%	58.72%			
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		85.19%	85.80%	86.16%			
3	Persentase Rumah Layak Huni		94.57%	94.59%	91.94%			
4	Persentase kawasan kumuh		98.90%	98.91%				

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Cakupan pelayanan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Kabupaten Tebo terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi pada tahun 2020 berturut-turut adalah 58,72% dan 86,16%. Cakupan layanan air bersih dinilai masih rendah, karena baru setengah rumah tangga di Kabupaten Tebo yang telah memiliki akses. Sedangkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan rumah terbangun.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi daerah dapat dinilai melalui beberapa indikator. Indikator yang dapat digunakan untuk mencermati daya saing iklim investasi di antaranya adalah realisasi investasi daerah dan kondusivitas daerah. Tinggi rendahnya investasi dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena investasi dapat mendorong peningkatan produksi, perluasan lapangan kerja, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat memberikan dampak ikutan lainnya pada kehidupan masyarakat setempat. Berikut adalah realisasi investasi di Kabupaten Tebo dengan data awal di tahun 2017 dan data termutakhir di tahun 2023.

Tabel 2. 24 Realisasi Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tebo Tahun 2017-2023

Indikator		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)		2.619,13	2.302,26	10,37	9,81	241	265,98
2	Jumlah Investor PMDN		24	36	16	13	36	38
3	Jumlah Investor PMA		2	1	-	-	6	3
4	Tenaga Kerja		12.483	3.458	211	119	-	-

Sumber: RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

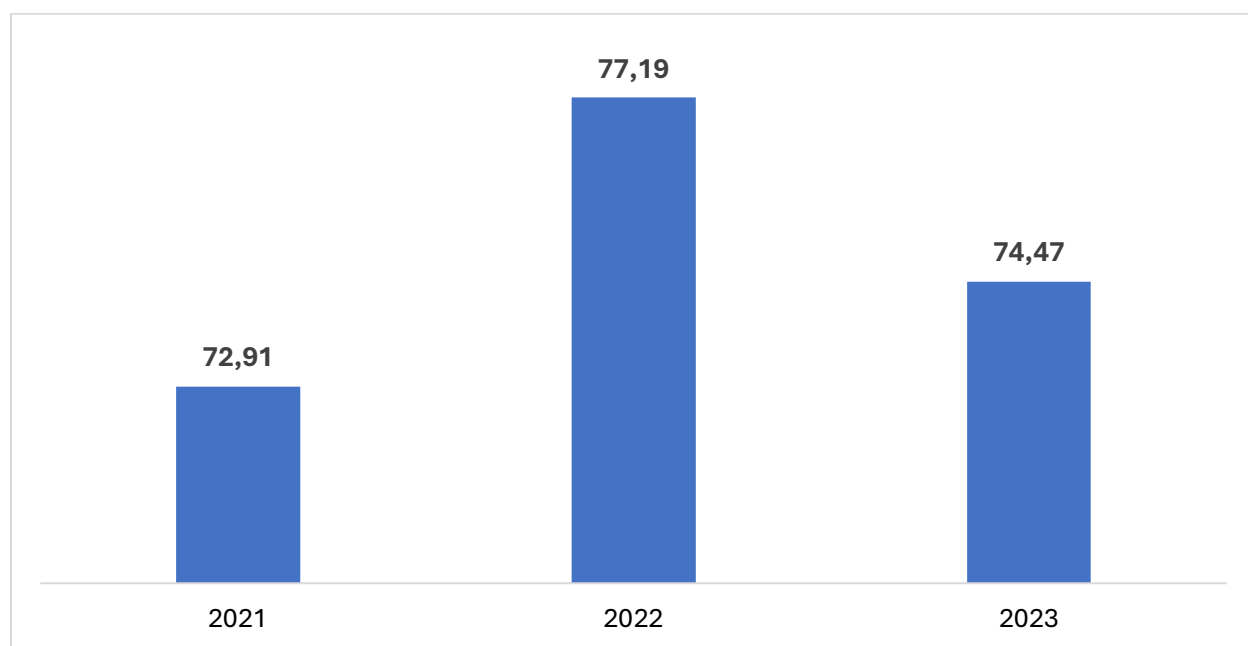
Realisasi investasi di Kabupaten Tebo mengalami tren yang menurun. Investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tebo didominasi oleh investasi dalam negeri sedangkan investasi asing yang masuk di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2022. Jika dilihat dari nilai investasinya, jumlah modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri. Kondisi tersebut dapat dilihat dari turunnya nilai investasi pada tahun 2020 yang mencapai 99,54 persen dibandingkan tahun 2019 dimana pada tahun 2020 tidak ada investasi asing yang masuk ke Kabupaten Tebo. Kondisi serupa juga ditunjukkan pada tahun 2021 dimana jumlah investor yang masuk mengalami penurunan sehingga menyebabkan penurunan nilai investasi sebesar 5,40 persen. Pada periode 2022-2023, investasi di Kabupaten Tebo kembali meningkat dengan meningkatnya nilai pertumbuhan investasi di Kabupaten Tebo dimana pada tahun 2023 investasi yang masuk sebesar 265,98 Milyar Rupiah yang berasal dari 38 PMDN dan 3 PMA.

Selain itu, daya saing iklim investasi juga dapat memperhatikan kondusivitas daerah. Kondusivitas daerah menjadi salah satu faktor penentu bagi para investor untuk menanamkan modalnya karena hal ini akan menentukan sejauh mana biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional. Kondusivitas daerah dapat direpresentasikan dengan indeks demokrasi, indeks rasa

aman, indeks ketenteraman dan ketertiban, indeks kerukunan umat beragama, dan indeks daya saing daerah. Berikut adalah penjabaran dari seluruh indikator tersebut.

2.3.4.1 Indeks Demokrasi

Perhitungan Indeks Demokrasi di Kabupaten Tebo masih menggunakan proksi angka dari Provinsi Jambi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia secara umum, dan di masing-masing wilayah secara khusus. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek yang terdiri dari 11 variabel dan terbagi menjadi 28 indikator. Tiga aspek utama pembentuk IDI adalah: aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Berikut merupakan capaian Indeks Demokrasi Provinsi Jambi Tahun 2021-2023:



Gambar 2. 52 Grafik Indeks Demokrasi Provinsi Jambi tahun 2021-2023

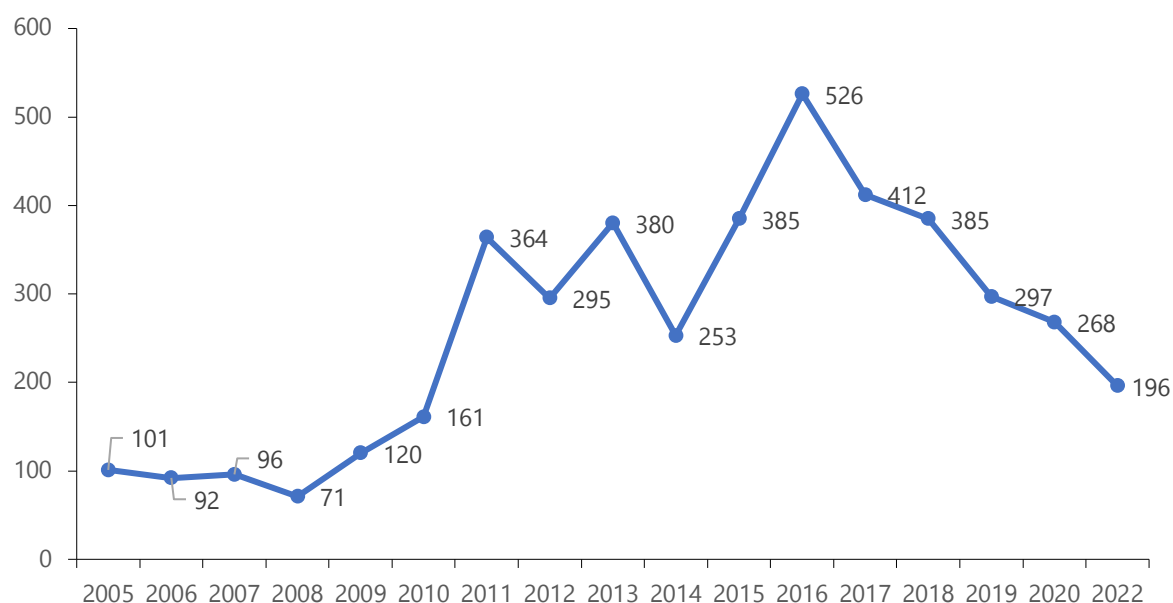
Sumber: BPS Indonesia, 2024

Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Peningkatan skor IDI yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,28 poin, lalu turun sebesar 2,72 poin pada tahun 2023. Capaian terakhir pada tahun 2023 sebesar 74,47 memperoleh predikat sedang. Capaian IDI Provinsi Jambi ini dapat menjadi gambaran mengenai keberlangsungan demokrasi di kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Tebo. Agar indeks demokrasi di Jambi, khususnya di Kabupaten

Tebo terus dapat meningkat di tahun-tahun selanjutnya perlu perhatian serius pada beberapa aspek pembentuk IDI ini, seperti indikator hak-hak politik, lembaga demokrasi, dan ancaman kekerasan.

2.3.4.2 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Tebo, iklim investasi perlu diciptakan sekondusif mungkin. Kondusivitas daerah menjadi salah satu faktor penentu bagi para investor untuk menanamkan modalnya karena hal ini akan menentukan sejauh mana biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional. Kondusivitas daerah dapat dinilai dengan indikator angka kriminalitas sebagai proksi perhitungan indeks ketenteraman dan ketertiban. Angka kriminalitas seringkali memiliki korelasi dengan tingkat kondusivitas iklim investasi di berbagai daerah karena akan mempengaruhi besarnya biaya keamanan, biaya transportasi, bahkan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Data mengenai angka kriminalitas dalam dokumen Kabupaten Tebo Dalam Angka, direpresentasikan melalui data terkait jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Tebo. Berikut ini merupakan catatan seri data tindak pidana di Kabupaten Tebo dengan data awal tahun 2005 dan data termutakhir di tahun 2022.



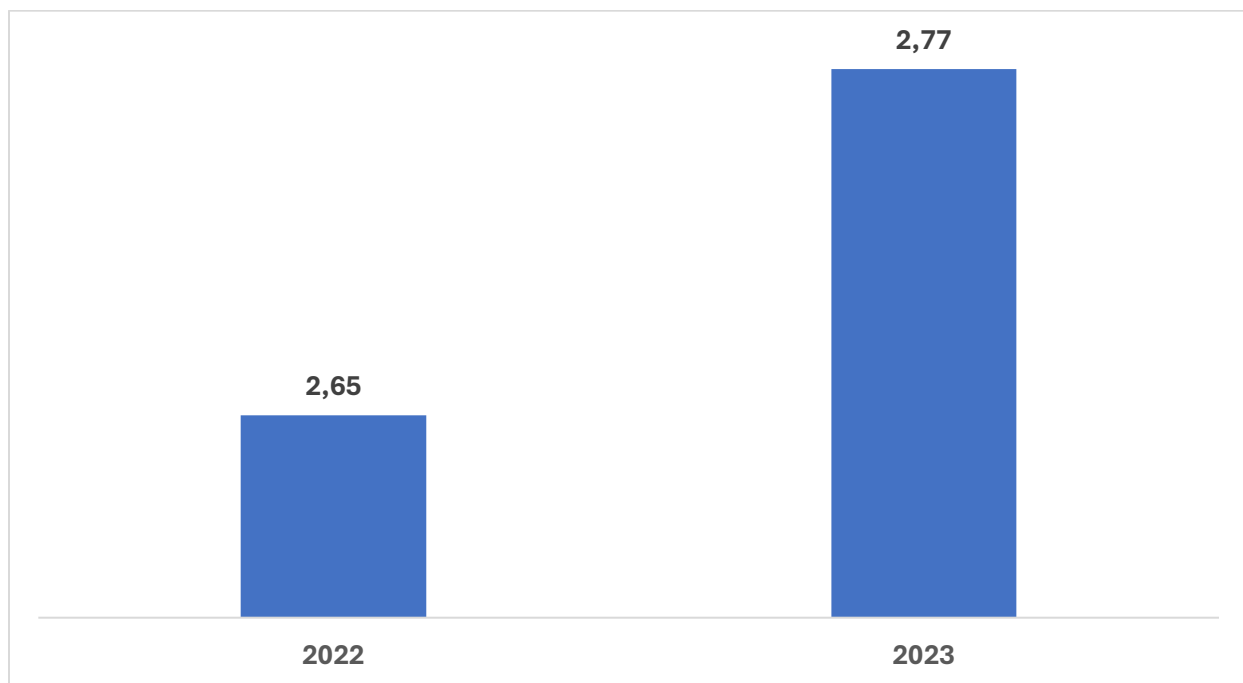
Gambar 2. 53 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Kabupaten Tebo Tahun 2005-2022

Sumber: Kabupaten Tebo Dalam Angka 2006-2023

Jumlah tindak pidana sebagai salah satu proksi yang menilai kondusivitas iklim investasi daerah. Jumlah tindak pidana di Kabupaten Tebo mengalami tren fluktuatif dari tahun 2005 hingga 2022. Jumlah tindak pidana menurun secara berkesinambungan dari tahun 2016 hingga tahun 2022, sebanyak 216 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Tebo semakin baik.

2.3.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing dalam iklim investasi, khususnya dalam konteks daerah sangat dipengaruhi oleh daya saing daerah tersebut. Salah satu determinan dalam melihat daya saing daerah adalah menggunakan indikator indeks daya saing daerah (IDSD). Indeks daya saing daerah adalah sebuah instrumen untuk mengukur daya saing pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing ISD terletak pada kemampuannya dalam mengkombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri, dan perspektif makro di level institusi publik. Berikut merupakan capaian IDSD Kabupaten Tebo tahun 2022 hingga 2023.



Gambar 2. 54 Indeks Daya Saing Daerah Kab. Tebo 2022-2023

Sumber: BRIN, 2024

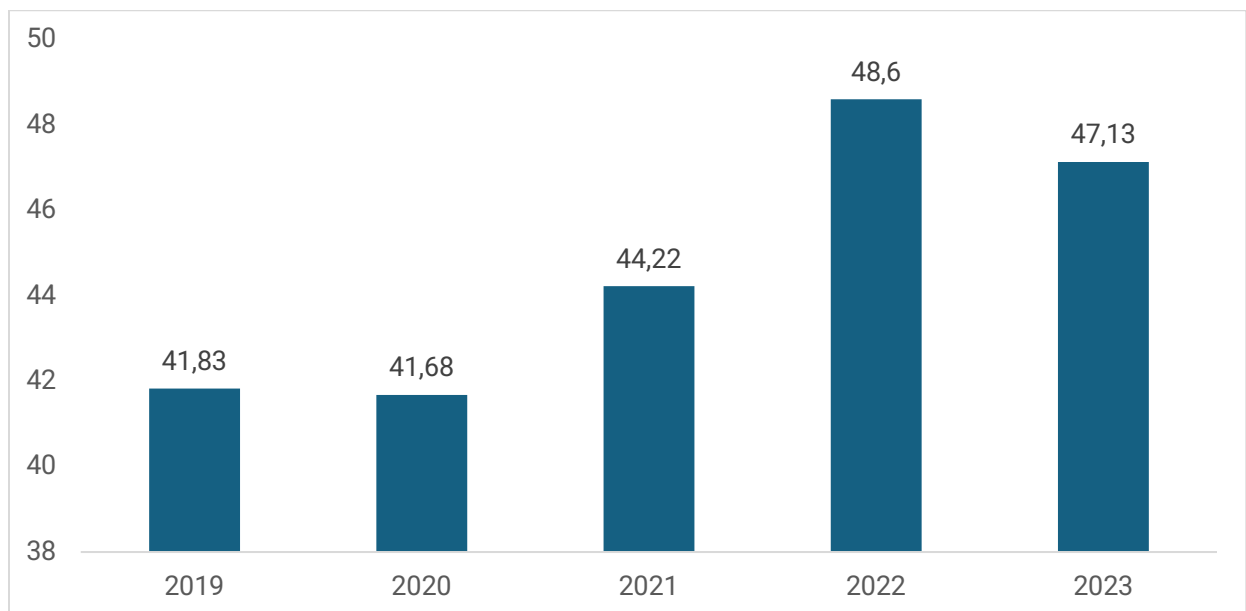
Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tebo mengalami peningkatan sebesar 0,12 pada tahun 2023. Capaian yang masih relatif rendah ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas pendidikan yang masih belum optimal, tantangan geografis, dan beberapa tantangan lainnya. Peningkatan IDSD pada tahun 2023 ini tetap wajib diapresiasi sekaligus dikawal dengan semangat untuk terus dapat meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Tebo. Peningkatan ini menunjukkan upaya serius dalam perbaikan berbagai aspek yang mempengaruhi capaian IDSD seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan optimalisasi SDM. Peningkatan ini perlu terus dikawal secara serius oleh seluruh stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Tebo. Daya saing daerah yang baik, serta iklim investasi yang optimal akan berdampak bagi pembangunan daerah yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bagian yang menjelaskan terkait penyelenggaraan tata kelola pemerintahan suatu daerah. Indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Inovasi Daerah. Berikut merupakan penjabaran dari keempat indikator tersebut.

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dapat digambarkan dengan beberapa indikator seperti: Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks SPBE, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit di Kabupaten Tebo. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berikut disajikan capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023:



Gambar 2. 55 Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

Sumber: Bappeda Kabupaten Tebo

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tebo pada tahun 2023 sebesar 47,13, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 48,6, sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,47 poin. Capaian tersebut memiliki predikat C, yang artinya kurang dan diperlukan perbaikan sistem dan tatanan pemerintahan di Kabupaten Tebo. Indikator selanjutnya yang berfungsi sebagai indikator komposit IRB adalah Opini BPK, indikator ini menjadi penting karena sangat menentukan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Opini BPK sering digunakan sebagai panduan laporan keuangan daerah yang berdasarkan beberapa kriteria seperti: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK Kabupaten Tebo sejak tahun 2017 selalu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan tabel di bawah:

Tabel 2. 25 Opini BPK Kabupaten Tebo 2017-2023

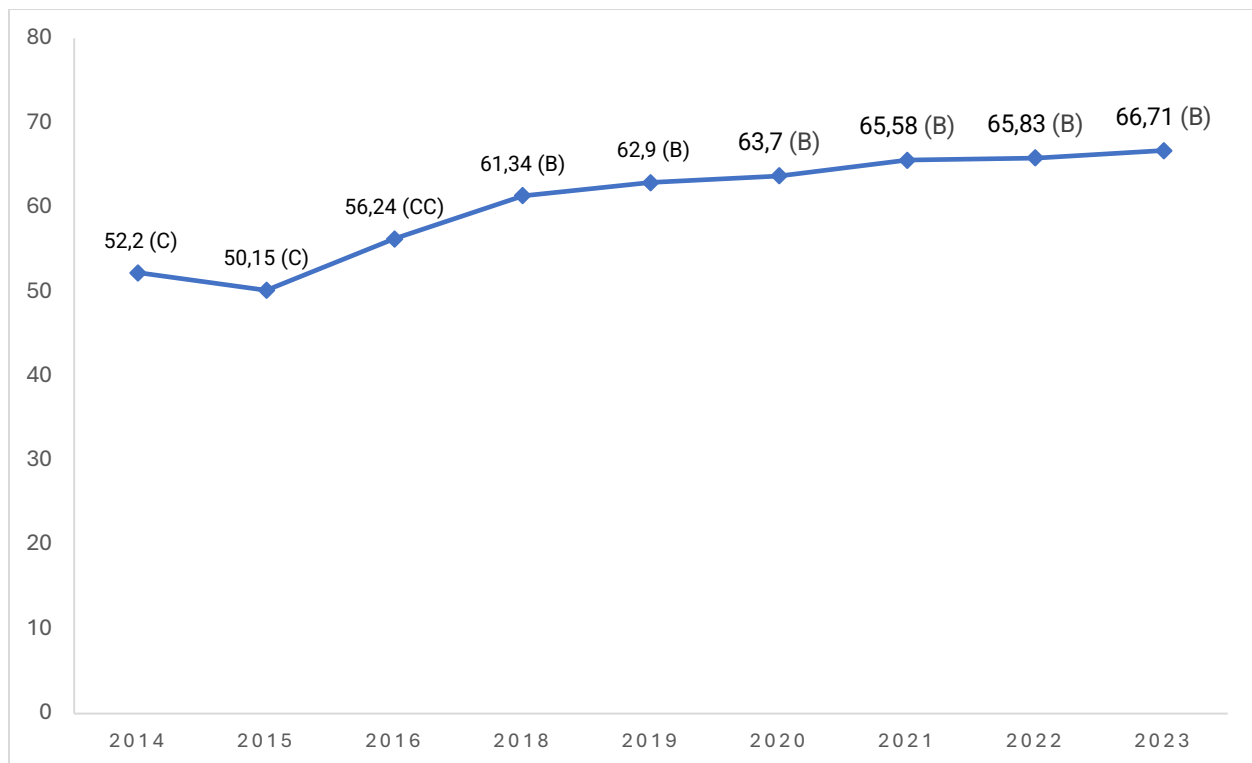
Opini BPK	
Tahun	Predikat
2017	WTP

Opini BPK	
Tahun	Predikat
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber: LKJIP dan Bappeda Kabupaten Tebo, 2024

Opini BPK yang selalu konsisten memperoleh WTP sejak tahun 2017 dapat digunakan sebagai modal yang sangat berharga oleh Kabupaten Tebo guna menjaga dan memperbaiki akuntabilitas tata kelola pemerintahannya agar makin baik. Laporan keuangan yang baik dibuktikan dengan predikat WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentu menjadi modal yang sangat baik guna menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator selanjutnya yang merupakan bagian penting dari IRB adalah Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Implementasi SAKIP adalah bagian tidak terpisahkan dari transformasi budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran serta berorientasi pada hasil (*outcome-based*). Berikut grafik pencapaian nilai SAKIP Kabupaten Tebo dari tahun 2014 hingga 2023:



Gambar 2. 56 Nilai SAKIP Kabupaten Tebo Tahun 2014-2023

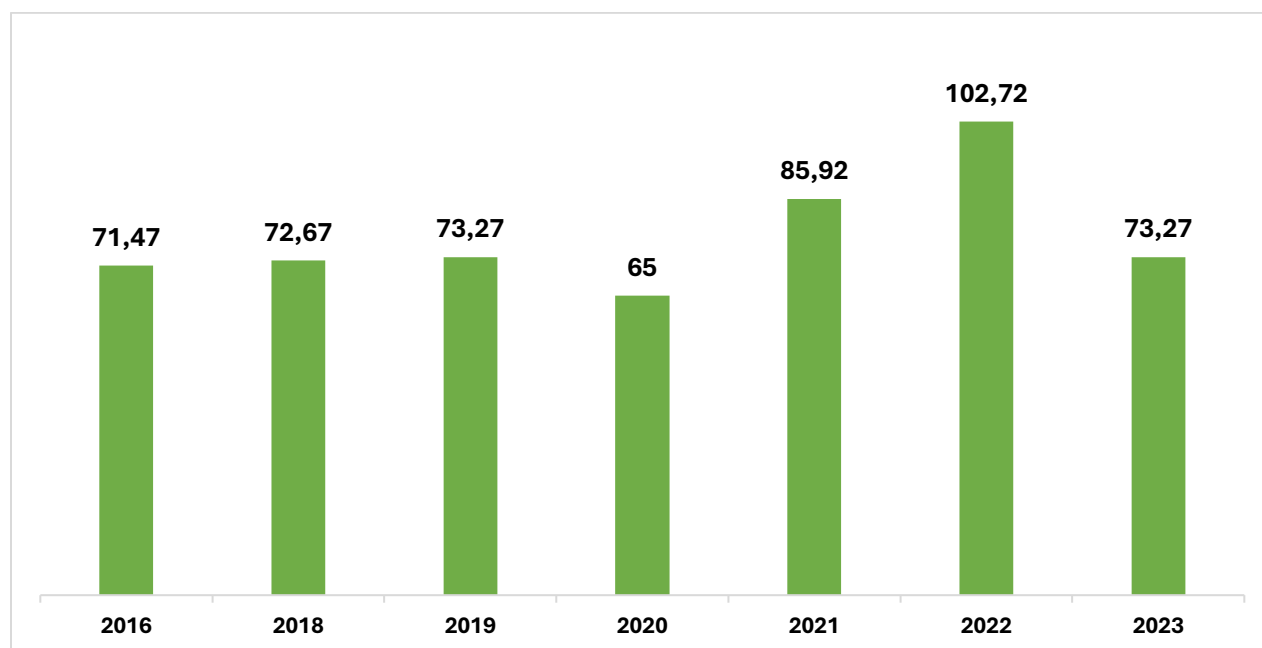
Sumber: LKJIP dan Bappeda Kabupaten Tebo

Nilai SAKIP Kabupaten Tebo pada dasarnya mengalami peningkatan yang konsisten dan cukup signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2023, walaupun masih memperoleh predikat B. Ada peningkatan sebesar 3,81 poin dari tahun 2019 ke 2023 yang menunjukkan bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, walaupun tetap masih memerlukan perbaikan, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dapat dilaksanakan sampai dengan level eselon pada setiap unit kerja. Dengan capaian yang sudah baik dan tren positif yang terus menunjukkan peningkatan akuntabilitas, SAKIP dapat menjadi salah satu komponen pendongkrak berjalannya reformasi birokrasi di Kabupaten Tebo.

2.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah. Data kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

dengan berdasarkan pada perbandingan antara harapan dan kebutuhan. Berikut merupakan indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tebo tahun 2016-2023:



Gambar 2. 57 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tebo Tahun 2016-2023

Sumber: LKJIP dan Bappeda Kabupaten Tebo

IKM Kabupaten Tebo selalu menunjukkan tren peningkatan yang positif sejak tahun 2016, walaupun ada anomali berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 73,27. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tebo yang tinggi pada tahun 2022 dengan skor 102,72 dikarenakan diresmikannya Mal Pelayanan Publik pada tahun 2022. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tebo yang sudah masuk dalam kategori tinggi ini dapat menjadi modal penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, akuntabel, dan benar-benar melayani kebutuhan masyarakat.

2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu indikator penting khususnya pada bidang digitalisasi tata kelola pemerintah. Indeks SPBE adalah indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan penerapan digitalisasi sektor pemerintah yang berkaitan langsung dengan reformasi birokrasi. Berikut merupakan hasil indeks SPBE Kabupaten Tebo dari tahun 2018 hingga 2023:

Tabel 2. 26 Indeks SPBE Kabupaten Tebo Tahun 2018-2023

Tahun	Indesk SPBE	Predikat
2018	1,27	Kurang
2019	1,61	Kurang
2020	-	Tidak dilaksanakan evaluasi SPBE
2021	1,97	Cukup
2022	2,11	Cukup
2023	2,62	Baik

Sumber: Bappeda dan Litbang, 2024

Kondisi digitalisasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten Tebo terbilang mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 sebesar 1,01 poin. Pada awal tahun 2018, indeks SPBE Kabupaten Tebo masih menunjukkan kondisi yang kurang tetapi dengan konsistensi yang baik mengalami peningkatan hingga memperoleh predikat cukup pada tahun 2022 dan berakhir memiliki predikat baik pada tahun 2023. Tahun 2020 tidak dilaksanakan evaluasi SPBE oleh Kementerian PAN-RB sehingga tidak ada skor SPBE pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, Kabupaten Tebo berhasil mencapai skor 2,62 dengan predikat baik.

Capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan daerah. Skor tersebut mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Tebo dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Implementasi SPBE yang baik di Kabupaten Tebo tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, guna mencapai kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

2.4.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sebuah instrumen untuk mengukur penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatasi permasalahan dan menangkap peluang potensi daerah. Dalam konteks daya saing iklim investasi, skor indeks inovasi daerah ini penting utamanya dalam menyajikan informasi

distribusi tingkat inovasi daerah. Indeks inovasi daerah juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah kedepannya. Berikut merupakan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Tebo tahun 2021 hingga 2023:

Tabel 2. 27 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tebo

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Predikat
2021	34,63	inovatif
2022	49,31	inovatif
2023	47,76	inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Tebo tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya penerapan inovasi daerah Kabupaten Tebo telah memperoleh predikat inovatif. Indeks inovasi daerah Kabupaten Tebo mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 sebesar 14,68 poin, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 1,55 poin dengan predikat yang tetap inovatif. Penurunan nilai inovasi daerah ini mengindikasikan adanya penerapan inovasi, penyelenggaraan, dan pelayanan pemerintahan yang belum tepat sasaran. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk dapat terus mempertahankan capaian inovatif ini serta terus meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam bidang tata kelola pemerintahan agar dapat memperoleh capaian sangat inovatif pada tahun-tahun berikutnya. Daerah dengan indeks inovasi daerah yang relatif tinggi tentu akan menarik investor datang dan membuat iklim investasi daerah semakin kondusif.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Kabupaten Tebo dalam lima tahun terakhir (2019-2023), dan kerangka pendanaan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lima tahun ke depan (2025-2029). Gambaran keuangan daerah bertujuan menentukan kerangka pendanaan melalui identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja dan pengeluaran daerah agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun terakhir (2019-2023)

Gambaran ringkas keuangan daerah melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2019-2023. Kinerja pelaksanaan APBD berupa analisis terhadap realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Tebo sehingga gambaran pengelolaan keuangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan dan belanja daerah yang akan tertuang dalam Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan tentang jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam

periode tahun 2019-2023. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

Dalam kurun waktu 2019-2023, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 0,4 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan Belanja rata-rata 1,00 persen dengan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan mencapai 0,5 persen. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

No	Uraian	REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.157.280.009.284,13	1.085.601.955.507,19	1.173.873.076.528,30	1.175.441.007.742,28	1.213.245.434.539,33
4,1	Pendapatan Asli Daerah	83.236.373.472,25	78.459.424.382,75	92.915.275.640,96	86.173.512.980,28	91.771.064.563,33
4,2	Pendapatan Transfer	1.020.452.558.800,72	951.225.215.724,35	1.024.054.976.682,00	1.075.614.494.762,00	1.107.752.193.166,00
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.591.077.011,16	55.917.315.400,09	56.902.824.205,34	13.653.000.000,00	13.722.176.810,00
5	BELANJA	935.252.564.219,17	842.932.846.239,48	964.953.562.563,25	1.162.988.550.368,07	1.034.622.837.881,55
5,1	Belanja Operasi	665.142.858.843,47	671.389.054.966,06	740.017.958.805,14	774.488.457.062,07	791.966.564.746,55
5,2	Belanja Modal	269.093.691.375,70	139.855.988.043,42	222.212.719.378,11	387.530.343.306,00	242.656.273.135,00
5,3	Belanja Tidak Terduga	1.016.014.000,00	31.687.803.230,00	2.722.884.380,00	969.750.000,00	-
5,4	Belanja Transfer	184.583.010.208,00	178.850.484.732,00	180.806.720.902,00	175.838.080.838,00	189.347.746.142,00
	Surplus/Defisit	37.444.434.856,96	63.818.624.535,71	28.112.793.063,05	-163.385.623.463,79	-10.725.149.484,22
6	PEMBIAYAAN	35.153.881.145,89	61.097.716.002,85	120.416.340.538,56	276.247.599.395,98	91.535.866.734,22
6,1	Penerimaan Pembiayaan	71.825.239.445,89	72.598.316.002,85	124.916.340.538,56	286.885.299.396,98	112.862.075.932,22
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	36.671.358.300,00	11.500.600.000,00	4.500.000.000,00	10.637.700.001,00	21.326.209.198,00
	Pembiayaan Netto	35.153.881.145,89	61.097.716.002,85	120.416.340.538,56	276.247.599.395,98	91.535.866.734,22
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	72.598.316.002,85	124.916.340.538,56	148.529.133.601,61	112.861.975.932,19	80.810.717.250,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

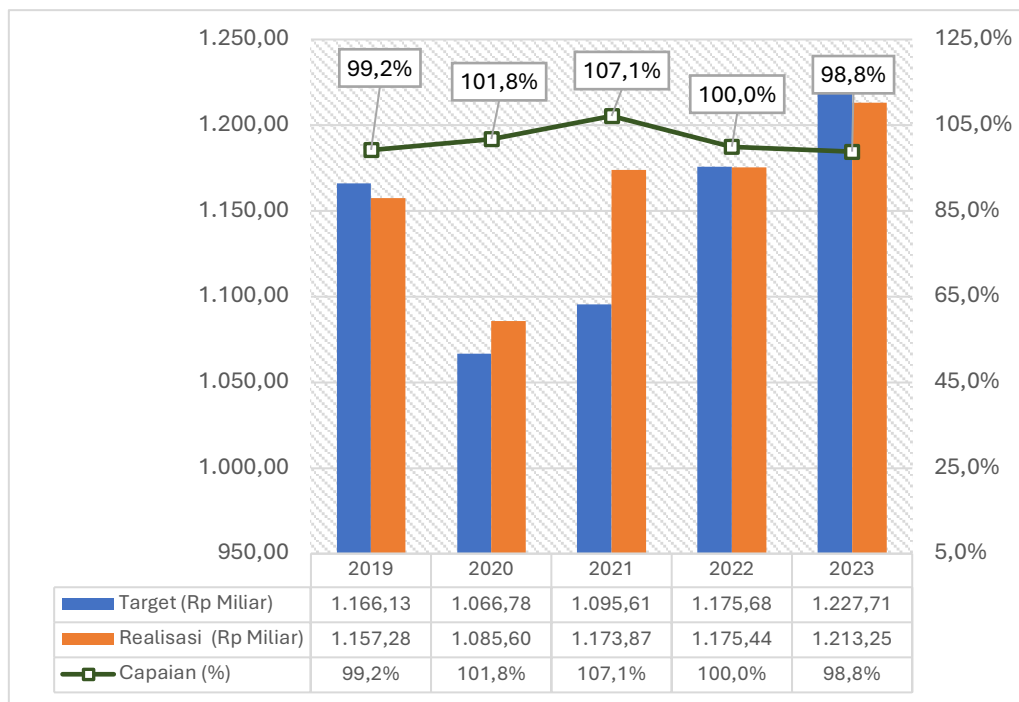
No	Uraian	PERTUMBUHAN REALISASI APBD LIMA TAHUN TERAKHIR					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	5,22%	-6,19%	8,13%	0,13%	3,22%	2,10%
4,1	Pendapatan Asli Daerah	9,29%	-5,74%	18,42%	-7,26%	6,50%	4,24%
4,2	Pendapatan Transfer	4,07%	-6,78%	7,66%	5,03%	2,99%	2,59%
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,02%	4,34%	1,76%	-76,01%	0,51%	-9,08%
5	BELANJA	6,42%	-9,87%	14,48%	20,52%	-11,04%	4,10%
5,1	Belanja Operasi	7,58%	0,94%	10,22%	4,66%	2,26%	5,13%
5,2	Belanja Modal	3,90%	-48,03%	58,89%	74,40%	-37,38%	10,35%
5,3	Belanja Tidak Terduga	-36,25%	3018,84%	-91,41%	-64,39%		706,70%
5,4	Belanja Transfer	10,25%	-3,11%	1,09%	-2,75%	7,68%	2,63%
	Surplus/Defisit	-30,16%	70,44%	-55,95%	-681,18%	-93,44%	-158,06%
6	PEMBIAYAAN	93,03%	73,80%	97,09%	129,41%	-66,86%	65,29%
6,1	Penerimaan Pembiayaan	49,11%	1,08%	72,07%	129,66%	-60,66%	38,25%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	22,42%	-68,64%	-60,87%	136,39%	100,48%	25,96%
	Pembiayaan Netto	0,27	0,70	1,33	-0,07	-1,61	0,12
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	1,08%	72,07%	18,90%	-24,01%	-28,40%	7,93%

Sumber: Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan belanja yang lebih besar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 2,10 persen sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 4,10 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran. Ketika belanja daerah meningkat lebih cepat daripada pendapatan, maka daerah berpotensi menghadapi defisit anggaran. Ini berarti jumlah uang yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah uang yang masuk, yang bisa memaksa daerah untuk mengurangi cadangan kas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Tebo perlu mempertimbangkan langkah-langkah seperti meningkatkan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendapatan baru, dan merancang kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan agar pertumbuhan pendapatan dapat mengejar atau bahkan melampaui pertumbuhan belanja. Uraian mengenai kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, secara rinci dijelaskan pada sub bab bagian di bawah ini.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan target, realisasi dan capaian pendapatan daerah Kabupaten Tebo tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3. 1 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tebo pada periode tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dengan tren positif. Realisasi capaian pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 107,1 persen, terutama didukung oleh pendapatan transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer dimana pendapatan transfer pada tahun 2021 sebesar Rp 1,02 triliun. Realisasi capaian pendapatan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,8 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan lain-lain pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target anggaran sebesar Rp9,16 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah perlu hati-hati terhadap capaian realisasi pendapatan daerah yang bergantung pada sumber pendapatan transfer, mengingat perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat mempengaruhi pendapatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penting untuk memiliki proses perencanaan yang fleksibel, akurat, dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari PAD sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019–2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	77,09	83,24	3,43	9,29	107,98
2020	78,61	78,46	1,98	(5,74)	99,81
2021	73,68	92,92	(6,27)	18,42	126,10
2022	95,74	86,17	29,94	(7,26)	90,01
2023	96,87	91,77	1,18	6,50	94,73
Rata-rata	84,40	86,51	6,05	4,24	103,73

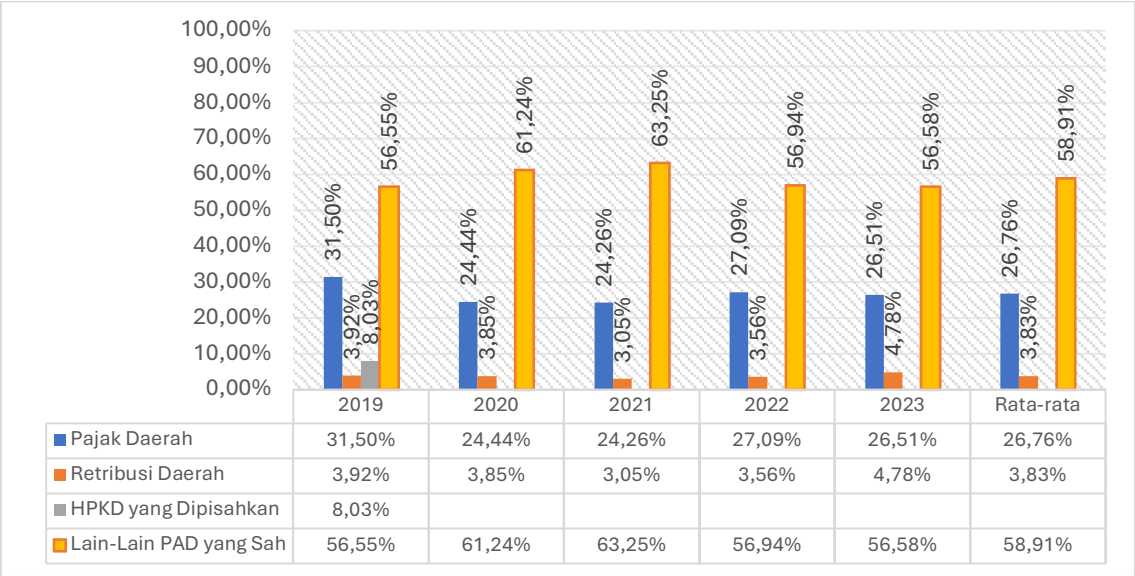
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi PAD Kabupaten Tebo mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,24 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 103,73 persen. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 18,42 persen, terutama didukung oleh meningkatnya pendapatan Pajak Daerah sebesar 17,56 persen dari Rp78,45 miliar pada tahun 2020 naik menjadi Rp92,91 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar minus 7,26 persen, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Lain-lain PAD yang sah dari Rp58,76 miliar menjadi Rp49,06 miliar.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi PAD menunjukkan realisasi PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni 1,81 persen dari target PAD yang rata-rata tumbuh sebesar 6,05 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan

anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan PAD cenderung menggunakan target yang pesimis.

Terkait dengan realisasi capaian PAD, berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besarnya kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3. 2 Kontribusi Masing-masing Komponen PAD Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas diperoleh gambaran PAD di Kabupaten Tebo dalam kurun waktu tahun 2019-2023 didominasi oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata 58,91 persen pertahun, kontribusi terbesar kedua berikutnya adalah Pajak Daerah dengan rata-rata 26,76 persen pertahun, sedangkan kontribusi rata-rata dari Retribusi Daerah dan HPKD yang dipisahkan masing-masing sebesar 3,38 persen dan 10,50 persen. Tingginya kontribusi lain-lain PAD yang sah mencerminkan potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Tebo. Untuk menjaga pentingnya keberlanjutan sumber pendapatan ini, maka secara periodik perlu diawasi agar tidak memberatkan sektor tertentu dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Secara rinci perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak

daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	20,01	26,22	10,53	19,54	131,01
2020	17,67	19,17	(11,71)	(26,87)	108,51
2021	17,87	22,54	1,16	17,56	126,10
2022	20,42	23,34	14,26	3,57	114,30
2023	22,09	24,32	8,18	4,20	110,09
Rata-rata			4,48	3,60	118,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 3,60 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 118 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 19,54 persen. Ditinjau dari besaran persentase pertumbuhan tertinggi berasal dari peningkatan pendapatan Pajak Hiburan sebesar 404,17 persen dari Rp1,2 juta pada tahun 2018 naik menjadi Rp6 juta pada tahun 2023. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 26,87 persen, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Rp7,72 miliar menjadi Rp1,39 miliar.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Pajak Daerah menunjukkan target Pajak Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni 0,88 persen dari realisasi Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 3,60 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang optimis.

Pajak Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 25,76 persen pertahun terhadap PAD. Pajak Daerah ini mencakup penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perkembangan realisasi Pajak Daerah selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
1. Pajak Hotel	0,05	0,03	0,04	0,04	0,09	25,08	0,21
2. Pajak Restoran	1,62	1,47	1,58	1,90	2,01	5,22	7,45
3. Pajak Hiburan	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	419,19	0,01
4. Pajak Reklame	0,33	0,48	0,45	0,48	0,55	10,68	2,01
5. Pajak Penerangan Jalan	13,73	13,00	15,90	16,17	17,03	5,49	66,03
6. Pajak Parkir	0,01	0,05	0,09	0,11	0,13	169,07	0,33
7. Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,01
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,56	0,28	0,49	0,46	0,30	-7,07	1,79
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,19	2,45	2,34	2,26	2,24	1,16	10,09
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7,73	1,40	1,64	1,90	1,96	11,38	12,06
Jumlah	26,21	19,16	22,53	23,33	24,31	3,60	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pendapatan terbesar dari pajak daerah dengan kontribusinya rata-rata mencapai 66,03 persen pertahun. Akan tetapi dari sisi rata-rata pertumbuhannya jumlah yang dikumpulkan dari pajak ini trendnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat Pajak Penerangan Jalan adalah komponen utama dari pendapatan pajak daerah, penurunan terus-menerus dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian dan tindakan strategis untuk mengatasi penurunan ini untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Selain pajak daerah, sumber PAD Kabupaten Tebo yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tebo adalah retribusi daerah. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	4,44	3,27	(9,99)	13,34	73,51
2020	4,47	3,02	0,69	(7,61)	67,45
2021	4,47	2,83	(0,12)	(6,19)	63,36
2022	3,91	3,07	(12,53)	8,52	78,60
2023	2,56	4,38	(34,62)	42,70	171,56
Rata-rata			(11,31)	10,15	90,90

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo mengalami rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 10,15 persen dengan realisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 90,90 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 42,70 persen, terutama didukung oleh meningkatnya pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 104,13 persen dari Rp104,79 juta pada tahun 2022 naik menjadi Rp213,91 juta pada tahun 2023. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 7,61 persen, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebesar minus 52,60 persen dari Rp132,55 juta menjadi Rp80 juta.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Retribusi Daerah menunjukkan target Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah, yakni minus 11,31 persen dari realisasi Retribusi Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 10,15 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan Pajak Daerah cenderung menggunakan target yang relatif pesimis.

Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,20 persen pertahun terhadap PAD. Retribusi ini mencakup penerimaan dari pelayanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dikelompokkan ke dalam jenis retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang mencakup: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar,

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

2. Retribusi Jasa Usaha, yang mencakup: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Besarnya kontribusi retribusi mencerminkan pentingnya layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah dan upaya untuk membiayai sebagian besar layanan tersebut melalui retribusi. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019-2023

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
A. Retribusi Jasa Umum	2,76	2,57	2,29	2,41	3,84	17,54	92,14
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,21	2,07	1,68	1,78	3,25	20,92	57,84
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,10	0,12	0,12	0,11	0,12	3,80	3,48
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	31,86	1,76
4. Retribusi Pelayanan Pasar	0,29	0,30	0,38	0,36	0,33	14,23	9,29
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,10	0,02	0,02	0,06	0,04	28,16	1,71
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,03	0,03	0,04	6,65	0,32
B. Retribusi Jasa Usaha	0,37	0,37	0,50	0,56	0,32	-9,69	15,64
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,11	0,06	0,43	0,18	0,09	87,96	5,67
2. Retribusi Terminal	0,00	0,02	0,01	0,01	0,02	906,49	0,68
3. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,24	0,27	0,00	0,30	0,15	-39,06	8,17
4. Retribusi Rumah Potong Hewan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,55	0,73
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Retribusi Perizinan Tertentu	0,13	0,08	0,04	0,10	0,21	36,16	3,05
1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-20,00	0,03
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,14	0,13	0,08	0,04	0,10	0,21	3,01

Rincian	Realisasi Retribusi Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan	Proporsi
4. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3,27	3,02	2,83	3,07	4,38	10,12	110,82

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2019–2023, pendapatan dari Retribusi Jasa Umum merupakan sumber pendapatan terbesar dari retribusi daerah dengan kontribusinya rata-rata mencapai 92,14 persen dan menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 17,54 persen pertahun. Dengan kontribusi lebih dari separuh total retribusi yang diimbangi dengan pertumbuhan yang pesat menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor ini sangat penting bagi keuangan daerah. Pertumbuhan yang pesat dalam Retribusi Jasa Umum bisa menjadi indikator peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Tebo, seperti pertumbuhan sektor bisnis, konstruksi, dan investasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem kebijakan, memperbaiki layanan, dan memastikan kepatuhan untuk terus memaksimalkan pendapatan dari sumber ini.

Selanjutnya, untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tebo yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Tebo adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,38 persen pertahun terhadap PAD. Kontribusi tersebut diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tebo. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2019-2023 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	6,68	6,68	(4,56)	8,38	100,00
2020	8,22	8,22	23,06	23,06	100,00
2021	8,62	8,78	4,79	6,76	101,88
2022	10,69	10,69	24,12	21,83	100,00
2023	11,14	11,14	4,17	4,17	100,00

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Rata-rata			10,32	12,84	100,38

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tebo mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan minus 12,84 persen pertahun. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 23,06 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 4,17 persen. Sementara itu, dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 100,38 persen selama kurun waktu 2019-2023. Secara keseluruhan capaian kerja selama 2019-2023 cukup efisien dengan ditandai dengan capaiannya paling rendah 100 persen.

Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki rata-rata pertumbuhan sedikit lebih tinggi, yakni 2,52 persen dari realisasi yang rata-rata tumbuh sebesar 10,32 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah cukup baik namun masih diperlukan usaha lain untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya.

Untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Tebo adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan ini memberikan kontribusi terbesar yaitu rata-rata sebesar 58,91 persen pertahun. Kontribusi tersebut diperoleh dari Hasil Penjualan dan pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda (Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah); Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Pendapatan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019–2023.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	45,95	47,07	3,29	4,18	102,44
2020	48,25	48,05	5,00	2,07	99,59
2021	42,72	58,77	(11,45)	22,31	137,55
2022	60,72	49,06	42,11	(16,51)	80,81
2023	61,08	51,92	0,61	5,83	85,00
Rata-rata			7,91	3,58	101,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas untuk realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Tebo memperlihatkan perkembangan yang cukup selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan sebesar 3,58 persen. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 22,31 persen, serta realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan minus 16,51 persen. Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 101,08 persen dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 137,55 persen, sedangkan untuk capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar 80,81 persen dari target proyeksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi menunjukkan target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,91 persen dan realisasi pertumbuhan rata-rata sebesar 3,58 persen. Data ini memperlihatkan bahwa ada tren positif dalam penetapan target pendapatan lain-lain, realisasi pendapatan tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pemungutan pendapatan meskipun target yang ditetapkan konservatif antisipasi penurunan

dalam pendapatan, atau faktor eksternal yang mempengaruhi proyeksi pendapatan.

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan Daerah selain PAD adalah Pendapatan Transfer. Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 106 Ketentuan UU 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Berikut ini adalah target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

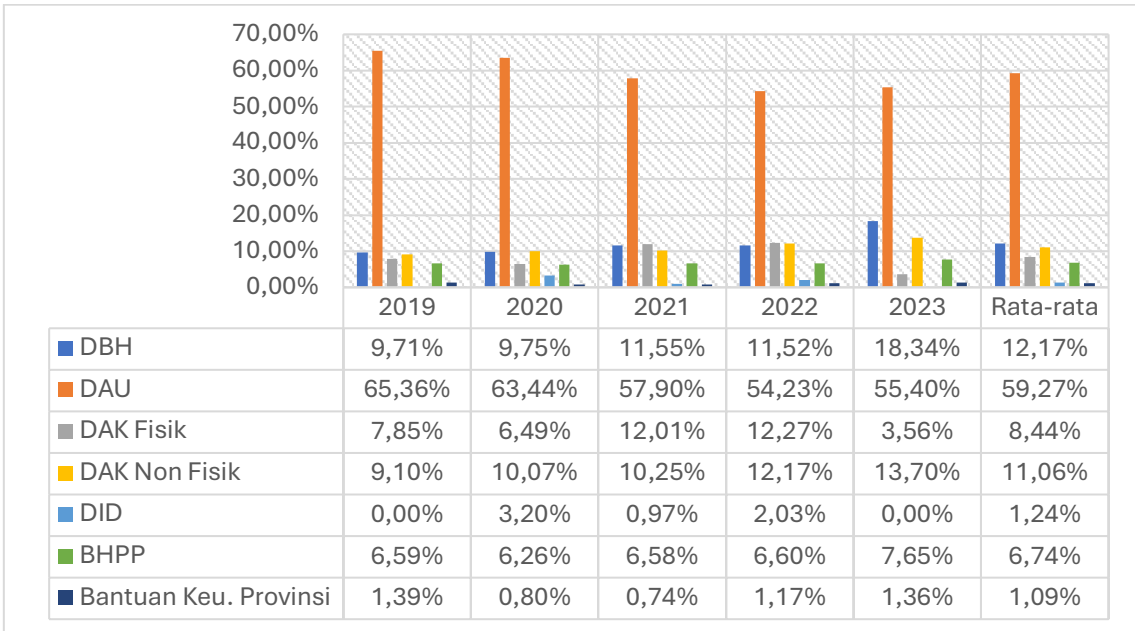
Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	1.039,57	1.020,45	6,22	4,07	98,16
2020	938,58	951,23	(9,71)	(6,78)	101,35
2021	976,25	1.024,05	4,01	7,66	104,90
2022	1.079,94	1.075,61	10,62	5,03	99,60
2023	1.114,34	1.107,75	3,19	2,99	99,41
Rata-rata			2,86	2,59	100,68

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,59 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,66 persen, terutama didukung oleh Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan pertumbuhan sebesar 13,44. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar minus 6,78 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang menurun sebesar 23,86 persen.

Sementara itu, rata-rata realisasi capaian kinerja pendapatan transfer Kabupaten Tebo mencapai 100,68 persen dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 104,90 persen, sedangkan realisasi capaian kinerja terendah untuk pendapatan transfer Kabupaten Tebo terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat capaian sebesar 98,16 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan.

Adapun rincian pendapatan transfer yang terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID) dan (b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer selama kurun waktu Tahun 2019-2023 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3. 3 Kontribusi Masing-masing Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Pendapatan Transfer di Kabupaten Tebo dalam kurun waktu tahun 2019-2023 didominasi oleh komponen DAU dengan rata-rata 59,27 persen pertahun. Dengan dominasi DAU, perencanaan keuangan Kabupaten Tebo harus mempertimbangkan prediksi dan ketepatan penerimaan DAU. Pengelolaan

keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil yang mencakup dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	100,57	88,86	50,94	(5,07)	88,35
2020	65,53	82,10	(34,85)	(7,61)	125,29
2021	59,32	105,45	(9,47)	28,44	177,77
2022	92,35	112,31	55,68	6,51	121,62
2023	188,00	182,51	103,58	62,50	97,08
Rata-rata			33,18	16,95	122,02

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kabupaten Tebo cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 16,95 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 62,50 persen dengan capaian kinerja mencapai 97,08 persen, tingginya pertumbuhan ini terutama didukung oleh pendapatan yang bersumber dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dengan pertumbuhan sebesar 443,30 persen. Realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 7,61 persen dengan capaian kinerja 171,94 persen. Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan turunnya pendapatan bersumber dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan pertumbuhan sebesar minus 73,70 persen.

Selain dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak, komponen dana perimbangan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan Kabupaten Tebo adalah dana alokasi umum (DAU). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dana alokasi umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo

selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	598,30	598,30	2,74	2,74	100,00
2020	536,52	534,45	(10,32)	(10,67)	99,61
2021	528,39	528,39	(1,52)	(1,13)	100,00
2022	528,68	528,75	0,06	0,07	100,01
2023	547,19	551,26	3,50	4,26	100,74
Rata-rata			(1,11)	(0,95)	100,07

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Transfer DAU Kabupaten Tebo cenderung berfluktuasi selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar minus 0,95 persen. Realisasi Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,26 persen dengan capaian kinerja mencapai 100,74 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang turun sebesar 10,67 persen dengan capaian kinerja 99,61 persen. Meskipun demikian, untuk realisasi capaian kinerja DAU Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2019-2023. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi capaian kinerja yang mencapai 100,07 persen yang berarti capaian kinerja untuk dana alokasi umum (DAU) relatif sudah mendekati sesuai dengan proyeksi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi.

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan Dak Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari dana

alokasi khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	170,63	155,16	22,02	18,88	90,94
2020	145,86	139,51	(14,51)	(10,09)	95,65
2021	204,03	203,15	39,88	45,61	99,57
2022	262,29	238,30	28,56	17,30	90,85
2023	176,91	171,74	(32,55)	(27,93)	97,08
Rata-rata			8,68	8,75	94,82

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,75 persen per tahun. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 94,82 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 99,57 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2023 menjadi capaian kinerja terendah untuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo dengan tingkat capaian sebesar 97,08 persen dari proyeksi target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Komponen Pendapatan Transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi dari DID yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Dana Insentif Daerah (DID) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	0,00	0,00			0,00
2020	26,93	26,93	0,00	0,00	100,00
2021	8,81	8,81	(67,30)	(67,30)	100,00
2022	19,78	19,78	124,62	124,62	100,00
2023	0,00	0,00			0,00
Rata-rata			19,11	19,11	60,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,11 persen per tahun selama periode 2020-2022. Namun jika dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk dana insentif daerah (DID) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup optimal dengan realisasi capaian kinerja mencapai 60 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi capaian kerja ini rendah dikarenakan pada tahun 2019 dan tahun 2023 capaian kinerja sebesar nol persen. Kondisi ini terjadi dikarenakan bila terdapat sisa dana, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan rencana penggunaan dan realisasi dari sisa dana DID tersebut untuk pendidikan (termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan), kesehatan (termasuk penanganan pandemi COVID-19 dan digitalisasi pelayanan kesehatan), pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial.

3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kabupaten Tebo untuk target dan realisasi selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tebo, Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)

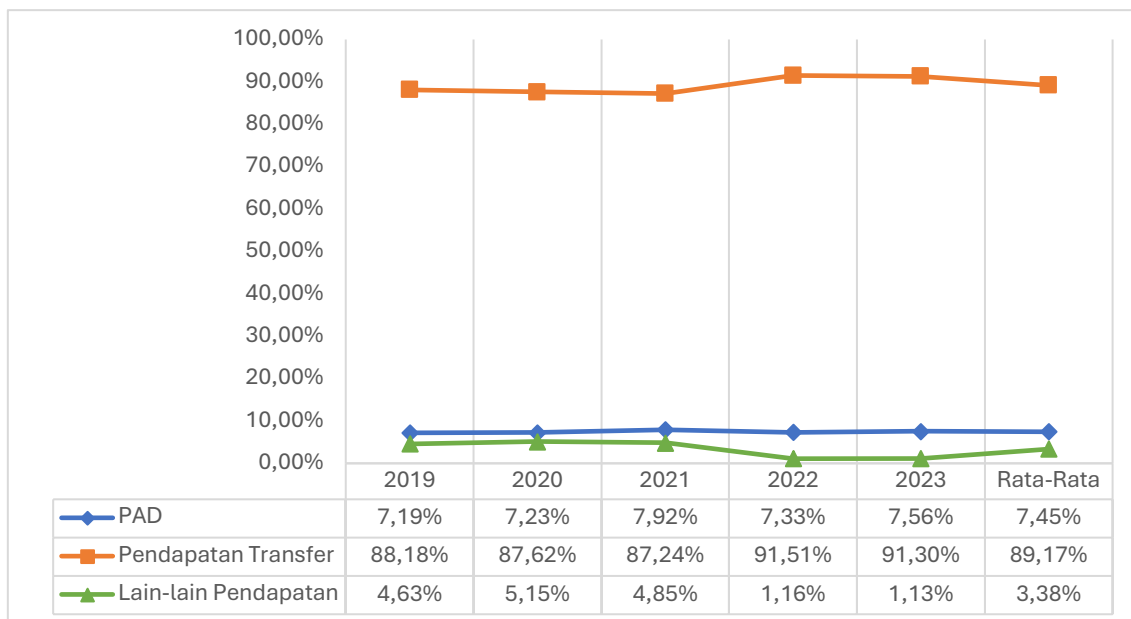
Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)	Pertumbuhan (Persen)	
-------	---	----------------------	--

	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (Persen)
2019	49,48	53,59	19,16	24,02	108,31
2020	49,58	55,92	0,21	4,34	112,78
2021	45,67	56,90	(7,88)	1,76	124,59
2022	0,00	13,65	(100,00)	(76,01)	0,00
2023	16,49	13,72	0,00	0,51	83,19
Rata-rata			(17,70)	(9,08)	85,77

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Tebo cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata realisasi pertumbuhan negatif sebesar 9,08 persen pertahun. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 24,02 persen sedangkan realisasi pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan negatif 76,01 persen. Rata-rata capaian kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 85,77 persen. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 124,59 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar nol persen.

Berdasarkan kontribusi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah, selama kurun waktu 2019-2023 terlihat kontribusi sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi 89,17 persen pertahun, sedangkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan masing-masing hanya 7,45 persen dan 3,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam membangun Tebo masih sebagian besar masih ditopang dari dana transfer. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah.



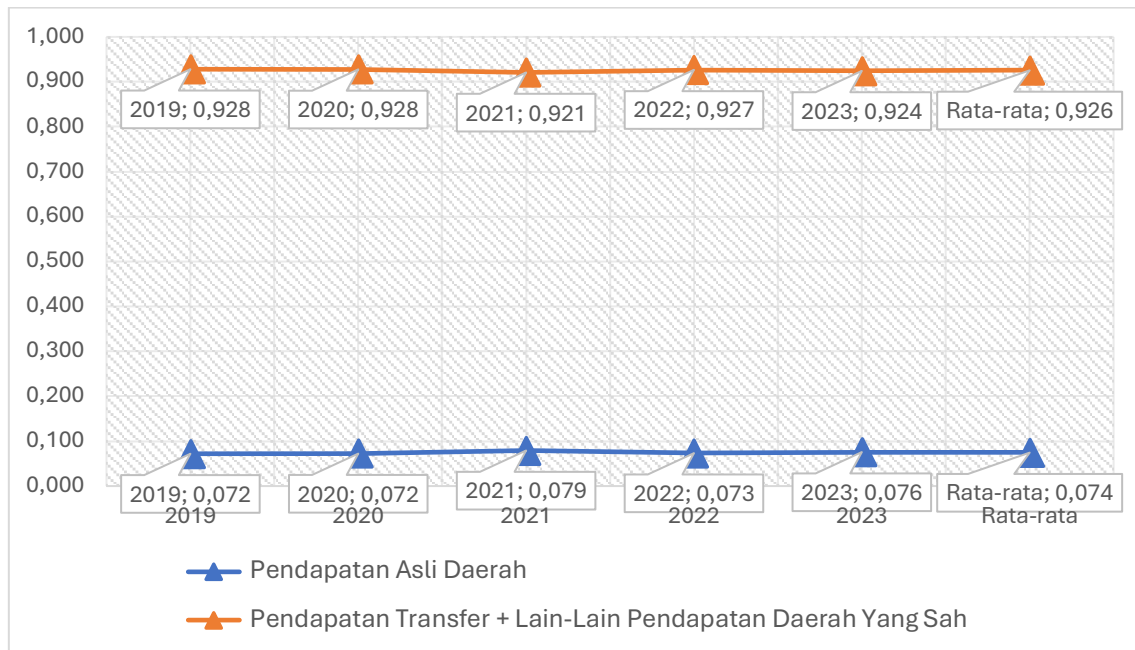
Gambar 3. 4 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023 (Persen)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Disamping itu, untuk melihat kemandirian Kabupaten Tebo dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan. Analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Kemandirian fiskal daerah dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri” yaitu $0,00 \leq IKF < 0,25$; “Menuju Kemandirian” yaitu $0,25 \leq IKF < 0,50$; “Mandiri” $0,50 \leq IKF < 0,75$; dan “Sangat Mandiri” yaitu $0,75 \leq IKF \leq 1,00$.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang

memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah. Berikut adalah grafik derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Tebo 2019-2023.



Gambar 3. 5 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2019 – 2023

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 derajat kemandirian Kabupaten Tebo secara rata-rata sebesar 0,074 (atau 74 persen). Ini menunjukkan derajat kemandirian Kabupaten Tebo dalam berotonomi masuk kategori menuju kemandirian ($0,25 \leq IKF < 0,50$). Dilihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Tebo terhadap bantuan pihak eksternal cenderung relatif masih tinggi selama kurun waktu 2019-2023 dengan rata-rata mencapai 0,926 (atau 92,6 persen) setiap tahunnya.

3.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	1.016,25	935,25	7,50	6,42	92,03
2020	949,00	842,93	(6,62)	(9,87)	88,82
2021	1.034,08	964,95	8,96	14,48	93,32
2022	1.273,04	1.162,99	23,11	20,52	91,36
2023	1.127,59	1.034,62	(11,43)	(11,04)	91,76
Rata-rata			4,31	4,10	91,46

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,10 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar minus 11,04 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar minus 55,65 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 20,52 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 128,38 persen.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91,46 persen selama kurun waktu 2019-2023. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 93,32 persen dari target belanja daerah Kabupaten Tebo yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selama kurun waktu 2019-2023, hanya ada tiga pos belanja pada Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Ketiga kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2019-2023 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	719,56	665,14	8,39	7,58	92,44
2020	719,94	671,39	0,05	0,94	93,26
2021	782,61	740,02	8,71	10,22	94,56
2022	839,76	774,49	7,30	4,66	92,23
2023	876,57	791,97	4,38	2,26	90,35
Rata-rata			5,77	5,13	92,57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Belanja Operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,13 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,94 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Bantuan Hibah sebesar 53,69 persen. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,22 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan pos Belanja Hibah sebesar 507,50 persen.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Operasi Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,57 persen selama kurun waktu 2019-2023. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat capaian sebesar 94,56 persen dari target belanja operasi Kabupaten Tebo yang telah direncanakan sebelumnya, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Belanja Pegawai dari target yang direncanakan Rp406,41 miliar menjadi realisasi sebesar Rp395,52 miliar.

Khusus untuk besarnya porsi belanja pegawai perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Menurut Pasal 146 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah

wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30 persen dari total belanja. Belanja pegawai daerah yang dimaksud pada pasal tersebut tidak termasuk belanja khusus untuk tambahan penghasilan guru dan tunjangan guru yang berasal dari TKD. Rata-rata persentase realisasi belanja pegawai Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 sebesar 53,41 persen. Jumlah persentase tersebut menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai telah melewati ambang batas maksimal dalam alokasi belanja pegawai. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Tebo perlu menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD ini diundangkan.

3.1.2.2 Belanja Modal

Kategori belanja daerah berikutnya adalah Belanja Modal. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Modal Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	295,19	269,09	5,42	3,90	91,16
2020	149,81	139,86	(49,25)	(48,03)	93,36
2021	246,47	222,21	64,52	58,89	90,16
2022	431,86	387,53	75,22	74,40	89,74
2023	250,52	242,66	(41,99)	(37,38)	96,86
Rata-rata			10,78	10,35	92,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,35 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar minus 48,03 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal Tanah sebesar minus 100 persen atau turun dari Rp409,63 juta pada tahun 2019 menjadi Rp0 juta pada tahun 2020. Realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 74,40 persen. Tingginya capaian realisasi dikarenakan terjadi kenaikan

pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 128,38 persen atau naik dari Rp31,18 miliar menjadi Rp71,22 miliar.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Modal Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 92,25 persen selama kurun waktu 2019-2023. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat capaian sebesar 96,86 persen dari target belanja modal Kabupaten Tebo yang telah direncanakan sebelumnya, yang terutama dipengaruhi menurunnya realisasi Belanja Modal Tanah dan belanja infrastruktur Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari target yang direncanakan Rp250,51 miliar menjadi Rp242,65 miliar.

3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Kategori belanja daerah terakhir adalah Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	1,50	1,02	0,00	(36,25)	67,73
2020	79,26	31,69	5183,70	3018,84	39,98
2021	5,00	2,72	(93,69)	(91,41)	54,46
2022	1,41	0,97	(71,71)	(64,39)	68,57
2023	0,50	0,00	(64,65)	(100,00)	0,00
Rata-rata			990,73	545,36	46,15

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Dari tabel di atas bahwa selama kurun waktu 2019–2023, rata-rata realisasi capaian kinerja untuk Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tebo menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 46,15 persen selama kurun waktu 2019-2023. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 545,36 persen per tahun. Pertumbuhan yang tersebut menunjukkan lebih sedikit

kejadian atau situasi darurat yang memerlukan pengeluaran tambahan. Seperti menurunnya kasus Covid-19, tidak ada bencana alam atau krisis yang signifikan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun cakupan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA).

Pembiayaan daerah selama kurun waktu 2019-2023 umumnya masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	

2019	34,79	35,15	91,76	93,03	101,04
2020	61,10	61,10	75,61	73,80	100,00
2021	120,42	120,42	97,09	97,09	100,00
2022	273,28	276,25	126,95	129,41	101,08
2023	89,30	91,54	(67,32)	(66,86)	102,51
Rata-rata			64,82	65,29	100,93

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Untuk pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 65,29 persen selama kurun waktu 2019–2023. Adapun penurunan terbesar untuk realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tebo terjadi pada tahun 2023 yang mencapai minus 66,86 persen. Dilihat dari target pembiayaan daerah Kabupaten Tebo juga cenderung fluktuatif secara rata-rata sebesar 64,82 persen selama kurun waktu 2019–2023 dengan pertumbuhan target tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 126,95 persen.

Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Tebo menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama kurun waktu 2019–2023. Pada tahun 2020 hingga 2023, realisasi pembiayaan daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 65,29 persen. Namun secara rata-rata, realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kabupaten Tebo mencapai 100,93 persen selama kurun waktu 2019–2023. Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari komponen pembiayaan daerah Kabupaten Tebo untuk target dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2019–2023.

3.1.3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Selama kurun waktu 2019-2023, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tebo, 2019-2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	71,83	71,83	49,11	49,11	100,00
2020	72,60	72,60	1,08	1,08	100,00
2021	124,92	124,92	72,07	72,07	100,00
2022	291,85	286,89	133,64	129,66	98,30
2023	112,86	112,86	(61,33)	(60,66)	100,00
Rata-rata			38,91	38,25	99,66

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tebo memperlihatkan kinerja yang optimal selama kurun waktu 2019-2023. Secara rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan daerah mencapai 99,66 persen. Pada tahun 2022 menjadi realisasi capaian kinerja terendah untuk penerimaan daerah Kabupaten Tebo dengan tingkat capaian sebesar 98,30 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pengembalian penyaluran DAU sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.7/2023 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.

3.1.3.2 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019–2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo, 2019–2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	37,03	36,67	23,34	22,42	99,02
2020	11,50	11,50	(68,94)	(68,64)	99,99
2021	4,50	4,50	(60,87)	(60,87)	100,00
2022	18,57	10,64	312,64	136,39	57,29

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023	23,56	21,33	26,91	100,48	90,50
Rata-rata			46,61	25,96	89,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 rata-rata sebesar 25,96 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 89,36 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 100 persen dari proyeksi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2022 menjadi capaian kinerja terendah dengan capaian kinerja 57,29 persen.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tebo digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tebo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Adapun besarnya target dan realisasi untuk penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Tebo pada BUMD selama kurun waktu 2019–2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tebo, 2019–2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Penyertaan Modal Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	14,00	14,00	124,48	124,48	100,00
2020	11,50	11,50	(17,85)	(17,85)	99,99
2021	4,50	4,50	(60,87)	(60,87)	100,00
2022	5,50	5,50	22,22	22,22	100,00
2023	3,00	3,00	(45,45)	(45,45)	100,00
Rata-rata			4,50	4,50	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penyertaan modal daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 rata-rata sebesar 4,50 persen dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 100 persen. Untuk realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada hampir semua tahun kecuali tahun 2020 yang mencapai 100 persen. Sedangkan tahun 2020 capaian kinerjanya 99,99 persen.

Selain untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tebo dialokasikan untuk pemberian pinjaman daerah Kabupaten Tebo. Adapun besarnya target pemberian pinjaman daerah Kabupaten Tebo selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Tebo, 2019–2023 (Rp. Miliar)

Tahun	Pemberian Pinjaman Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata			0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo 2019-2023, Olah Data 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Tebo tidak mengalokasikan anggaran untuk pemberian pinjaman daerah.

3.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan (2025-2029)

Berdasarkan hasil analisis gambaran ringkas pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019-2023, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah untuk periode 2025-2029. Analisis ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

3.2.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pertimbangan utama dalam melakukan proyeksi pendapatan didasarkan pada analisis tren data historis selama lima tahun terakhir untuk setiap sumber pendapatan. Selain itu, proyeksi juga mempertimbangkan pola pencapaian dan

pertumbuhan pendapatan di masa lalu, kondisi ekonomi makro saat ini, serta kebijakan dan strategi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, proyeksi diharapkan menjadi lebih realistis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, proyeksi laju pertumbuhan pendapatan daerah untuk periode 2025-2029 diperkirakan akan mencapai rata-rata sekitar 3,42 persen per tahun, dengan peningkatan dari Rp1,18 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,34 triliun pada tahun 2029.

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan transfer dan pendapatan daerah sah lainnya. Pertumbuhan PAD diperkirakan mencapai 5,03 persen, sementara laju pertumbuhan pendapatan transfer dan pendapatan sah lainnya masing-masing hanya 2,91 persen dan 1,00 persen. Ini dapat menjadi indikasi bahwa daerah berusaha meningkatkan kemandirian fiskal dengan lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo untuk tahun 2025-2029.

Tabel 3.25 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No	Uraian	PROYEKSI PENERIMAAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.565.900.131,00	126.233.229.000,00	131.573.059.000,00	137.169.585.000,00	143.035.714.000,00	5,03%
1.1	Pajak Daerah	43.876.575.511,00	46.259.536.000,00	48.417.118.000,00	50.681.091.000,00	53.056.829.000,00	4,86%
1.2	Retribusi Daerah	2.232.125.000,00	57.595.693.000,00	60.461.593.000,00	63.472.146.000,00	66.634.778.000,00	623,81%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	11.220.000.000,00	11.444.400.000,00	11.673.288.000,00	11.906.754.000,00	2,00%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	60.457.199.620,00	11.158.000.000,00	11.249.948.000,00	11.343.060.000,00	11.437.353.000,00	-19,77%
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.058.285.084.343,00	1.138.966.512.000,00	1.153.857.159.000,00	1.169.341.843.000,00	1.185.462.145.000,00	2,91%
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.010.713.552.000,00	1.088.132.962.000,00	1.099.472.768.000,00	1.111.089.840.000,00	1.122.995.040.000,00	2,71%
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	140.056.880.000,00	144.746.881.000,00	149.638.231.000,00	154.740.318.000,00	160.062.990.000,00	3,39%
2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	565.692.308.000,00	635.198.987.000,00	638.374.981.000,00	641.566.855.000,00	644.774.689.000,00	3,45%
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.522.354.000,00	48.764.966.000,00	49.008.791.000,00	49.253.835.000,00	49.500.104.000,00	0,50%
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	138.708.439.000,00	139.401.981.000,00	140.098.991.000,00	140.799.486.000,00	141.503.483.000,00	0,50%
2.1.5	Dana Desa	110.924.067.000,00	113.142.548.000,00	115.405.399.000,00	117.713.507.000,00	120.067.777.000,00	2,00%
2.1.6	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00	6.877.599.000,00	6.946.375.000,00	7.015.839.000,00	7.085.997.000,00	1,00%
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.571.532.343,00	50.833.550.000,00	54.384.391.000,00	58.252.003.000,00	62.467.105.000,00	7,05%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.571.532.343,00	50.833.550.000,00	54.384.391.000,00	58.252.003.000,00	62.467.105.000,00	7,05%
2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.859.399.000,00	13.997.993.000,00	14.137.973.000,00	14.279.353.000,00	1,00%
	TOTAL PENDAPATAN	1.175.850.984.474,00	1.279.059.140.000,00	1.299.428.211.000,00	1.320.649.401.000,00	1.342.777.212.000,00	3,42%

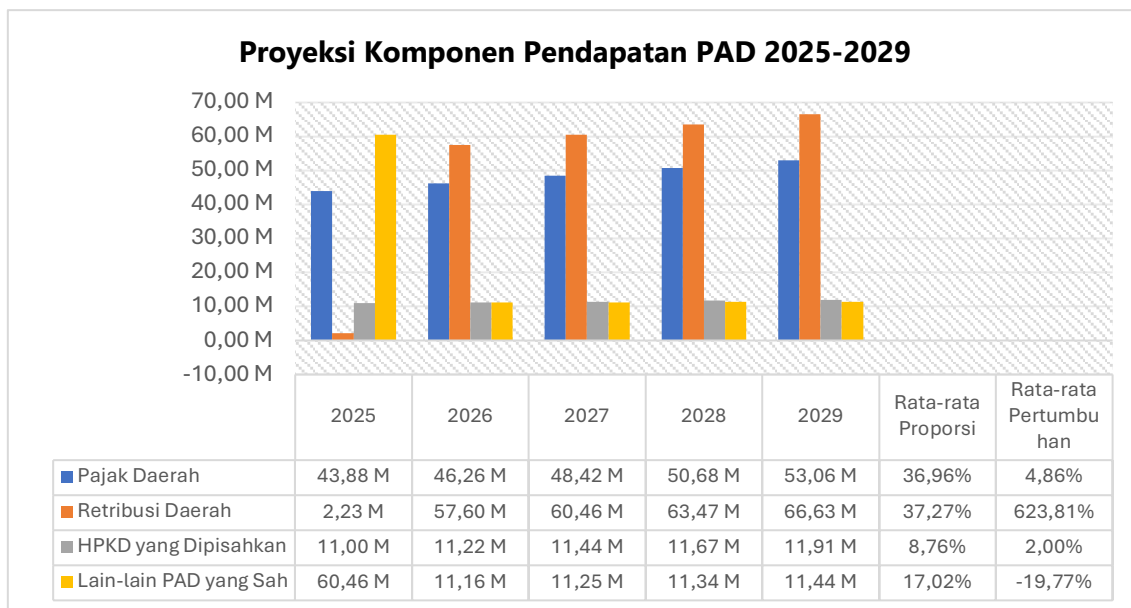
Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 2025 hingga 2029 menunjukkan kinerja yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,03 persen per tahun. Nilai PAD diperkirakan meningkat dari Rp43,88 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp53,07 miliar pada tahun 2029. Peningkatan ini akan terjadi bila ada upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya.

Analisis kontribusi dari masing-masing komponen PAD menunjukkan bahwa Pajak Daerah diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 4,86 persen per tahun, menyumbang proporsi rata-rata sebesar 36,96 persen dari total PAD. Sementara itu, Retribusi Daerah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2026 dan terus menunjukkan pertumbuhan hingga tahun 2029, dengan proporsi rata-rata mencapai 37,27 persen dari total PAD. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kebijakan perpindahan pos pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari kategori Lain-lain PAD yang Sah ke kategori Retribusi Daerah, yang meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD secara keseluruhan.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HKPD) diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata 2,00 persen per tahun selama periode 2025 hingga 2029. Nilai HKPD diperkirakan meningkat dari Rp11,00 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp11,91 miliar pada tahun 2029. Meskipun kontribusinya terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, dengan proporsi rata-rata sebesar 8,76 persen, pertumbuhan yang stabil ini diproyeksikan peran penting HKPD, termasuk dividen dari penyertaan modal pemerintah daerah, dalam mendukung PAD Kabupaten Tebo.

Grafik proyeksi kontribusi masing-masing komponen PAD selama periode 2025-2029 akan memperlihatkan bagaimana setiap komponen, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan HKPD, berkontribusi terhadap peningkatan total PAD. Meskipun HKPD bukan komponen terbesar, stabilitas pertumbuhannya memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keseimbangan pendapatan daerah.



Gambar 3. 6 Proyeksi Kontribusi Komponen PAD Kabupaten Tebo 2025-2029

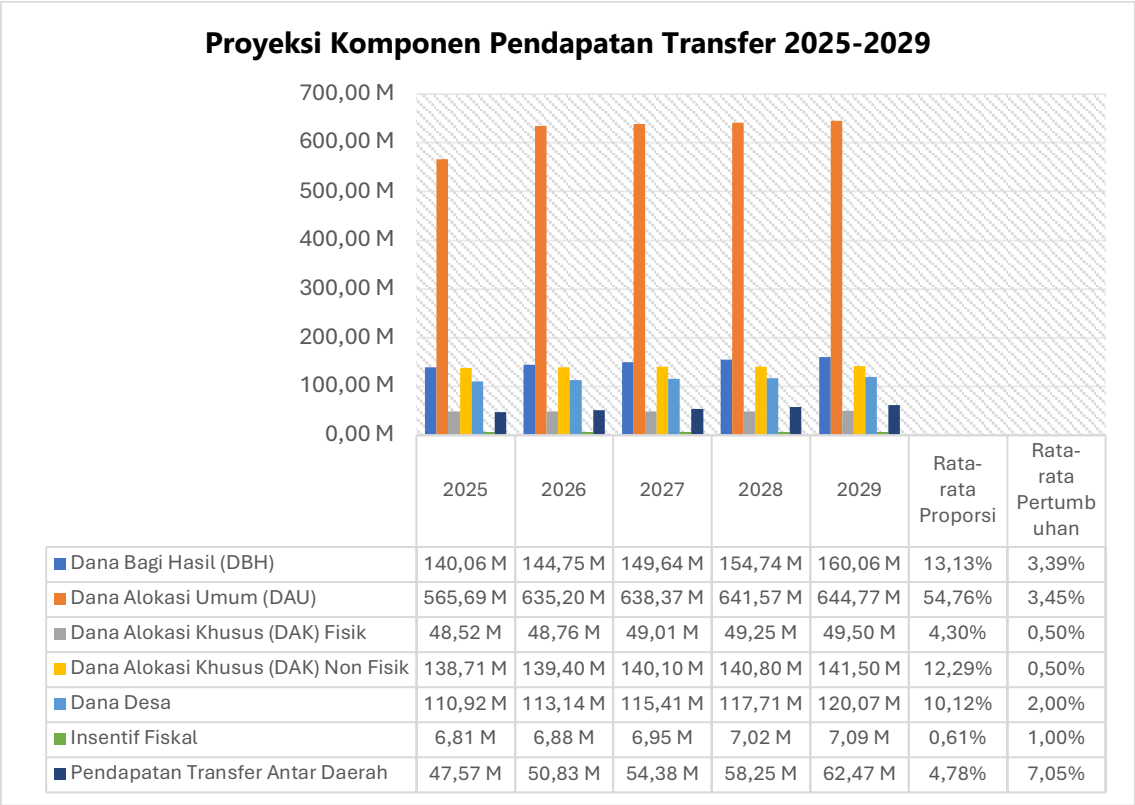
Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas, Retribusi Daerah diproyeksikan menempati posisi sebagai komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan yang sangat besar, menjadikannya pilar utama dalam peningkatan PAD Kabupaten Tebo. Di sisi lain, Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD) menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan kontribusi yang cukup besar terhadap keseluruhan PAD. Sementara itu, kategori Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan drastis, terutama akibat perpindahan pos pendapatan tertentu ke kategori Retribusi Daerah.

Selain PAD, Pendapatan Transfer menjadi sumber penerimaan utama bagi Pemerintah Kabupaten Tebo. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,91 persen per tahun, Pendapatan Transfer diperkirakan meningkat dari Rp1,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,16 triliun pada tahun 2029. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan PAD, Pendapatan Transfer tetap merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah, yang sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Berdasarkan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Transfer dalam periode 2025-2029, struktur pendapatan transfer Kabupaten Tebo selama periode 2025-2029 didominasi oleh DAU. Grafik berikut menunjukkan proyeksi kontribusi masing-masing komponen Transfer selama periode 2025-2029.

Dalam struktur Pendapatan Transfer selama periode 2025-2029, Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi, diperkirakan menunjukkan perannya sebagai komponen utama dalam pendanaan daerah. Grafik proyeksi kontribusi masing-masing komponen Transfer selama periode tersebut akan menampilkan bagaimana DAU, bersama dengan komponen lainnya seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Insentif Fiskal, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah membentuk struktur keuangan yang mendukung anggaran Kabupaten Tebo.



Gambar 3. 7 Proyeksi Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tebo 2025-2029
 Sumber: Olah Data 2024

Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan akan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan transfer Kabupaten Tebo, dengan rata-rata mencapai 54,76 persen. Rata-rata pertumbuhan DAU diperkirakan sebesar 3,45 persen per tahun, meningkat dari Rp565,69 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp644,77 miliar pada tahun 2029. Stabilitas pertumbuhan dan proporsi DAU yang besar menegaskan peran DAU sebagai sumber pendanaan utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari

pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program dan layanan publik di daerah.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan stabil dengan rata-rata 3,39 persen per tahun. Sebagai daerah penghasil sawit, Tebo mendapatkan keuntungan langsung dari peningkatan DBH, dengan proporsi pendapatan transfer yang meningkat dari 13,23 persen pada tahun 2025 menjadi 13,50 persen pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan bahwa DBH Sawit semakin penting dalam struktur pendapatan transfer daerah, berkontribusi signifikan terhadap pendanaan daerah dan mencerminkan potensi ekonomi yang berasal dari sektor perkebunan sawit. Kedua komponen ini, DAU dan DBH, merupakan pilar utama dalam struktur pendapatan transfer Kabupaten Tebo, yang memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diperkirakan mengalami pertumbuhan yang sangat kecil, hanya sebesar 0,50 persen per tahun. Proporsinya dalam total pendapatan transfer tidak terlalu besar, dengan rata-rata hanya mencapai 4,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DAK Fisik memiliki peran dalam pendanaan proyek fisik, kontribusinya relatif terbatas dibandingkan dengan komponen pendapatan transfer lainnya.

Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik memiliki proporsi yang lebih besar dalam struktur pendapatan transfer, yaitu rata-rata sebesar 12,29 persen, dengan pertumbuhan yang sama sebesar 0,50 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan DAK Non Fisik juga minim, kontribusinya terhadap total pendapatan transfer cukup signifikan dan dapat membantu mendukung program-program non-fisik yang penting bagi pengembangan masyarakat.

Sementara itu, pendapatan dari Dana Desa diperkirakan akan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10,12 persen terhadap total pendapatan transfer, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 2,00 persen. Nilai Dana Desa diproyeksikan meningkat dari Rp110,92 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp120,07 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan Dana Desa yang konsisten

mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya alokasi ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa dapat terus ditingkatkan, sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

Pendapatan dari Insentif Fiskal diperkirakan memberikan proporsi yang sangat kecil, yaitu hanya 0,61 persen dari total pendapatan transfer, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 1,00 persen. Meskipun kontribusi Insentif Fiskal ini kecil, keberadaannya tetap penting karena diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Insentif Fiskal juga berperan dalam menjaga kesehatan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendukung peningkatan pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum pemerintahan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah memiliki proporsi rata-rata sebesar 4,78 persen dari total pendapatan transfer, dengan pertumbuhan sebesar 7,05 persen per tahun dari Rp47,57 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp62,47 miliar pada tahun 2029. Ini menunjukkan adanya kontribusi yang stabil dari transfer antar daerah. Menunjukkan peningkatan kolaborasi dan dukungan antar pemerintah daerah Provinsi dengan Kabupaten dalam struktur pendapatan bagi hasil.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan memiliki proporsi rata-rata sebesar 4,78 persen dari total pendapatan transfer, dengan pertumbuhan sebesar 7,05 persen per tahun. Nilai pendapatan dari Transfer Antar Daerah ini diproyeksikan meningkat dari Rp47,57 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp62,47 miliar pada tahun 2029. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini akan tercapai bila ada peningkatan kolaborasi dan dukungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam struktur pendapatan bagi hasil. Hal ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antar daerah dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

Berdasarkan analisis proyeksi di atas, beberapa kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang perlu diarahkan pada:

- a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum terkait pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengumpulan dan pengelolaan PAD. Ini dapat mencakup peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan pemungutan ini meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang, hingga kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana serta prasarana pada perangkat daerah penghasil;
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang lebih efektif;
- g. Memperbaiki pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, pemantauan, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Kebijakan terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus mempertimbangkan nilai kekayaan yang dipisahkan serta manfaat

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;

- j. Meningkatkan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkontribusi bagi hasil laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- k. Meningkatkan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat menghasilkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BLUD;
- l. Mengantisipasi potensi penurunan dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan di sektor lain agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari sumber yang fluktuatif; dan
- m. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dengan Kabupaten Tebo dalam peningkatan pendapatan, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak; dan
- n. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tebo meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya.
- o. Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyeksi pertumbuhan pendapatan tercapai. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang muncul, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil.

3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah tidak terlepas dari analisis pengeluaran wajib dan mengikat. Pengeluaran ini menjadi prioritas utama karena bersifat periodik dan tidak dapat ditunda. Pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat mencakup pembayaran yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai, anggota dewan, bunga utang, dan belanja sejenis

lainnya. Berdasarkan petunjuk dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, Tabel T-B.10, pengeluaran dan belanja wajib yang mengikat serta menjadi prioritas utama meliputi Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan, belanja untuk anggota dan pimpinan DPRD, serta operasional KDH/WKDH), Belanja Bunga, dan Belanja Bagi Hasil. Selain itu, terdapat pula Pengeluaran Pembiayaan, yang mencakup pembentukan Dana Cadangan, pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal.

Berikut ini adalah proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tebo 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.26 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No	Uraian	PROYEKSI BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2025	2026	2027	2028	2029	
A	BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT						
1	Belanja Pegawai	435.481.062.954,00	436.132.924.000,00	444.855.582.000,00	453.752.694.000,00	462.827.747.000,00	1,54%
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.045.643.132,00	1.045.643.000,00	1.045.643.000,00	1.045.643.000,00	1.045.643.000,00	0,00%
3	Belanja Bagi Hasil	8.137.580.677,00	8.382.412.000,00	8.634.609.000,00	8.894.394.000,00	9.161.995.000,00	0,13%
4	Belanja Bantuan Keuangan	193.698.985.800,00	193.698.986.000,00	193.698.986.000,00	193.698.986.000,00	193.698.986.000,00	3,01%
	Jumlah Belanja Wajib dan Mengikat	638.363.272.563,00	639.259.965.000,00	648.234.820.000,00	657.391.717.000,00	666.734.371.000,00	1,09%
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.325.825.436,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.325.825.436,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	0,00%
TOTAL		657.689.097.999,00	658.585.790.000,00	667.560.645.000,00	676.717.542.000,00	686.060.196.000,00	1,06%

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, belanja wajib dan mengikat secara keseluruhan diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,09 persen per tahun, meningkat dari Rp638,36 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp666,73 miliar pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam memenuhi kewajiban pengeluaran yang tidak dapat dihindari, termasuk belanja pegawai, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Pertumbuhan yang konsisten menunjukkan upaya daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya serta menjaga stabilitas keuangan.

Belanja Pegawai diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,54 persen per tahun, dengan anggaran yang meningkat dari Rp435,48 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp462,83 miliar pada tahun 2029. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk pegawai, yang diperkirakan disebabkan oleh kenaikan gaji, tunjangan, atau bertambahnya jumlah pegawai. Meskipun pertumbuhan belanja pegawai relatif rendah, penting untuk melakukan evaluasi rutin guna memastikan efisiensi dalam pengeluaran tersebut. Evaluasi ini akan membantu menjaga agar proporsi belanja pegawai tetap di bawah batas maksimal 30 persen dari APBD, dengan masa penyesuaian yang direncanakan hingga tahun 2027.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diperkirakan akan tetap konstan di Rp1,05 miliar setiap tahun dari 2025 hingga 2029, tanpa adanya pertumbuhan (0,00%). Ini menunjukkan bahwa alokasi bantuan keuangan kepada partai politik tidak akan mengalami perubahan selama periode tersebut. Sebaliknya, Belanja Bagi Hasil diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,13 persen per tahun, meningkat dari Rp8,137 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp9,16 miliar pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan penyesuaian alokasi dana berdasarkan hasil yang diperoleh, meskipun pertumbuhannya relatif kecil.

Sementara itu, Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,01 persen per tahun, dengan nilai meningkat dari Rp193,69 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp220,98 miliar pada tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan adanya kenaikan dalam alokasi bantuan keuangan, khususnya

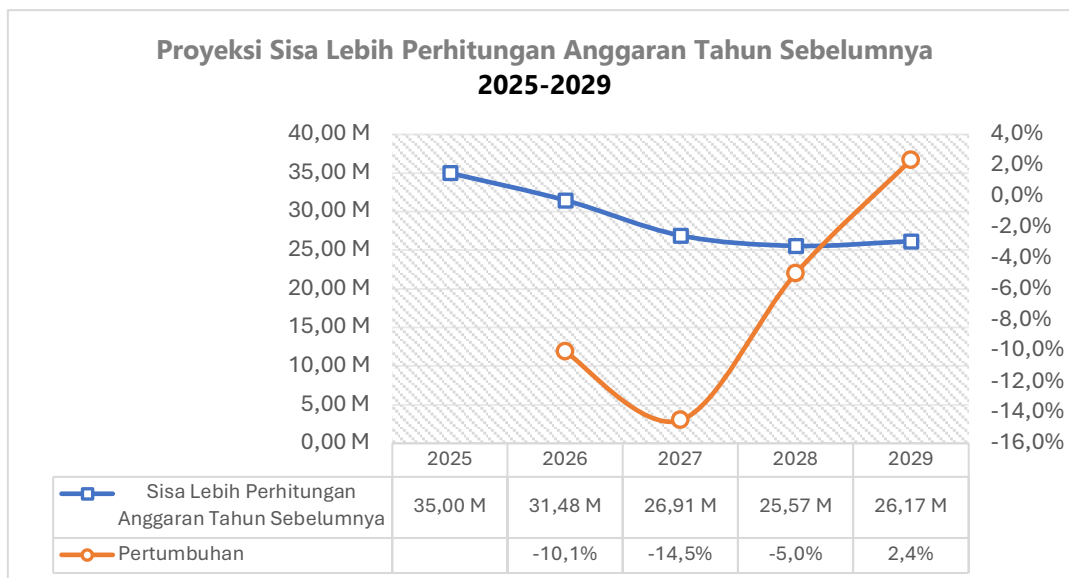
untuk pembagian kepada desa, yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan daerah dan kebutuhan untuk mendukung pembangunan desa.

Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo diperkirakan akan tetap konstan di Rp19,33 miliar setiap tahun dari 2025 hingga 2029, tanpa adanya pertumbuhan (0,00%). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran utang tidak akan mengalami perubahan selama periode tersebut. Pemerintah Daerah perlu berhati-hati dalam mengambil utang baru dan memastikan bahwa setiap utang yang diambil memberikan manfaat yang signifikan dan dapat dikelola dengan baik.

3.2.1.3. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pertimbangan utama dalam proyeksi penerimaan pembiayaan daerah melibatkan analisis tren data historis selama lima tahun terakhir untuk setiap sumber penerimaan pembiayaan. Proyeksi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan penyelesaian kewajiban daerah, serta kebijakan efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, proyeksi memperhitungkan kewajiban kepada pihak ketiga yang menjadi tanggungan pemerintah daerah dan kebijakan defisit anggaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan proyeksi akan menjadi lebih realistis.

Mempertimbangkan asumsi terkait kondisi ekonomi makro, kebijakan efisiensi belanja daerah, peningkatan pendapatan daerah, dan tren Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), proyeksi laju pertumbuhan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA diperkirakan akan mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,80 persen. Proyeksi ini dengan asumsi tidak ada perubahan besar dalam kebijakan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tebo yang mempengaruhi penerimaan daerah. Grafik berikut menyajikan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah untuk pos SILPA Tahun Sebelumnya pada periode 2025-2029 di Kabupaten Tebo.



Gambar 3. 8 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Tebo 2025-2029

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan grafik di atas, proyeksi perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan fluktuasi. Penurunan paling besar diperkirakan akan terjadi pada tahun 2027, yaitu sebesar -14,5 persen, sementara peningkatan tertinggi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2029, sebesar 2,4 persen. Fluktuasi ini perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan anggaran dan mencegah kemungkinan defisit yang lebih besar.

Penurunan bertahap dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat diartikan sebagai indikasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo semakin efektif dalam penyerapan anggaran, sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai (SiLPA) semakin berkurang. Hal ini bisa dianggap positif karena menunjukkan bahwa alokasi anggaran semakin tepat sasaran dan pemborosan berkurang. Namun, penurunan yang terlalu tajam bisa menjadi sinyal peringatan. Jika SiLPA menurun terlalu cepat tanpa adanya peningkatan signifikan dalam hasil atau dampak dari program-program yang didanai, hal ini dapat menunjukkan kurangnya fleksibilitas anggaran untuk menghadapi kebutuhan mendadak atau perubahan situasi di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tebo perlu melakukan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan pembiayaan untuk memastikan setiap rupiah digunakan dengan

efisien dan efektif. Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilitas keuangan daerah dapat terjaga dan tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

- a. Pembiayaan: Diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran.
- b. Pendanaan APBD Defisit: Jika APBD diperkirakan mengalami defisit, pembiayaan dapat diperoleh dari sumber-sumber penerimaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang tidak akan membebani daerah.
- c. Pendanaan APBD Surplus: Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- d. Penganggaran SiLPA: Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- e. Penyertaan Modal Daerah: Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

3.2.2. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan, belanja, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dapat diperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tebo untuk periode 2025-2029 dalam mendanai pembangunan. Proyeksi total penerimaan, setelah memperhitungkan Belanja Pegawai, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, menghasilkan angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Tabel berikut menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tebo untuk tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 3.27 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No	Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Rata-rata pertumbuhan
1	Pendapatan	1.175.850.984.474,00	1.279.059.140.000,00	1.299.428.211.000,00	1.320.649.401.000,00	1.342.777.212.000,00	3,42%
2	Pencairan cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	0,00%
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	35.000.000.000,00	31.480.282.000,00	26.914.161.000,00	25.568.488.000,00	26.171.682.000,00	-6,80%
	Total Penerimaan	1.210.850.984.474,00	1.310.539.422.000,00	1.326.342.372.000,00	1.346.217.889.000,00	1.368.948.894.000,00	3,16%
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai	435.481.062.954,00	436.132.924.000,00	444.855.582.000,00	453.752.694.000,00	462.827.747.000,00	1,54%
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.045.643.132,00	1.045.643.000,00	1.045.643.000,00	1.045.643.000,00	1.045.643.000,00	0,00%
6	Belanja Bagi Hasil	8.137.580.677,00	8.382.412.000,00	8.634.609.000,00	8.894.394.000,00	9.161.995.000,00	0,13%
7	Belanja Bantuan Keuangan	193.698.985.800,00	193.698.986.000,00	193.698.986.000,00	193.698.986.000,00	193.698.986.000,00	3,01%
8	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.325.825.436,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	19.325.825.000,00	0,00%
	Total Pengeluaran	657.689.097.999,00	658.585.790.000,00	667.560.645.000,00	676.717.542.000,00	686.060.196.000,00	1,06%
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	553.161.886.475,00	651.953.632.000,00	658.781.727.000,00	669.500.347.000,00	682.888.698.000,00	5,63%

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,63 persen per tahun, dari Rp553,69 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp682,89 miliar pada tahun 2029. Meskipun tren pertumbuhan positif, pemerintah daerah perlu waspada terhadap potensi risiko yang bisa mengganggu stabilitas keuangan. Ini bisa termasuk penurunan pendapatan dari sumber-sumber tertentu, perubahan kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat, atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai maksimal bagi masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, penting untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas yang paling mendesak dan strategis. Fokus utama harus tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas layanan publik.

Mengingat keterbatasan anggaran, pengalokasian anggaran harus didasarkan pada skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dengan fokus alokasi anggaran pada pendanaan prioritas pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah. Kebijakan penganggaran belanja daerah juga mempertimbangkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan. Untuk memastikan penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efektif, arah kebijakan belanja daerah ke depan akan diarahkan sebagai berikut:

- a. Mendesain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Belanja pembangunan tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal internal daerah, tetapi juga harus memperhatikan anggaran dari sumber luar seperti APBN, kerjasama antara pemerintah dan swasta, peran *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta sumber pendanaan lainnya, dengan menerapkan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Kerangka pendanaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Selain dari jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dimiliki, pendanaan juga perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun

Pemerintah Pusat, terutama melalui Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2025-2029). Kebijakan alokasi belanja untuk program-program prioritas harus diarahkan untuk:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif.
- b. Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan.
- c. Tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial.
- d. Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan.
- e. Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian.
- f. Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan.
- g. Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- h. Pengembangan kawasan perdesaan dan keberdayaan desa.

Berikut adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.28 Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tebo Tahun 2025-2029

Tahun Proyeksi	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
2025	387.213.320.532,50	110.632.377.295,00	55.316.188.647,50	553.161.886.475,00
2026	456.367.542.400,00	130.390.726.400,00	65.195.363.200,00	651.953.632.000,00
2027	461.147.208.900,00	131.756.345.400,00	65.878.172.700,00	658.781.727.000,00
2028	468.650.242.900,00	133.900.069.400,00	66.950.034.700,00	669.500.347.000,00
2029	478.022.088.600,00	136.577.739.600,00	68.288.869.800,00	682.888.698.000,00

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat, dengan fokus untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (*mandatory spending*) rangka peningkatan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan Wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1. Permasalahan Lintas sektor

Pembangunan daerah merupakan agenda penting dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, perhatian terhadap permasalahan yang menghambat pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan merupakan hal yang mendasar. Analisis mendalam terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh daerah menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif. Pembahasan mengenai permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam konteks Kabupaten Tebo mencakup:

Tabel 4. 1 Pemetaan permasalahan pembangunan lintas sektor

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Ekonomi	Kesejahteraan masyarakat belum memadai	Pertumbuhan sektor industri pengolahan belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM belum memadai Sarana dan prasarana IKM belum memadai
		Pertumbuhan sektor pariwisata belum optimal	Pengembangan daya tarik destinasi wisata belum optimal Promosi destinasi wisata kurang memadai Pengembangan SDM pelaku wisata belum optimal Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum memadai Kualitas produk ekonomi kreatif belum memadai
		Pengembangan BUMD belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia pengelola belum optimal
			Identifikasi potensi investasi belum optimal

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pembentukan modal tetap bruto belum memadai	Promosi investasi belum memadai
		Ekspor barang dan jasa belum memadai	Quality control produk belum memadai
			Kerjasama pemasaran ekspor belum optimal
		Pertumbuhan sub sektor perikanan belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia perikanan belum optimal
			Sarana dan prasarana perikanan belum memadai
			Metode budidaya perikanan masih konvensional
			Quality control produk belum memadai
	Ketimpangan pendapatan masyarakat	Usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil belum memadai	Produksi usaha mikro khususnya usaha non-pertanian belum memadai
			Kualitas produk usaha mikro belum memadai
			Kapasitas pemasaran produk usaha mikro belum optimal
		Volume usaha koperasi belum memadai	Kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
	Pengangguran terbuka masih perlu diturunkan	Kesempatan kerja belum memadai	Kesesuaian kompetensi dengan permintaan pasar belum memadai
			Jaringan pemasaran tenaga kerja belum memadai
			Kompetensi tenaga kerja belum memadai
	Pengembangan ekonomi hijau belum optimal	Pertumbuhan sektor pertanian belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia petani belum optimal
			Sarana dan prasarana pertanian belum memadai
			Metode budidaya pertanian masih konvensional
			Bencana pertanian
			Quality control produk belum memadai
			Kapasitas sumber daya manusia peternak belum optimal
			Sarana dan prasarana peternakan belum memadai
			Metode budidaya peternakan masih konvensional
			Serangan penyakit ternak masih terjadi
			Quality control produk belum memadai
	Stabilitas inflasi masih perlu dijaga secara berkesinambungan	Stabilitas harga barang dan jasa	Stabilitas harga barang pokok dan barang penting belum optimal
			Fluktuasi stok harga barang perdagangan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Sosial	Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal	belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas	kebutuhan tenaga pendidik masih belum terpenuhi
			kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan
			sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan pendidikan masih belum merata
			manajemen dan tata kelola pendidikan masih belum optimal
			pengembangan dan penerapan kurikulum muatan lokal masih belum optimal
			kesadaran masyarakat di beberapa wilayah terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan
		belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas	kebutuhan tenaga kesehatan di daerah masih belum terpenuhi
			kompetensi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan
			sarana dan prasarana berkualitas penunjang layanan kesehatan masih belum merata
			manajemen dan tata kelola kesehatan masih belum optimal
			pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan masih belum optimal
			kebijakan penerapan sistem kesehatan terintegrasi masih belum optimal
			penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih perlu ditingkatkan
			pembudayaan hidup sehat dan upaya promotif-preventif masih belum optimal
	belum optimalnya pengentasan kemiskinan	belum optimalnya layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial	cakupan layanan perlindungan sosial masih terbatas pada kelompok tertentu
			integrasi data penerima bantuan masih belum optimal
			koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penanganan masalah sosial masih belum optimal

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Transformasi Tata Kelola	Belum optimalnya reformasi birokrasi	Belum optimalnya reformasi birokrasi berdampak	Belum optimalnya integrasi data antar PD
			Belum optimalnya kolaborasi PD dalam peningkatan kinerja
		Belum optimalnya implementasi sistem merit	Belum optimalnya manajemen talenta
			Pengembangan sumber daya manusia belum optimal
			Belum optimalnya implementasi SKJ
		Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik di luar MPP belum optimal
			Belum optimalnya tindak lanjut dari pengaduan
		Belum optimalnya pengawasan daerah	Belum optimalnya pengendalian internal
			Implementasi Zona Integritas (ZI) belum optimal
			Belum optimalnya pengawasan di level Desa
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran sungai belum optimal	Pemantauan titik sampel air belum optimal
			Belum optimalnya pencegahan dan pengawasan aktivitas tambang emas ilegal (PETI)
			Meningkatnya akumulasi sedimen pada jaringan sungai
			Belum optimalnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terintegrasi
		Menurunnya kualitas tutupan lahan	Meluasnya alih fungsi lahan
			Belum optimalnya rehabilitasi lahan pasca tambang
			Pemulihan lahan kritis masih perlu ditingkatkan
		Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah belum lengkap
			Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah
		Belum maksimalnya kualitas perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Kualitas kajian lingkungan hidup masih perlu diperkuat
			Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pembangunan		Belum optimalnya pelestarian lingkungan hutan

Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Banyaknya alih fungsi lahan menjadi terbangun
			Pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Aksesibilitas wilayah untuk kesejahteraan masyarakat	Pembangunan jalan yang belum merata dan berkualitas
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni
			Akses air minum dan sanitasi yang masih terbatas
	Belum optimalnya perlindungan Sosial yang adaptif	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Pemenuhan ruang dan hak anak masih belum optimal
			Belum memiliki layanan rumah singgah dan penampungan yang representatif
			Pemberdayaan dan bantuan sosial masih belum tepat sasaran

Sumber: Analisis, 2024

4.1.2. Permasalahan urusan pemerintahan

Pembangunan di Kabupaten Tebo merupakan hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tebo. Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Pada bagian ini disajikan permasalahan tiap urusan berdasarkan telaah capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pada hasil *focus group discussion*. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	Penyelenggaraan layanan pendidikan masih belum optimal	jumlah guru masih belum terpenuhi
			Sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas masih belum merata
			Sebaran tenaga pendidik dan kependidikan masih belum merata
			Tata kelola pendidikan masih belum optimal
			integrasi antara pendidikan formal dan pesantren masih belum optimal

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Kesejahteraan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan
			pengembangan dan Penerapan kurikulum lokal serta pendidikan karakter masih belum optimal
			pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pendidikan masih belum optimal
2	Kesehatan	Penyelenggaraan layanan kesehatan masih belum optimal	Kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi
			sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata
			Kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal
			Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal
			pembudayaan pola hidup bersih dan sehat masih belum optimal
			Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular masih belum optimal
			Tata kelola rumah sakit masih belum optimal
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar
			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana RS yang sesuai standar
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kualitas jaringan jalan dalam kondisi mantap yang terus menurun	kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan terbangun
			belum adanya masterplan desain jalan
			masih banyaknya ruas jalan dengan material tanah dan batu
		Sarana Prasarana SDA yang masih terbatas	sarana dan prasarana untuk normalisasi sungai masih terbatas
			pembebasan lahan sekitar sungai masih banyak kendala
			belum semua kawasan pertanian terfasilitasi jaringan irigasi teknis
			masih terbatasnya pembangunan turap untuk tebing sungai besar
		belum meratanya akses air minum dan sanitasi masyarakat	Kualitas air layak, belum aman
			belum terpenuhinya akses air (PAMSIMAS) di kawasan seberang sungai
			Kondisi eksisting karakteristik daerah yang sulit untuk pelayanan air
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan PSU permukiman belum optimal	menurunnya akses sanitasi layak masyarakat
			kurangnya pemeliharaan dan pengawasan fasilitas LPJU
			pembangunan rapat beton belum merata
			drainase permukiman yang belum optimal

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			tempat pembuangan sampah yang tidak terpenuhi
		Penanganan kawasan kumuh belum optimal	belum adanya baseline numerik kawasan kumuh
			belum adanya dokumen penanganan kawasan permukiman (RP3KP)
			penanganan RTLH belum optimal
			kerapatan antar rumah yang tinggi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih tingginya tingkat kriminalitas daerah	Fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik belum optimal
			Penguatan pencegahan tindak kejahatan belum optimal
		Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum Optimalnya mitigasi dan sinergitas semua elemen dalam penanganan bencana
			Pengurangan Risiko Bencana belum dilaksanakan secara menyeluruh
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam dan penyelamatan
6	Sosial	Layanan peningkatan kebutuhan dasar PPKS masih terbatas	Belum adanya pusat rehabilitasi sosial yang menyebabkan minimnya layanan ODGJ dan lansia terlantar
			Belum kuatnya basis data penerima bantuan sosial yang menyebabkan bantuan sosial belum tepat sasaran
			Minimnya jaminan sosial terkait kebencanaan akibat belum adanya dapur umum dan belum berfungsinya kampung siaga bencana
			Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
7	Tenaga Kerja	Rendahnya kesesuaian ketersediaan teanga kerja dengan tingkat kebutuhannya	Masih rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja
			Pelatihan tenaga kerja masih belum optimal
			Akses masyarakat terhadap informasi tenaga kerja masih belum merata
			Kesempatan lapangan usaha mandiri masih rendah
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya keberdayaan perempuan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
		Belum optimalnya perlindungan anak	Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
			Layanan pengaduan dan penanganan kasus kekerasan pada anak belum optimal
			Kasus pernikahan dini masih cukup banyak
9	Pangan	Ketahanan pangan belum optimal	Belum optimalnya penegakan regulasi penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan
			Keterjangkauan pangan belum optimal
			Pemanfaatan pangan belum memadai

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan di tingkat masyarakat
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan	Tertib pengelolaan pertanahan belum optimal
			Tingginya konflik penguasaan atas tanah
			Belum optimalnya fasilitasi penerbitan sertifikat tanah masyarakat
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola lingkungan	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah
			Belum optimalnya pembinaan hidup pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
			Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
			Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum lengkap dan belum menjangkau seluruh masyarakat
			Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam setiap program LPM	Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal
			Belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa/BUMDes
			Kualitas aparatur desa masih perlu ditingkatkan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya kepesertaan KB aktif	Akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata
			Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi masih rendah
15	Perhubungan	Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai	Belum optimalnya kualitas sistem angkutan jalan darat dan sungai
			Kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas perhubungan masih rendah
16	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan informasi publik	Masih kurangnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Belum optimalnya proses administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik berbasis elektronik	Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintah
			Belum optimalnya pengembangan sistem TIK
			Kapasitas SDM TIK masih terbatas
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kapasitas manajerial koperasi belum optimal	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
		Pengembangan Sistem Pendukung	Kapasitas SDM pengelola koperasi belum optimal
			Kurangnya daya saing KUMKM untuk meningkatkan akses,

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
		Usaha Bagi K-UKM belum optimal	pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen
			Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan IT dalam pemasaran
18	Penanaman Modal	Realisasi investasi masih perlu ditingkatkan	Belum efektifnya promosi investasi
			Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
			Prosedur pelayanan perizinan belum efektif
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan	Minimnya sarana dan prasarana pengembangan kepemudaan dan olahraga
20	Statistik	Belum optimalnya penanganan data statistik sektoral	Penguatan sumber perencanaan dan sumber data belum optimal dilaksanakan
			Pengumpulan data statistik sektoral yang belum optimal
21	Persandian	Belum adanya jaminan keamanan data dan informasi	Kurangnya keterampilan SDM pengelolaan persandian
			Urusan persandian belum dimasukkan dalam perencanaan
22	Kebudayaan	Pengembangan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah belum optimal	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
			Sarana promosi kebudayaan masih belum optimal
23	Perpustakaan	Budaya literasi masyarakat masih perlu ditingkatkan	Belum terpenuhinya kebutuhan pustakawan
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan
			Masih kurangnya kesadaran institusi dalam mengelola perpustakaan
			Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan
			Masih terbatasnya koleksi bacaan baik cetak maupun digital
			belum tersedianya perpustakaan daerah
			Kompetensi pengelola perpustakaan masih belum optimal
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah	masih terbatasnya jumlah tenaga arsiparis
			belum optimalnya tata kelola arsip di daerah
			belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip di daerah

No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
			masih minimnya kesadaran institusi dalam mengelola arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan			
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah
			Tingginya biaya input produksi dan kenaikan harga ikan yang tidak seimbang
			Lemahnya kelembagaan/administrasi kelompok pengolahan dan pemasaran ikan
			Rendahnya mutu hasil produk olahan ikan
26	Pariwisata	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Belum optimalnya promosi wisata
			Pengembangan daya tarik destinasi belum optimal
			Pengembangan ekonomi kreatif belum memadai
27	Pertanian	Produksi pertanian belum optimal	Belum optimalnya pembinaan terhadap petani dalam peningkatan produktivitas pertanian
			Belum optimalnya keberagaman pengadaan bibit untuk wilayah yang memiliki potensi baru
			Belum optimalnya pengolahan hasil pertanian
			Belum efektifnya alur tata niaga pangan
		Produksi hasil peternakan belum optimal	Kapasitas sumber daya manusia peternak belum memadai
			Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
28	Perdagangan	Pengembangan sektor perdagangan belum optimal	Metode peternakan masih konvensional
			Masih kurangnya kecukupan produk lokal sehingga masih menggantungkan pada pasokan luar daerah
			Rendahnya nilai ekspor daerah dalam bidang perdagangan
29	Perindustrian	Pengembangan IKM belum optimal	Belum optimalnya daya saing bidang industri
			Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung perindustrian
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
30	Sekretariat Daerah	Capaian reformasi birokrasi belum optimal	Lambatnya koordinasi terkait pembaruan data dari perangkat daerah
			SKM belum dapat dilaksanakan
			Reformasi birokrasi berdampak belum optimal
			Belum optimalnya pelayanan publik di luar MPP
		Penataan batas wilayah belum optimal	Pelacakan batas baru terlaksana sebanyak 6 dari 20 segmen
31	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya kualitas layanan bagi pimpinan DPRD	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor
			Presentase Prolegda yang terfasilitasi masih belum optimal
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			

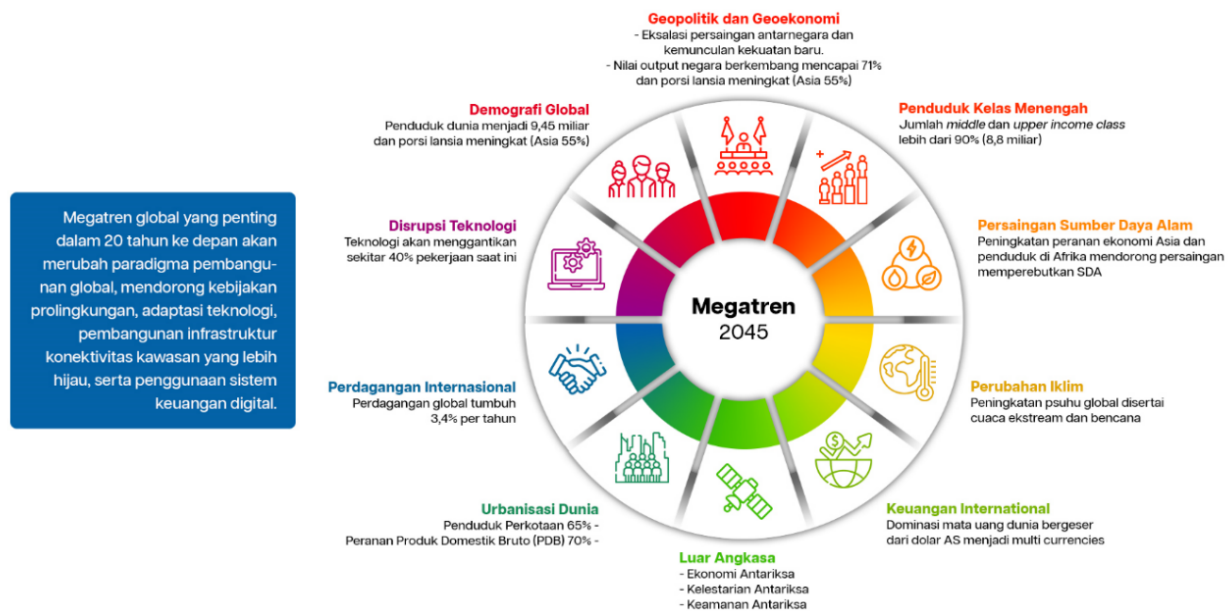
No.	Urusan	Masalah	Penyebab Masalah
32	Perencanaan Pembangunan	Konsistensi perencanaan belum optimal	Indikator kinerja belum mengimplementasikan SMART-C
			Tantangan penyesuaian peraturan teknis dari pemerintah pusat terkait nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinamis
			Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal
33	Keuangan	Kapasitas fiskal dan penganggaran daerah belum optimal	Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat
			Perusahaan Umum Daerah belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah
			Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
			Ketertiban pengelolaan keuangan daerah belum optimal
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya implementasi sistem merit	Pengembangan sumber daya manusia belum optimal
			Implementasi manajemen talenta belum optimal
			Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi Jabatan
35	Penelitian dan Pengembangan	Riset dan inovasi belum optimal	Ekosistem riset dan inovasi daerah belum optimal
			Masih terbatasnya fungsional peneliti
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
36	Inspektorat Daerah	Belum optimalnya pengawasan daerah dan perangkat daerah	Implementasi Zona Integritas (ZI) belum optimal
			Belum adanya integrasi pengukuran kinerja instansi pemerintah
			Miskomunikasi dan miskonsepsi terhadap inspektorat oleh perangkat daerah
			Belum optimalnya pengawasan di level desa
Unsur Kewilayahan			
37	Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat	Standar sarana prasarana pelayanan belum terpenuhi secara optimal
		Belum optimalnya koordinasi kewilayahan	Peran koordinasi pendataan belum optimal
			Tantangan penyelesaian konflik di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya fasilitasi pembangunan desa	Belum optimalnya pendampingan pengembangan potensi kewilayahan di desa-desa
Unsur Pemerintahan Umum			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya pembinaan dan koordinasi antar masyarakat	Potensi konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat
			Ketergantungan masyarakat dengan pemodal
			Rendahnya partisipasi dan pendidikan politik

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpeluang menjadi masalah atau menjadi peluang di masa datang. Tahapan identifikasi isu strategis merupakan bagian penting di dalam dokumen perencanaan, karena menentukan rumusan rangkaian kinerja dan kerja yang tepat. Identifikasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo berpijak pada hasil pemetaan masalah, serta isu strategis di dalam konteks global, nasional dan regional.

4.2.1 Isu Internasional

Isu internasional adalah isu yang perlu ditindaklanjuti secara serius karena dampaknya terasa baik di level global, nasional, hingga daerah. Terdapat banyak isu global yang diperkirakan dapat menjadi tantangan hingga tahun 2045, dan sudah mulai dirasakan hingga pada level perencanaan jangka menengah saat ini. Isu-isu internasional ini disebut sebagai megatrend global, yang dapat dimaknai sebagai pergeseran isu dan tantangan global di masa mendatang yang memiliki dampak pada sistem global hingga sistem pemerintahan di level daerah dalam berbagai aspek. Berikut gambaran megatrend global 2045 dalam dokumen RPJPN yang perlu dicermati:



Gambar 2. 58 Megatren Global 2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Seluruh pemangku kepentingan di level pusat, hingga kab/kota, dan seluruh elemen masyarakat perlu berhati-hati dan cermat dalam merespon dan merumuskan kebijakan yang sifatnya jangka menengah di masa depan. Proses perencanaan jangka menengah ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar perubahan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat global, khususnya masyarakat Kabupaten Tebo. Merujuk RPJPN, ada 10 isu strategis internasional yang sudah dirumuskan dan berpotensi dapat berdisrupsi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan global hingga daerah yang perlu dicermati dengan serius, berikut kesepuluh isu strategis tersebut:

Tabel 4. 3 Isu Strategis Internasional

No.	Isu Internasional
1	Perkembangan demografi global
2	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
3	Perkembangan teknologi
4	Peningkatan urbanisasi dunia
5	Perubahan konstelasi perdagangan global
6	Tata kelola keuangan global
7	Pertumbuhan kelas menengah (<i>middle class</i>)
8	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9	Pemanfaatan luar angkasa
10	Perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung

Sumber: RPJPN 2025-2045

Kesepuluh isu ini wajib secara serius dicermati, khususnya mana-mana saja yang berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan Kabupaten Tebo dengan melakukan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kolaborasi ini menjadi sangat penting supaya penanganan dan antisipasi dari dampak yang timbul dari isu tersebut dapat dijalankan dengan lebih optimal.

4.2.2 Isu Nasional RPJPN 2025-2045

Kebijakan pembangunan nasional sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, karenanya ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 wajib memperhatikan kebijakan-kebijakan, termasuk isu strategis pembangunan nasional yang diamanatkan kepada daerah, sehingga akan tercapai keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat-daerah. Berikut merupakan isu strategis nasional yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045:

Tabel 4. 4 Isu strategis nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No.	Isu Nasional
1	Produktivitas rendah
2	IPTEKIN dan riset lemah
3	Deindustrialisasi dini
4	Pariwisata di bawah potensinya
5	Ekonomi laut belum optimal
6	Kontribusi UMKM dan koperasi kecil
7	Infrastruktur dan literasi digital rendah
8	Pembangunan belum berkelanjutan
9	Integrasi domestik terbatas
10	Kualitas SDM yang makin rendah
11	Tata kelola Pemerintahan belum optimal
12	Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
13	Demokratisasi belum optimal
14	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Sumber: RPJPN 2025-2045

4.2.3 Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Masih banyak tantangan dan hambatan yang perlu segera diselesaikan bagi Indonesia, dan Kabupaten Tebo khususnya untuk menjadi daerah yang maju sesuai dengan cita-cita nasional. Situasi yang semakin dinamis di tingkat global dan domestik juga mengharuskan daerah untuk lebih adaptif dan responsif dalam merespon segala jenis isu dan permasalahan yang ada di tingkat nasional. Daerah perlu dengan cermat memilah berbagai isu strategis nasional tersebut, dan mengidentifikasi mana-mana saja yang sekiranya relevan dengan kondisi dan konteks Kabupaten Tebo. Identifikasi yang baik dan tepat akan membawa pada intervensi dan perumusan kebijakan yang kontekstual, tepat sasaran, dan efektif.

Isu nasional jangka menengah berkaitan dengan isu RPJMN tahun 2025-2029. Dokumen RPJMN tahun 2025-2029 berkaitan dengan penguatan fondasi Pembangunan nasional tahap pertama dalam RPJPN 2025-2045. Hasil telaah terhadap isu strategis nasional dalam Naskah Akademik RPJMN tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

- Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia: hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar;

- *aging population* negara maju: usia produktif negara maju menurun, dan potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.
- tantangan transisi energi, tetapi ada peluang untuk pemerataan: perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau, perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan;
- penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global: produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global;
- sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral: sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Selain terdapat isu secara nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah, lebih khusus lagi, nasional memberikan highlight arah kebijakan untuk Provinsi Jambi yang mencakup lima transformasi pembangunan sebagai berikut ini.

Tabel 4. 5 Highlight arah kebijakan Provinsi Jambi

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan di kawasan perkotaan Jambi, Sungaipenuh, Bangko, dan Kualatungkal • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi STEAM unggulan bertaraf internasional pada Universitas Jambi • Pengembangan rintisan perguruan tinggi negeri STEAM dan/atau vokasi di kawasan perkotaan Bangko dan Sungaipenuh • Pengembangan perguruan tinggi vokasi dan/atau akademi komunitas terbuka guna meningkatkan kualitas SDM setempat secara inklusif sesuai potensi unggulan setempat di Kab. Tanjung Jabung Barat

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan agroindustri dan bioindustri sirkular hilirisasi sumber daya hayati dan industri kimia dasar hilirisasi batubara, terutama pada koridor industri Jambi-Muarabulian • Pengembangan destinasi pariwisata yang atraktif, berkualitas, dan berkelanjutan, termasuk pengembangan potensi ekonomi kreatif sesuai local advantage, terutama di Kota Jambi dan sekitarnya, serta ekowisata unggulan pada UNESCO Global Geopark Merangin, TN Berbak, dan TN Bukit Dua Belas • Peningkatan produktivitas sawit dan karet rakyat secara berkelanjutan di Jambi • Pembangunan pembangkit listrik EBT berbasis tenaga air, terutama pada PLTA Merangin, serta pembangkit listrik EBT berbasis panas bumi, terutama pada PLTP Sungaipenuh • Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Jambi-Rengat • Pengembangan jaringan rel dan layanan perkeretaapian Trans Sumatra pada segmen JambiPekanbaru dan Jambi-Palembang • Optimalisasi dan peningkatan layanan & prasarana Bandara Depati Parbo (Kab. Kerinci), Bandara Muarabungo (Kab. Bungo), serta pengembangan bandara di kawasan perkotaan Bangko (Kab. Merangin) • Pemenuhan infrastruktur perkotaan, peremajaan kota, pemenuhan layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, penguatan kerjasama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama pada kawasan perkotaan Jambi, Sungaipenuh, dan Bangko • Pengembangan transportasi publik perkotaan di kawasan perkotaan Jambi • Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat pembangunan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi dan inklusivitas keuangan syariah di Jambi • Peningkatan kebermanfaatan kerja sama pembangunan IMT-GT di Provinsi Jambi

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan / Indikasi Intervensi
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengayaan keberagaman melalui pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai pusat interaksi antarbudaya berbasis pengetahuan lokal di Asia Tenggara • Penguatan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Jambi • Pemulihan ekosistem lahan gambut dan rehabilitasi lahan kritis di Jambi • Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui penuntasan pengolahan sampah organik, implementasi EPR, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna, terutama di kawasan perkotaan Jambi, Sungaipenuh, dan Bangko • Pemenuhan akses sanitasi aman universal untuk masyarakat di Jambi, terutama di Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Timur, dan Kab. Tanjung Jabung Barat serta kawasan perkotaan Jambi, Sungaipenuh, dan Bangko • Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan pangan nabati lainnya di Jambi, terutama pada Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Batanghari, dan Kab. Muaro Jambi • Pengembangan infrastruktur sistem transmisi listrik backbone terintegrasi Sumatra 500 kV di wilayah Jambi • Pengelolaan sumber daya air terpadu di Jambi, meliputi konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air, OP prima, dan SISDA yang andal • Pemenuhan akses air minum aman universal untuk masyarakat di Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Muaro Jambi serta pengembangan akses air minum perpipaan kawasan perkotaan Jambi, Sungaipenuh, dan Bangko • Pengelolaan risiko bencana multiancam, terutama banjir, longsor, dan kebakaran hutan & lahan, di Kab. Merangin dan Kab. Tanjung Jabung Timur, serta kawasan perkotaan Jambi, Sungaipenuh, dan Bangko

Sumber: RPJMN 2025-2029

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jambi

Tema pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJPN yakni Penyangga bioindustri dan ketahanan energi Sumatra. Lebih lanjut lagi, Provinsi Jambi di dalam RPJPD telah mengidentifikasi isu-isu pembangunan jangka panjang berupa kesejahteraan masyarakat, *aging population* dan bonus demografi, degradasi lingkungan, serta tata

kelola pemerintahan. Isu-isu tersebut melandasi visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan delapan misi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah di Provinsi Jambi, yang mencakup:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi tata kelola Pemerintah
4. Memantapkan Ketenteraman dan ketertiban Umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
5. Memantapkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Transformasi Penyediaan Sarana Prasarana Daerah
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

4.2.5 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Tebo

Penelaahan terhadap isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka panjang dengan kebijakan jangka menengah di Kabupaten Tebo. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu kewilayahan, hasil evaluasi RPJPD, FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta observasi lapangan, dan penelaahan KLHS RPJPD. Berikut adalah isu strategis jangka panjang Kabupaten Tebo periode 2025-2045.

Sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter

Sebagai salah satu subjek sekaligus objek pembangunan, sumber daya manusia menjadi salah satu isu penting yang perlu diintervensi oleh Pemerintah. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas

sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Beberapa aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia di suatu daerah antara lain adalah sektor pendidikan, kesehatan, keduanya yang kemudian akan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat hingga kualitas Angkatan kerja di suatu daerah.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tebo, isu terkait pemenuhan dan pemerataan akses pelayanan dasar yang meliputi pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Pemenuhan dan pemerataan bangunan sekolah, puskesmas, puskesmas pembantu, sarana prasarana penunjang layanan, pemenuhan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan kependidikan menjadi beberapa hal utama yang perlu diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo. Keterlibatan peran keluarga dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan juga menjadi hal yang penting guna membentuk karakter masyarakat Kabupaten Tebo di masa yang akan datang.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, aspek perlindungan sosial juga perlu diperhatikan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Aspek perlindungan sosial menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial, serta pemberdayaan bagi individu/kelompok rentan. Perlindungan sosial didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, perempuan, dan pemuda. Perbaikan sumber daya manusia dari sisi hulu yang kemudian akan menjadi kunci pembangunan terutama dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Kualifikasi tenaga kerja perlu diimbangi dengan kompetensi. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan perlu untuk dilakukan sebagai upaya mempersiapkan angkatan kerja dalam menyambut perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sumber daya manusia yang adaptif perlu diciptakan agar mampu bersaing baik di level daerah, wilayah, nasional maupun global.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan sosial yang berbasis pada sumber penghidupan Masyarakat yang berkelanjutan

Pembangunan jangka panjang di Kabupaten Tebo dihadapkan oleh beberapa isu strategis, salah satunya adalah pemberdayaan dan kesejahteraan sosial yang berbasis pada sumber penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Adanya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi perlu memperhatikan sumber penghidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Selama ini sumber penghidupan yang dijalankan di Kabupaten Tebo cenderung berjangka pendek dan tidak berkelanjutan, sehingga ketika sumber penghidupan sebelumnya tidak lagi menghasilkan, maka masyarakat cenderung berbondong-bondong untuk beralih ke sumber penghidupan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan dan bisa diberdayakan untuk menunjang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tebo.

Sumber penghidupan yang berkelanjutan menggambarkan kegiatan masyarakat yang meliputi kemampuan, aset, dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber penghidupan baru dapat dikatakan berkelanjutan apabila memenuhi beberapa aspek, yakni dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, aspek lingkungan, dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Aspek ekonomi yang dijalankan juga perlu mempertimbangkan tokoh penerima manfaat dari sumber penghidupan yang dijalankan. Kata keberlanjutan mengindikasikan bahwa manfaat dari segi ekonomi harus mampu diberdayakan dan membawa kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Inklusifitas dan transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal

Inklusifitas dan transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal adalah isu strategis pembangunan jangka panjang yang dihadapi oleh rumpun urusan ekonomi di Kabupaten Tebo. Inklusifitas dan transformasi ekonomi di Kabupaten Tebo harus mempertimbangkan berbagai indikator seperti pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan sektor yang menjadi city branding dan economic power house Kabupaten Tebo. Pertanian dan pariwisata menjadi sektor potensi lokal yang harus dipersiapkan untuk menjembatani Inklusifitas dan transformasi perekonomian di Kabupaten Tebo.

Kelestarian lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan hidup telah menjadi isu nasional bahkan global. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan tiga isu global (triple planetary crisis) yang menjadikan isu terkait kelestarian lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi. Sehingga, isu terkait kelestarian lingkungan hidup cukup penting untuk menjadi perhatian dalam agenda pembangunan di setiap daerah.

Konteks Kabupaten Tebo, isu terkait kelestarian lingkungan hidup direpresentasikan melalui capaian IKLH yang belum sepenuhnya optimal, khususnya pada komponen IKA dan IKTL. Capaian kedua komponen tersebut yang masih rendah, menjadikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tebo perlu untuk lebih diperhatikan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih lagi, apabila industri sawit dan hilirisasinya akan semakin berkembang di Kabupaten Tebo. Perlindungan terhadap tutupan lahan, kualitas badan – badan air maupun praktik pembuangan asap dari industri tersebut perlu untuk semakin diperketat dalam pengawasannya. Sehingga dampak berupa kerusakan lingkungan akibat berkembangnya industri sawit maupun aktivitas lain yang berpotensi memberikan dampak bagi lingkungan di Kabupaten Tebo dapat terminimalisir.

Industri sawit berkelanjutan

Industri sawit telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi di banyak negara tropis, termasuk Indonesia. Pengembangan industri sawit berkelanjutan memberikan manfaat langsung bagi para petani sawit lokal yang terlibat dalam produksi sawit. Kondisi tersebut tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Terlebih lagi pengembangan industri diimplementasikan dengan berpegang pada pilar berkelanjutan, yang artinya juga memiliki fokus pada upaya untuk menciptakan keberlanjutan perekonomian masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan petani, memperluas peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan terbangunnya infrastruktur lokal merupakan hasil yang diharapkan dari pengembangan industri sawit yang berkelanjutan tersebut.

Infrastruktur pelayanan dasar yang berketahanan

Infrastruktur fisik suatu daerah memegang peranan penting sebagai penggerak pembangunan baik dalam memacu pertumbuhan ekonomi maupun dari sisi pengembangan budaya sosial kemasyarakatan. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan syarat penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan. Kabupaten Tebo telah memiliki akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Mobilitas masyarakat masih terkendala karena infrastruktur jalan yang belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Jaringan jalan yang mantap dan merata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mudak mengakses pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar salah satunya yakni pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Tebo belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat bahkan beberapa wilayah di Kabupaten Tebo merupakan wilayah rawan kekeringan. Selain pemenuhan air bersih untuk masyarakat, pemenuhan layanan sanitasi, jaringan drainase, persampahan, dan kebencanaan di Kabupaten Tebo saat ini pun belum mampu menjangkau seluruh wilayah karena infratraktur yang belum memadai. Infrastruktur kebencanaan di Kabupaten Tebo difokuskan pada pengurangan risiko bencana banjir. Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Tebo mengharuskan penerapan mitigasi struktural berupa pembangunan kolam retensi dan drainase untuk mengurangi risiko bencana banjir yang sering terjadi.

Tata kelola Pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi (SPBE, IRB)

Tata kelola yang akuntabel menjadi pondasi yang kuat dalam berfungsinya roda Pemerintahan di Kabupaten Tebo. Tata kelola Pemerintahan perlu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas dan berbasis pemanfaatan teknologi. Akuntabilitas kinerja menjadi sangat krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, karena secara prinsip seluruh anggaran yang ada dan dimanfaatkan oleh Pemerintah merupakan uang yang berasal dari masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi krusial dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola internal Pemerintah karena digitalisasi dapat membawa perubahan cepat menuju ke arah yang lebih baik.

Pemanfaatan teknologi atau digitalisasi ini dapat dilihat dengan seberapa jauh implementasi arsitektur SPBE yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Tebo.

4.2.6 Telaah RTRW Kabupaten Tebo

Wilayah Kabupaten Tebo sebagian besar mempunyai kemiringan di bawah 15% meliputi wilayah seluas 523.200 Ha atau mencakup 83% dari luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi bentang alam demikian menunjukkan bahwa wilayah kabupaten Tebo relatif datar sampai landai dan akan cocok untuk usaha pertanian, peternakan dan perkebunan. Namun, kondisi tanah di Kabupaten Tebo sebenarnya kurang baik untuk usaha pertanian, karena hampir seluruh tanah di kabupaten Tebo mempunyai tekstur tanah halus (98,5%), hanya Kecamatan Tebo Tengah dan Sumay yang mempunyai tekstur tanah sedang, itupun jumlahnya sangat sedikit. Perlu adanya upaya penambahan bahan organik dan teknik pengolahan tanah yang tepat agar tanah bertekstur halus cocok dikembangkan untuk pertanian.

Sumber air bersih yang dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, maupun jalur transportasi yakni memanfaatkan sungai. Sungai terbesar yang melalui kabupaten Tebo adalah sungai Batanghari dengan luas wilayah aliran sungai sekitar 71.400 Ha, sedangkan sungai lainnya merupakan anak sungai dari Batanghari. Komoditas pertanian di Kabupaten Tebo dengan luasan paling luas adalah padi sawah dengan luas 8.478 hektar atau sekitar 40,68% dari keseluruhan wilayah pertanian di Kabupaten Tebo. Komoditas perkebunan paling luas di Kabupaten Tebo adalah karet yang berada di Kebun Rakyat seluas 113.416 hektar, sedangkan kelapa sawit seluas 60.629 hektar tertanam di kebun rakyat dan 4.790,13 hektar tertanam di kebun swasta. Selain potensi pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata di Kabupaten Tebo terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya telah ditetapkan 10 kawasan wisata alam, 6 kawasan wisata budaya, dan 3 kawasan wisata buatan.

Berdasarkan beberapa gambaran umum kewilayahan di Kabupaten Tebo tersebut, maka dirumuskan tujuan penataan ruang serta kebijakan dan strategi penataan ruang untuk tahun 2013-2033. Tujuan penataan ruang Kabupaten Tebo yaitu "mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan

yang berkelanjutan”. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, kemudian dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

1. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
 - a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.
2. Peningkatan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
 - a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata
 - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muara Sabak dan pelayanan sampai pelosok
 - c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian
3. Pengembangan pusat-pusat agroindustri
 - a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agroindustri
 - b. mengembangkan kawasan agroindustri untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pusat agroindustry di Kecamatan Tengah Ilir
 - c. memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agroindustri di Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan VII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional
 - e. mengendalikan kawasan perkebunan secara ketat
 - f. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk perkebunan unggulan sebagai satu kesatuan sistem;

- g. mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menunjang pengembangan agroindustri
 - h. mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi
 - i. mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional.
4. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
 - a. mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman
 - b. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan home industry pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan
 - d. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta investasi.
 5. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan
 - a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup
 - b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
 - f. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam
 - g. melindungi DAS Batanghari sebagai penunjang kehidupan dan lingkungan.

6. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan
 - a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di Kabupaten Tebo
 - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya
 - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal
 - d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
 - a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

4.2.7 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tebo

Berdasarkan Perpres No.59 Tahun 2017, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah:

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan
4. Ketentuan indikator RPJMD.

Jumlah indikator TPB berdasarkan kewenangan untuk Pemerintah Kabupaten adalah 220 indikator. Setelah dilakukan evaluasi terdapat 12 indikator yang bukan merupakan kewenangan (BK) Kabupaten Tebo. Sehingga total indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Tebo adalah 208 indikator TPB. Dari 17 TPB yang ditetapkan, hanya 15 TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Tebo. TPB 14 yaitu konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim tidak menjadi kewenangan Kabupaten Tebo karena terkait wilayah administrasi Kabupaten Tebo yang tidak mempunyai wilayah laut. Kemudian TPB 7 yaitu terkait akses energi juga bukan merupakan kewenangan Kabupaten Tebo. TPB dengan indikator terbanyak adalah TPB No.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu total 34 indikator (16%) dan diikuti dengan TPB No.1 Tanpa Kemiskinan dengan jumlah indikator 23 (11%) dan TPB No.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh dengan 21 indikator (10%). Kategori evaluasi capaian indikator TPB Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target atau disingkat dengan SS;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target atau disingkat dengan SB;
3. Indikator TPB belum dilaksanakan atau tidak ada data tersedia, disingkat NA (*not available*); dan
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target atau disingkat BB.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Tebo yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) mencapai 35% (72 indikator). Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi SS mempunyai persentase capaian tertinggi. Komposisi pelaksanaan TPB Kabupaten Tebo seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 6 Proporsi Capaian Indikator TPB Kabupaten Tebo

No. TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	23	15	4	1	3

No. TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
2	Tanpa Kelaparan	11	4	2	5	-
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	9	8	15	2
4	Pendidikan berkualitas	13	2	3	8	-
5	Kesetaraan gender	14	4	3	6	1
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	5	5	2	5
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	6	6	7	-
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	10	8	1	1	-
10	Mengurangi kesenjangan	10	4	1	5	-
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	8	1	3	3	1
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	3	1	-
13	Penanganan perubahan iklim	2	-	1	-	1
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	1	-	-	3
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	6	8	7	-
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	6	3	4	2
Total		206	72	51	65	18
Persentase			35%	25%	32%	9%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Meskipun indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target indikator memiliki proporsi yang paling besar, namun persentase TPB belum dilaksanakan atau tidak ada data tersedia menempati urutan kedua terhadap capaian TPB di Kabupaten Tebo. Kesehatan, kesejahteraan dan juga pendidikan masih menjadi persoalan dan tantangan yang perlu untuk dioptimalkan penanganannya dengan baik di Kabupaten Tebo. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan capaian TPB pada poin ke tiga dan empat yang masih memiliki kategori belum tercapai atau belum dilaksanakan. Evaluasi capaian TPB tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis sekaligus sebagai objek pengintegrasian antara dokumen KLHS dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo dalam lima tahun kedepan.

4.2.9 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Tebo

a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang inklusif

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pemenuhan layanan dasar meliputi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, beberapa bidang tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.

Peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi kunci dalam mempersiapkan kondisi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing, baik di tingkat lokal maupun global. Secara operasional, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan dengan terpenuhinya akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan yang inklusif dan memadai.

Inisiatif serta terobosan kebijakan pada bidang pendidikan menjadi penting dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Beberapa hal yang menjadi fokus sebagai langkah merespon perkembangan zaman adalah isu yang berkaitan dengan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Selain itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi dan industri menjadi salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan dan menyelaraskan kebutuhan industri dengan kurikulum pendidikan.

Peningkatan kesadaran dalam bidang kesehatan turut menjadi hal yang penting guna membangun manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan budaya hidup sehat, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular menjadi bagian paling mendasar dalam mewujudkan manusia yang sehat. Oleh karena itu, inovasi dalam peningkatan KIE pada bidang kesehatan menjadi poin penting yang harus diperhatikan

pemerintah Kabupaten Tebo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada urusan kesehatan.

b. Peningkatan perlindungan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan

Capaian pada perlindungan sosial dan kesejahteraan dapat dilihat dari sejauh mana keberadaan dan implementasi kebijakan pemerintah untuk mengatasi situasi kerentanan yang dihadapi masyarakat. Kerentanan sendiri bukan kondisi yang terberi, melainkan berkaitan dengan proses yang menyebabkan kelompok tertentu tidak memiliki akses untuk mengatasi risiko yang dihadapinya. Faktor penyebabnya cukup beragam seperti situasi kemiskinan, pemberlakuan norma sosial tertentu, dan bencana.

Secara umum, kelompok rentan di Kabupaten Tebo dapat meliputi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dimensi kerentanan masing-masing kelompok tersebut beragam. Sehingga dibutuhkan identifikasi yang mendalam untuk memilah spesifikasi isu yang dihadapi. Pada kelompok perempuan, isu seputar pelecehan dan kekerasan seksual masih dominan. Oleh karena struktur pemukiman berbasis perkebunan sawit, korban semakin berisiko untuk mencari perlindungan dan bantuan saat pelecehan atau kekerasan terjadi. Sehingga dibutuhkan mekanisme khusus untuk mengatasi problem tersebut. Pada level kuratif, lembaga-lembaga terkait dapat mengoptimalkan peran layanan pengaduan dan pemulihan korban. Sementara pada level preventif diperlukan sosialisasi atau peningkatan kapasitas komunitas baik yang berpotensi menjadi pelaku dan korban tentang risiko kasus pelecehan dan kekerasan seksual termasuk cara untuk meresponsnya. Demikian halnya pada kasus anak, dimana pelaku pelecehan dan kekerasan seksual seringkali adalah kerabat terdekat. Edukasi dan penguatan hukum merupakan strategi yang perlu ditingkatkan untuk memastikan optimalisasi pemenuhan hak dan perlindungan terhadap kelompok anak.

Sementara pada kelompok lansia, yang perlu diperhatikan adalah akses terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial. Stigma bahwa lansia cenderung tidak produktif dan mengalami penurunan kesehatan seringkali membuat para lansia tidak diperhatikan. Di Kabupaten Tebo, akses dan fasilitas untuk lansia tampak masih terbatas. Dari segi infrastruktur, belum ada transportasi yang ramah lansia. Sementara mereka juga memiliki kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan dan sosial lainnya. Di sisi penyedia layanan sendiri juga masih perlu dioptimalkan ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan khusus para lansia. Sementara itu, di level komunitas, strategi pemberdayaan lansia melalui posyandu lansia dapat memberikan dampak yang positif. Namun penyelenggaraan posyandu lansia yang berbasis kesukarelaan juga menjadi tantangan. Komitmen para kader sulit dikelola karena sebagai penduduk yang juga tinggal di area pertanian, para kader juga memiliki kegiatan atau rutinitas pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Pengelolaan sumber daya penggerak di level komunitas inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait.

Demikian halnya pada kelompok disabilitas yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang setara. Pendekatan atau kebijakan yang memungkinkan terbangunnya sekolah inklusif perlu difasilitasi oleh pemerintah. Komitmen terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif memiliki sejumlah tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur dan tenaga pendidik atau guru. Di Kabupaten Tebo, inisiasi untuk membangun sekolah alternatif telah mulai muncul tapi berasal dari komunitas atau swasta. Inisiasi ini tampak mendapatkan respons positif dari masyarakat yang mengindikasikan adanya kebutuhan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

c. Tantangan sektor ekonomi unggulan dan optimalisasi sektor potensial

Perekonomian Kabupaten Tebo didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 51,84 persen per tahun pada periode 2019-2023. Komoditas kelapa sawit dan karet menjadi produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh masyarakat dan pihak swasta. Pada tahun 2023, produksi perkebunan rakyat untuk komoditas kelapa sawit mencapai 119.264 ton. Namun demikian, produksi kelapa sawit di Kabupaten Tebo belum diikuti dengan sistem penanaman berkelanjutan yang optimal.

Persoalan keberlanjutan menjadi salah satu isu penting mengingat potensi perkebunan daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkebunan berkelanjutan, khususnya sawit berkelanjutan, memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan produksi dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Hal ini didorong oleh kebutuhan pasar akan kelapa sawit yang diprediksi akan semakin tinggi di mana produk turunan dari kelapa sawit dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan pangan hingga energi. Namun demikian, persoalan harga kelapa sawit menjadi isu tersendiri, khususnya bagi masyarakat. Fluktuasi harga sangat mungkin terjadi terlebih jika tidak diatur oleh pemerintah dan dapat merugikan para petani, khususnya bagi petani di perkebunan rakyat.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah pengolahan hasil perkebunan yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan adanya *opportunity loss* yang seharusnya berdampak pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk kelapa sawit sendiri dapat diturunkan menjadi berbagai produk dan digunakan dalam industri fraksinasi/rafinasi (utamanya minyak goreng), lemak khusus (*cocoa butter substitute*), margarin/*shortening*, *oleochemical*, dan sabun mandi.

Hilirisasi hasil SDA menjadi salah satu kunci peningkatan nilai tambah produk tetapi membutuhkan investasi yang cukup besar. Peningkatan iklim investasi yang bersaing menjadi tantangan yang besar bagi Kabupaten Tebo mengingat kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung perekonomian. Selain itu, kemudahan investasi melalui proses perizinan yang mudah dan cepat serta pemberian insentif bagi investor perlu untuk diwujudkan agar dapat menarik investasi masuk ke Kabupaten Tebo.

d. Sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan

Penghidupan yang layak dari perspektif ekonomi dapat dilihat melalui indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan karena dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan pola dan

perkembangan distribusi pendapatan/ sumber penghidupan masyarakat. PDRB per kapita Kabupaten Tebo masih berada cukup jauh di bawah PDRB per kapita Provinsi Jambi maupun PDB per kapita Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dari segi ekonomi penghidupan yang layak masyarakat Kabupaten Tebo masih berada di bawah provinsi maupun nasional. Kondisi ini berhubungan dengan berbagai faktor, salah satu yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya nilai tambah dari produksi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tebo. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya pendapatan/ sumber penghidupan yang layak masyarakat Kabupaten Tebo jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan rata-rata nasional.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,26 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 7,72 persen dibandingkan tahun 2013. Tingginya pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2014 didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8,82 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stagnan di kisaran 2 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita mengikuti pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo dimana PDRB per kapita setelah tahun 2014 menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin turun. PDRB per kapita Kabupaten Tebo sempat mengalami pertumbuhan yang negatif atau mengalami penurunan pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian Kabupaten Tebo menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi berkontraksi sedangkan jumlah penduduk tetap tumbuh positif. Namun, seiring dengan pulihnya perekonomian Kabupaten Tebo, PDRB per kapita kembali tumbuh positif sebesar 3,15 persen pada tahun 2021 dan semakin tinggi mencapai 5,17 persen pada tahun 2022. PDRB per kapita tahun 2022 mencapai 31,22 juta rupiah berdasar harga konstan atau 54,62 juta rupiah berdasar harga berlaku.

PDRB per kapita Kabupaten Tebo dibentuk oleh struktur ekonomi Kabupaten Tebo. Perekonomian Kabupaten Tebo sejak tahun 2010 hingga tahun 2022 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 49,45 persen per tahun. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar 47,91 persen pada tahun 2011

menjadi 51,44 persen pada tahun 2022. Tingginya kontribusi sektor pertanian didorong oleh tingginya nilai tambah komoditas karet dan kelapa sawit yang selama ini menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tebo.

Perekonomian Kabupaten Tebo tidak hanya digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan saja tetapi juga didorong oleh sektor usaha lainnya meskipun kontribusinya cenderung jauh lebih kecil. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor turut berkontribusi pada perekonomian Kabupaten Tebo dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,72 persen per tahun pada periode 2010-2022. Secara rata-rata, sektor perdagangan menjadi sektor terbesar kedua yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Tebo setelah sektor pertanian selama periode 2010-2022. Namun, kontribusi sektor perdagangan mulai mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan tercatat sebesar 10,62 persen lalu turun sebesar 0,31 persen poin menjadi 10,31 persen pada tahun 2021, lalu semakin turun sebesar 0,42 persen poin menjadi 9,89 persen pada tahun 2022. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perubahan struktur perekonomian yang mulai berjalan perlahan.

Perekonomian Kabupaten Tebo masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kecenderungan kontribusi yang semakin meningkat. Selain itu, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga mulai kembali menunjukkan dominasinya meskipun nilainya masih jauh di bawah sektor pertanian. Kondisi ini perlu dijadikan perhatian mengingat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian memiliki nilai tambah yang rendah. Terlebih lagi kegiatan di sektor pertambangan dan penggalian bersifat ekstraktif dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat memberikan eksternalitas negatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor sekunder dan tersier demi menjaga kestabilan perekonomian Kabupaten Tebo.

e. Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian

Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan rumah layak huni masyarakat masih perlu terus diupayakan karena saat ini di Kabupaten Tebo masih terdapat Kawasan Kumuh yang tersebar di 13 lokasi dengan luasan 500 hektar. Namun kendala yang dihadapi dalam penanganannya masih belum adanya baseline numerik dan dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah. Kondisi permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Tebo diperkuat dengan belum meratanya layanan air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat. Tercatat pada tahun 2022 cakupan akses air minum layak baru 65-75% mencakup 122 desa, namun masih ada beberapa desa yang belum terlayani. Sedangkan cakupan layanan sanitasi layak sebesar 87,6%, belum melayani keseluruhan wilayah Kabupaten Tebo.

Pelayanan air bersih dan air minum masyarakat yang terlayani jaringan distribusi PDAM hanya mencakup kawasan perkotaan dan belum mampu mengakses seluruh masyarakat terutama yang jaraknya jauh. Layanan air bersih dan air minum layak belum menjangkau seluruh desa, masyarakat yang belum terjangkau menggunakan air sumur atau air sungai. Selain jaringan distribusi PDAM, layanan air bersih masyarakat dibantu dengan adanya PAMSIMAS, walaupun belum mampu mencakup seluruh desa. Sumber air baku yang dimanfaatkan di Kabupaten Tebo juga belum optimal, belum tersedianya embung atau bendungan yang dapat difungsikan sebagai penyedia air bersih terutama pada daerah rawa yang rawan terjadi kekeringan. Selain itu belum tersedianya bangunan kolam retensi maupun saluran pembuangan air yang dapat menampung air berlebih sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi banjir.

Infrastruktur pendukung perekonomian juga menjadi isu yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi pendukung arus distribusi barang dan jasa di Kabupaten Tebo. Kondisi jaringan jalan dalam kondisi mantap baru mencapai kurang dari 65% dan belum terpelihara dengan baik, sehingga banyak ditemukan jalan rusak maupun rusak berat. Selain sebagai pendukung distribusi barang dan jasa, jaringan jalan juga difungsikan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan. Selain jaringan jalan, isu lain

yang perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo adalah jaringan listrik dan telekomunikasi. Masih perlu adanya peningkatan ketersediaan jaringan listrik, karena masing belum meratanya cakupan pelayanan listrik terutama di level dusun, jika ditinjau level desa telah mencapai 100%. Cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi juga masih ditemukan lokasi *Blankspot* di daerah seberang sungai yang mencakup 32 desa.

f. Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan

Kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan menjadi aspek yang saling berhubungan diantara keduanya. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukannya memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, pemanfaatan ruang yang diperuntukan sebagai kawasan lindung, dan implementasinya juga disesuaikan dengan peruntukannya yakni sebagai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dapat memberi dukungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Tebo telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043, yang mana telah dilakukan revisi dari RTRW sebelumnya, untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tebo. Dengan demikian penyesuaian rencana tata ruang Kabupaten Tebo dilakukan revisi untuk mengendalikan peruntukan pemanfaatan ruang agar keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor di Kabupaten Tebo dapat terwujud, sesuai dengan tujuan dalam dokumen RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043, yakni mewujudkan Kabupaten berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, jika dilihat dari capaian rasio kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di Kabupaten Tebo, tercatat dalam capaian termutakhir tahun 2023 sebesar 33,33%. Kondisi tersebut menunjukkan masih diperlukannya optimalisasi penataan ruang dalam pemanfaatan tata ruang wilayah di Kabupaten Tebo. Dengan demikian, dalam

penataan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tebo perlu untuk lebih lanjut memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, seperti optimalisasi penataan kawasan perkotaan dan perdesaan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), serta peningkatan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan bangunan. Upaya tersebut perlu untuk nantinya dimuat didalam arah pembangunan dan kebijakan dalam rencana pembangunan 5 tahun kedepan. Dengan demikian, diharapkan berbagai upaya tersebut dapat mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan tata ruang, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta wilayah di Kabupaten Tebo.

Lebih lanjut lagi, secara eksplisit kesesuaian pemanfaatan ruang dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam mempertahankan fungsi daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menimbulkan potensi dampak terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui. Kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya direpresentasikan dengan capaian terhadap indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indikator ini juga sekaligus menggambarkan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan suatu daerah dengan adanya intervensi dari sebuah kebijakan, rencana maupun program. Kabupaten Tebo tercatat mengalami penurunan capaian IKLH berdasarkan tahun termutakhir 2023 dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ketiga komponen pembentuk indikator tersebut, yakni IKU, IKA, dan IKTLH, mengalami penurunan. Selaian intervensi secara langsung yang menyebabkan ketiga komponen mengalami penurunan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang juga dapat dimungkinkan memberikan kontribusi terhadap menurunnya capaian terhadap ketiga komponen IKLH. Lebih lanjut lagi terkait pengelolaan persampahan, penambangan emas tanpa izin (PETI), dan alih fungsi lahan juga masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dalam penanganannya, sehingga dapat memberikan dukungan dalam mempertahankan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk dimasukkan dalam arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo, dengan tujuan dapat mengawal pembangunan Kabupaten Tebo yang lestari dan berkelanjutan.

g. Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan isu strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tebo. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks ini, akselerasi reformasi birokrasi berarti mempercepat pelaksanaan perubahan sistem dan prosedur kerja yang lebih modern dan adaptif. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penyederhanaan regulasi dan prosedur administratif. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang dipercepat akan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah hasil dari reformasi birokrasi yang efektif. Di Kabupaten Tebo, akselerasi reformasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Peningkatan kualitas pelayanan publik melibatkan perbaikan sistem pengaduan masyarakat, penyediaan layanan yang berbasis teknologi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima tanpa harus terjebak dalam proses birokrasi yang panjang dan rumit. Peningkatan kualitas layanan publik ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.

Selain itu, akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Tebo juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Proses perizinan yang cepat dan transparan, serta dukungan administratif yang profesional, akan memperkuat daya saing Kabupaten Tebo dalam menarik investasi. Hal ini pada gilirannya akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, akselerasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik tidak hanya

menjadi kunci keberhasilan pemerintahan yang efektif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tebo.

h. Pengembangan kawasan perdesaan dan keberdayaan desa

Desa merupakan institusi penting dalam pembangunan daerah. Desa juga merupakan representasi sebagian besar wajah Kabupaten Tebo dengan jumlah desa sebanyak 122. Meskipun demikian, perkembangan pembangunan desa di Tebo masih memiliki tantangan. Desa perlu akselerasi pembangunan baik melalui pembangunan desa maupun pendekatan berbasis kawasan perdesaan.

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun pendekatan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten/kota. Inti dari Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tinjauan RTRW Kab. Tebo (Perda Nomor 01 Tahun 2023 tentang RTRW Tahun 2023-2043) Kecamatan VII Koto Ilir termasuk dalam Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagai kawasan agroindustri dengan tujuan mewujudkan kawasan agroindustri berbasis pembangunan ekonomi lokal yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Secara administratif, di Kecamatan VII Koto Ilir terdapat 6 (enam) desa yaitu Desa Cermin Alam, Desa Paseban, Desa Balai Rajo, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Desa Sungai Karang dan Desa Pasir Mayang. Sedangkan

kawasan yang ditetapkan dan dikembangkan sebagai kawasan Mina-Agropolitan terdiri dari 3 (tiga) desa yang terdiri dari Desa Paseban, Desa Cermin Alam dan Desa Balai Rajo. Ketiga desa Kawasan perdesaan berada dalam satu kawasan yang saling berdekatan, serta memiliki potensi unggulan yang saling mendukung untuk dikembangkan satu sama lain dengan komoditas unggulan berupa padi sawah, padi ladang, kedelai, ikan nila serta potensi wisata danau. Ketiganya juga telah memiliki Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) Kawasan dan BUMDESMa Kawasan. Namun demikian, dalam pengembangannya bukan berarti tanpa tantangan nantinya, seperti komitmen desa-desa selaku anggota kawasan perdesaan, konsistensi dan konvergensi stakeholder dalam pendampingan, kemampuan dalam percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan serta pemberdayaan partisipatif, dan persaingan dunia usaha. Berbagai tantangan tersebut perlu untuk direspon dengan tepat, diantaranya melalui perencanaan yang sinergi-terintegrasi, payung hukum yang jelas serta sistem pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tebo.

BAB V

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan memuat rumusan kinerja dan kerja sebagai acuan perumusan visi, misi, dan program prioritas calon Kepala Daerah. Selain itu, rumusan rekomendasi juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJMD secara utuh. Kinerja sendiri didefinisikan sebagai kondisi yang akan dicapai, sedangkan kerja merupakan rangkaian agenda pembangunan dan indikasi program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapai kinerja. Rumusan kinerja dan kerja sebagai rekomendasi kebijakan dari Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rekomendasi Kinerja dan Kerja Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029

Rekomendasi Kinerja				Rekomendasi Kerja	
Indikasi Tujuan	Indikator Tujuan	Indikasi Sasaran	Indikator Sasaran	Agenda Pembangunan	Indikasi Program Prioritas/Unggulan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	Meningkatnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Pembangunan SDM yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Perluasan akses perlindungan sosial bagi masyarakat rentan
		Meningkatnya kemandirian desa dan akselerasi kawasan perdesaan	Persentase desa mandiri		Pengembangan desa dan kawasan perdesaan berbasis aset dan potensi
		Meningkatnya serapan pada pekerjaan yang layak	Tingkat pengangguran		Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Meningkatnya permukiman dan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau		Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri
	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks Pendidikan	Pembangunan SDM yang berkualitas,	Akses rumah layak huni dan permukiman tanpa kumuh
					Pendidikan dasar berkualitas

Rekomendasi Kinerja				Rekomendasi Kerja	
Indikasi Tujuan	Indikator Tujuan	Indikasi Sasaran	Indikator Sasaran	Agenda Pembangunan	Indikasi Program Prioritas/Unggulan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		berkarakter dan berdaya	Fasilitasi akses pendidikan vokasi dan tinggi
					Penguatan pelestarian kebudayaan daerah dan peran lembaga keagamaan
		Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	Indeks Kesehatan		Pemenuhan kesehatan perorangan dan masyarakat
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender		Penanganan stunting terintegrasi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Perekonomian yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan berkelanjutan	Kontribusi PDRB industri pengolahan	Pembangunan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan industri sawit berkelanjutan
					Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Rekomendasi Kinerja				Rekomendasi Kerja		
Indikasi Tujuan	Indikator Tujuan	Indikasi Sasaran	Indikator Sasaran	Agenda Pembangunan	Indikasi Program Prioritas/Unggulan	
					Pengembangan ekonomi sirkular	
			Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		Peningkatan ketahanan pangan	
					Peningkatan produktivitas sektor agro non-sawit	
			Penurunan emisi GRK		Perumusan kebijakan ekonomi hijau	
		Tumbuhnya ekonomi alternatif yang inklusif	Pertumbuhan sektor perdagangan			Peningkatan daya tarik pariwisata
						Pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta integrasi dengan rantai pasok
						Peningkatan kewirausahaan pemuda
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian	Persentase jalan mantap			Peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarpusat pertumbuhan

Rekomendasi Kinerja				Rekomendasi Kerja	
Indikasi Tujuan	Indikator Tujuan	Indikasi Sasaran	Indikator Sasaran	Agenda Pembangunan	Indikasi Program Prioritas/Unggulan
Meningkatnya ketahanan ekologi	Indeks keanekaragaman hayati	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Pengendalian pemanfaatan tata ruang
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		Penguatan kapasitas penanggulangan bencana
		Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Pengelolaan persampahan berbasis hulu-hilir
					Pengendalian kebijakan lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Nilai SAKIP	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan adaptif transformasi digital	Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan sistem kerja yang dinamis
					Implementasi sistem merit dan peningkatan kapasitas ASN
					Belanja dan pendapatan yang

Rekomendasi Kinerja				Rekomendasi Kerja	
Indikasi Tujuan	Indikator Tujuan	Indikasi Sasaran	Indikator Sasaran	Agenda Pembangunan	Indikasi Program Prioritas/Unggulan
					inovatif dan berorientasi kinerja
			Indeks SPBE		Peningkatan kualitas SPBE dan digitalisasi pelayanan publik yang inklusif
			SPIP terintegrasi		Peningkatan sistem integritas dan pengendalian intern pemerintah
					Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan

Sumber: Analisis, 2024

BAB VI

PENUTUP

Naskah Akademik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratik melalui analisis data dan informasi dengan metode ilmiah terhadap kondisi umum daerah, kinerja pembangunan daerah, dan kerangka pendanaan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Dari analisis tersebut, kemudian menghasilkan rumusan permasalahan pembangunan utama dan isu strategis untuk lima tahun ke depan, yang dirasa bersifat mendesak dan penting untuk segera direspon, serta berdampak luas terhadap pembangunan Kabupaten Tebo selama lima tahun ke depan.

Selain itu, dokumen ini juga memuat hasil analisis terhadap kebijakan jangka panjang nasional, provinsi, dan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2045 meliputi sasaran pokok, arah pembangunan, dan arah kebijakan transformatif. Hasil analisis tersebut disandingkan dengan isu strategis jangka menengah yang telah dirumuskan dalam rangka menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan mampu menyelesaikan isu strategis berupa kinerja dan arah kebijakan kewilayahan beserta lokus kebijakan untuk lima tahun ke depan. Selanjutnya Naskah Akademik RPJMD Tahun 2025-2029 ini dikoordinasikan kepada KPUD sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 terutama terkait dengan penyediaan data dan informasi, serta rekomendasi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan serta dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program prioritas ke depan.



